109 th
Kebangkitan
Nasional

KI HAJAR DEWANTARA

"Pemikiran dan Perjuangannya"

Diperbanyak dalam rangka pameran Tokoh Ki Hadjar Dewantara
di Museum Kebangkitan Nasional 27 April s.d 31 Mei 2017
yang diselenggarakan oleh Museum Kebangkitan Nasional

KI HAJAR DEWANTARA
"Pemikiran dan Perjuangannya"

Museum Kebangkitan Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

"PERJUANGAN KI HAJAR DEWANTARA : DARI POLITIK KE PENDIDIKAN"

Pengantar :

R. Tjahjopurnomo
Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Penulis:

Suhartono Wiryopranoto
Prof. Dr. Nina Herlina, M. S,
Prof. Dr. Djoko Marihandono,
Dr. Yuda B Tangkilisan
Tim Museum Kebangkitan Nasional

Editor:

Prof. Dr. Djoko Marihandono,

Desain dan Tata Letak:

Tim Atap Komunika

ISBN 978-602-61552-0-7

Diterbitkan:

Museum Kebangkitan Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SAMBUTAN
KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKN DAN KEBUDYAAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan rasa syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-Nya buku yang membahas tentang Ki Hadjar Dewantara dapat diterbitkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tentu saja hal ini membuat bangga kami semua. Untuk kerja keras yang selama ini telah dilakukan, atas nama pimpinan museum, saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para kontributor, antara lain: Prof. Dr. Nina Herlina Lubisdari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto dari Universitas Gadjah Mada dan Prof. Dr. Djoko Marihandono dari Universitas Indonesia, yang di sela-sela kesibukannya telah menyediakan waktu khusus untuk menulis tentang tokoh pendidikan yang memiliki kedudukan terhormat di negeri ini. Sungguh merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi pengelola museum, karena penerbitan buku ini ditulis oleh para pakar dalam bidangnya yang berasal dari tiga universitas ternama di Indonesia.

Tokoh RM Soewardi Soerjaningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang sangat fenomenal. Walaupun predikat dokter tidak dapat diraihnya, akan tetapi tokoh ini justru berkembang

dalam bidang jurnalistik. Kiprahnya di bidang politik diwujudkan dalam tulisan-tulisan yang dimuat di koran dan majalah baik terbitan Hindia Belanda maupun negeri Belanda. Sebagai tokoh yang mahir dalam menulis, ia memiliki pengalaman yang unik karena ia ditahan bahkan dibuang akibat dari tulisan yang dihasilkannya. Selama masa pembuangan, ia pun tetap menulis bahkan sering tenaganya dipinjam untuk menulis di koran/mingguan Belanda.

Profesi sebagai jurnalis dan politikus ditinggalkan setelah kembali dari pengasingan. Ki Hadjar Dewantara akhirnya berkecimpung di bidang pendidikan setelah ia mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama Pergerakan Pendidikan Taman Siswo. Penghargaan yang tinggi dari pemerintah diberikan kepada tokoh ini, yang menjadikan hari lahirnya sebagai hari Pendidikan Nasional, yang diperingati pada setiap 2 Mei. Mudah-mudahan buku ini dapat melengkapi buku-buku yang telah diterbitkan sebelumnya dengan harapan bahwa Bangsa Indonesia tetap mampu menghargai jasa para pahlawannya yang telah berjasa dalam mengantar bangsa ini ke gerbang kemerdekaan dan mampu bersaing dengan bangsa lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, April 2017

R.Tjahjopurnomo

Daftar Isi

GAGASAN KI HAJAR DEWANTARA DI BIDANG POLITIK

SUHARTONO WIRYOPRANOTO

1

A. Biografi Singkat

Pada dasarnya sejarah adalah hubungan antarbiografi yang melewati atau menembus batas waktu. Membicarakan Ki Hajar Dewantara (KHD), hal ini berarti memahami relasinya dengan tokoh-tokoh sejarah yang sezaman khususnya di bidang politik, meski bidang-bidang lain tidak dapat ditinggalkan. Sebaran spasialnya tentunya seluruh nusantara dan lingkup temporalnya mencakup periode pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia pada akhir abad XIX sampai dengan pertengahan abad XX.

KHD lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama RM Soewardi Soerjaningrat (SS), putra GPH Soerjaningrat, atau cucu Sri Paku Alam III. Dari genealoginya SS adalah keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, SS mengenyam pendidikan ELS *(Europeesche Lagere School)* – Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Kemudian SS mendapat kesempatan masuk STOVIA *(School tot Opleiding*

voor Inlandsche Artsen) biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan sehingga SS tidak tamat dari sekolah ini.

Adapun profesi yang digelutinya adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu: *Sediotomo*, *Midden Java*, *De Expres*, *Oetoesan Hindia*, *Kaoem Moeda*, *Tjahaja Timoer*, dan *Poesara* yang melontarkan kritik sosial-politik kaum bumiputra kepada penjajah. Tulisannya komunikatif, halus, mengena, tetapi keras. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dalam sanubarinya direalisasikan dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa (1922) guna mendidik masyarakat bumiputra.

Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman SS berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan *kawula* (rakyat). Jiwanya menyatu lewat pendidikan dan budaya lokal (Jawa) guna menggapai kesetaraan sosial-politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar SS dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik.

Keteguhan hatinya untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia lewat pendidikan dilakukan dengan resistensi terhadap Undang-undang Sekolah Liar *(Wilde Scholen Ordonnantie, 1932).* Undang-undang yang membatasi gerak nasionalisme pendidikan Indonesia akhirnya dihapus oleh pemerintah kolonial. Perjuangannya di bidang politik dan pendidikan inilah kemudian pemerintah Republik Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan RI, mengangkat

KHD sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1950). KHD mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada (1959). Pemerintah RI mengangkat KHD sebagai Pahlawan Nasional (1959). Meski perjuangannya belum selesai untuk mendidik putra bangsa, jelas KHD memelopori lahirnya pendidikan di Indonesia. KHD wafat pada 26 April 1959 dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta.

Guna memberikan rambu-rambu dalam artikel ini perlu disampaikan pokok pertanyaan yang mengarahkan alur penjelasan arikel. Mengapa gagasan politik KHD membuka jalan bagi pendidikan bangsa dan menyebarkan faham kebangsaan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia? Pokok pertanyaan ini yang akan memandu penjelasan tentang gagasan politik KHD bagi perpolitikan Indonesia terutama pada masa Pergerakan Nasional. Sekaligus artikel ini akan menemukan sesuatu yang baru berkaitan dengan peran KHD sebagai tokoh nasional bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. Munculnya Pemikiran Politik: Kemajuan dan Kesetaraan

Salah satu bagian penting politik kolonial yang dipertahankan di koloni adalah politik diskriminasi yang membedakan kedudukan dan peran antara penjajah dan terjajah. Diskriminasi itu dipertahankan untuk mendukung kedudukan dan peran sosial-politik kolonial yang menghegemoni semua bidang kehidupan kolonial (Ki Hajar Dewantara, 1952: 108-

104; Sartono Kartodirdjo, 1967). Pemerintah kolonial yang diidentifikasikan sebagai penguasa otomatis mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada orang bumiputera baik secara material dan spiritual. Hal-hal inilah yang mendukung perasaan superioritas sebagai penjajah, pemerintah kolonial berhak mengatur inferoritas bumiputra.

Yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah usaha KHD untuk mendapatkan sesuatu yang oleh pemerintah kolonial dipertahankan. Oleh karena itu pemikiran politik KHD dilakukan dengan multifaset, bukan hanya bidang politik melulu tetapi juga sosial dan kultural.

Diskriminasi menengarai perbedaan fisik dan kultural. Mereka merasa sebagai bangsa yang memiliki ras Arya yang mempunyai peradaban tinggi di Eropa dibawa sampai ke koloni. Sebagai ras yang hebat dan kuat mampu menaklukkan lautan luas dan menjajah serta menguasai bumiputera yang lebih rendah peradabannya. Orang-orang bumiputera yang berperadaban rendah harus diadabkan. Oleh karena itu, kolonialisme sering berkedok mengadabkan bangsa lain meski sebenarnya berisi pemerasan, pembedaan, dan penguasaan. Meski demikian bangsa Barat termasuk Belanda bersiteguh mengatakan perlawatannya ke dunia Timur merupakan *mission sacrée* alias tugas suci untuk mengadabkan bangsa-bangsa Timur termasuk Indonesia. Ada sekian banyak dalih untuk melegalkan tindakannya di dunia Timur, yaitu dengan menyebutnya *white man's burden*, yang tidak lain sepertinya itu semua merupakan tugas atau beban orang bule di dunia Timur (Sartono Kartodirdjo,

1967). Memang sangat luar biasa mengemas kepentingannya rapi dengan istilah yang memiliki rasa perikemanusiaan yang sangat tinggi. Namun, prakteknya di koloni jauh panggang dari api. Pemerintah kolonial dengan aparat kolonialnya berperilaku menyimpang dari cita-cita awal untuk mengadabkan bangsa Timur. Praktek-praktek diskriminasi, kekerasan, penekanan, kecurangan, korupsi dan sejenisnya sangat tidak mengenakkan perasaan orang bumiputra. Ketidakpuasan menyelimuti semua perasaan etnik-etnik di koloni yang menginginkan kehidupan setara antara penjajah dan terjajah baik sosial maupun politik (Suwardi Suryaningrat, 1918).

Dari latar belakang kehidupan sosial-politik inilah pikirannya jauh ke depan yaitu bagaimana caranya orang-orang bumiputra yang terpinggirkan ini mendapat kesempatan untuk mendapat kesetaraan secara sosial-politik dalam masyarakat kolonial. Memang secara tidak langsung di lingkungan Pakualaman sudah terbentuk *cultuur-milieu* berupa lingkungan kultur yang maju yang didukung oleh para elite Pakualaman (Shiraishi, 1991: 38, 56-58, 110).

Sebagai contoh adalah Pangeran Ario Notodirodjo, putra Paku Alam V, seorang elite terkemuka Ketua Budi Utomo (1911) yang juga melakukan pembaruan di lingkungan Pakualaman dan bisa disebut salah seorang pelopor pergerakan nasional Jawa. Juga RM Surjopranoto, putra GPH Suryaningrat dan kakak SS, mendirikan sekolah Adhi Dharmo. Dalam kariernya sebagai pemimpin bumiputra Suryopranoto sangat membela nasib buruh sehingga dikenal sebagai “Raja mogok”. Bagi buruh, mogok

adalah senjata utama untuk menuntut perbaikan sosial-politik, meski dia harus keluar-masuk penjara (Shiraishi, 1991: 220-224).

Secara umum lingkungan elite Pakualaman sudah membangun kemajuan untuk masyarakat lokal Jawa, mencari kesetaraan dalam masyarakat kolonial yang mempunyai kandungan unsur demokrasi dalam politik dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat kecil pada umumnya. Sebagai kelanjutan perjuangan keluarga Pakualaman adalah perjuangan di bidang pendidikan pada umumnya. Pendapat seorang sosiolog mengatakan bahwa pendidikan adalah dinamite yang dapat menghancurkan struktur masyarakat kolonial yang rigid. Disamping itu tentunya paska kemerdekaan, pendidikan tetap menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

C. Partisipasi dan Resistensi Terhadap Kolonialisme: Demokratisasi

Kepincangan dalam masyarakat kolonial adalah kuatnya diskriminasi sosial dan politik. Usaha mempertahankan diskiriminasi ini dimaksudkan agar terjaga kewibawaan kolonial dan membuat distansi dengan masyarakat pribumi tetap terjaga. Dengan kata lain, diskriminasi melanggengkan penjajahan. Itulah sebabnya pendekatan terhadap bumiputra merupakan hal tabu. Sistem kolonialisme Belanda yang menjauhkan antara penjajah dan terjajah tetap terpelihara sehingga mobilitas vertikal kaum pribumi tetap terkontrol. Komunikasi sosial

politik antara penjajah dan terjajah sangat renggang dan bahkan terjadi jurang yang dalam sehingga melanggengkan sistem pemerintahan tidak langsung, artinya masyarakat pribumi tetap diperintah penguasa tradisional, sehingga penguasa kolonial cukup menghubungi penguasa bumiputera dalam menjalankan pemerintahan kolonial.

Bagaimana cara pemerintah kolonial menjauhkan diri dari jangkauan masyarakat bumiputra antara lain dengan mengeluarkan RR 111 *(Regeerings Reglement)*, atau Peraturan Pemerintah Kolonial yang membatasi gerak politik masyarakat bumiputra. Jadi, sebenarnya pemerintah kolonial sudah menutup aktivitas politik terhadap pemerintah kolonial. RR 111 ini sudah terbit untuk mengantisipasi gerakan politik sehingga gerakan massa Jawa yang timbul kemudian dalam bentuk gerakan kultural sebagaimana kemudian dimanifestasikan dalam lahirnya organisasi Budi Utomo (BU) pada 20 Mei 1908.

Dari kacamata politik dapat dipandang lahirnya BU adalah terobosan terhadap RR 111. Para priyayi Jawa, dokter Wahidin Sudirohusodo, berkolaborasi dengan mahasiswa STOVIA, Sutomo dan kawan-kawannya, berhasil menghimpun diri dalam memajukan masyarakat Jawa pada waktu itu lewat pendidikan, sehingga pemerintah kolonial tidak dapat menindak gerakan BU, yang berbasiskan gerakan kultural. Selain itu, era lahirnya BU sejalan dengan politik kolonial etis yang memberi kesempatan pendidikan kepada masyarakat Jawa meski memiliki interes kolonial yang kapitalistis. Politik kolonial waktu itu dengan triasnya sebagai bagian dari humanisme yang terselubung oleh

kepentingan kapitalisme, artinya meski kemudahan etisisme tetapi yang diharapkan adalah keuntungan kolonial yang lebih banyak lagi.

Partisipasi dan resistensi yang dilakukan oleh SS cukup panjang dalam perjuangan politik. Pengalaman awal dalam politik ketika ketika SS menjadi aktivis dan seksi propaganda BU. Dalam kongres BU (1908), SS mengorganisasikan kongres itu. EFE Douwes Dekker (DD) alias Setyabudi Danudirja mendirikan *Indische Partij* (IP) di Bandung pada 25 Desember 1912. SS dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo bergabung di dalamnya. Mengapa terjadi kolaborasi Indo dan bumiputra tidak lain ingin membangun kekuatan besar untuk menghadapi pemerintah kolonial. Kaum Indo yang tersisih dari pergaulan totok harus membangun solidaritas campuran Indo dan Bumiputra yang juga terhegemoni oleh pemerintah kolonial. Oleh karena itu, dalam IP berkolaborasi DD, SS, dan Tjipto Mangoenkoesoemo yang dikenal "Tiga Serangkai" merupakan kekuatan nasionalis awal pergerakan (Koch, 1951: 37-55).

Dalam IP, kolaborasi bersama DD, SS dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo makin radikal. Kombinasi Indo dan bumiputra, menjadi kekuatan yang mampu menghadapi pemerintah kolonial. Tiga orang tokoh IPmempunyai pengalaman terpinggirkan dalam masyarakat kolonial. DD adalah Indo yang tersingkir karena inferioritasnya dibanding dengan totok yang lebih terampil, SS memang berjiwa kerakyatan nasionalis Jawa yang sedang tumbuh, Tjipto Mangoenkoesoemo adalah tokoh yang kritis terhadap diskriminasi kolonial. IP menanamkan

benih nasionalisme awal dengan pernayataannya *"Indiö voor die Indiörs",* atau "Hindia untuk orang-orang Hindia" dalam arti mengakui Hindia sebagai tanah airnya yang merupakan prinsip utama nasionalisme (Koch, 1951: 39).

Untuk selanjutnya dari pengertian yang nasionalistis ini berarti orang totok dan pemerintah kolonial harus meninggalkan Hindia alias dilawan. Dalam Anggaran Dasar IP disebutkan bahwa tujuan IP untuk membangun patriotisme bangsa Hindia, yaitu kepada tanah air yang telah memberi kehidupan, dan menganjurkan kerjasama berdasarkan persamaan sistem pemerintahan guna memajukan tanah air Hindia dan mempersiapkan kehidupan masyarakat merdeka". IP menjadi model partai politik yang menerima keberagaman etnik di Indonesia guna menggalang persatuan dan semangat kebangsaan. Paham kebangsaan ini setelah melalui perjalanan panjang diolah dan dimodifikasi oleh Perhimpunan Indonesia (1924) dan Partai Nasional Indonesia (1927) (Abdurrachman Surjomihardjo, 1979).

Sementara itu "Tiga Serangkai" mendirikan Komite Bumiputera pada Juli/Agustus 1913, tetapi yang memainkan peran penting dalam komite itu SS. SS menulis karangannya monumental dalam sejarah pemikiran politik Indonesia berjudul *"Als ik een Nederlander was..." (Seandainya aku seorang Belanda)* yang mengritik pemerintah kolonial yang akan menyelenggarakan pesta 100 tahun Nederland lepas dari penjajahan Prancis. Hanya saja biaya pesta itu dibebankan pada masyarakat bumiputra dengan mengumpulkan dana dari saku

orang bumiputra dan menarik berbagai pajak. Karangan itu segera meluas ke masyarakat karena diterjemahkan oleh Abdoel Moeis ke dalam bahasa "Melayu". Untuk menyingkirkan tiga tokoh berbahaya itu bagi *rust en orde* harus dikenakan *exorbitante rechten* dan cepat-cepat tiga tokoh berbahaya itu ditangkap pada 18 Agustus dan harus meninggalkan Tanjung Periuk pada 6 September 1913 dengan tujuan Nederland.

Karangan SS itu dijawab oleh seorang Belanda kolonial yang ditulis oleh H. Mulder, redaktur harian *Preanger Bode* berjudul *"Als ik eens Inlander was*..." (Sekiranya saya seorang anak negeri...) tentu isinya memuakkan dan sangat menghina martabat bumiputra. Tanggal 6 Sptember 1913 itu sebagai hari keberangkatan "Tiga Serangkai" itu disebut sebagai "Hari Raya Kebangsaan" (Koch, 1951 53-54). Di Parlemen Nederland, "Tiga Serangkai" itu dibela oleh *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (S.D.A.P), partai buruh, agar pemerintah kerajaan Belanda mencabut pembuangan tiga tokoh itu, meski gagal.

IP berumur pendek karena radikalismenya dan menyerang pemerintah kolonial sehingga IP dilarang pemerintah kolonial. Pengaruh radikalisme IP, terutama DD diakui Gubernur Jenderal Idenburg bahwa semangat antikolonial sudah menyebar ke tokoh-tokoh Sarekat Islam. Oleh karena itu, pemerintah kolonial harus menindaknya. Dapat dikatan IP berumur pendek namun bagaikan "sebuah tornado yang melanda Jawa". IP dibubarkan dan "Tiga Serangkai" dibuang, tetapi organisasi itu diteruskan pengganti-penggantinya dengan nama *Insulinde*, organisasi yang anggotanya heterogin, yang kurang mendapat respon

masyarakat dan pada 1919 ganti nama lagi menjadi *Nationaal Indische Partij* (NIP). Karena orang-orang Indo merasa lebih superior dibanding bumiputra maka perpecahan antar mereka makin dalam dan orang-orang Indo bergabung dalam *Indo Europeesch Verbond* (EIV) pada 1919 yang ingin dekat dengan pemerintah kolonial (Suhartono, 1994: 42).

Ketika di Bandung, SS menjadi ketua SI lokal. Apa yang dilakukan SS tentu memperjuangkan anggota SI mendapatkan persamaan dan antidiskriminasi dalam masyarakat kolonial baik sosial, ekonomi dan politik. Gerakan-gerakan radikal dilakukan diperoleh dari pengalamannya mengawal SI dan memimpin lokal Bandung.

Terhadap "Tiga Serangkai", pemerintah kolonial menjawab dengan membuangnya meski yang pertama masih ada di lingkungan Hindia Belanda tetapi kemudian mereka minta agar dibuang ke Nederland. Tjipto hanya setahun di Nederland karena sakit, DD kembali 1918 dan KHD kembali ke Indonesia pada 1919 setelah mengalami pembuangan enam tahun di negeri Kincir Angin itu.

Dampak langsung IP khususnya terhadap KHD adalah pengalaman politik yang telah diperjuangkannya meski menghadapi berbagai kendala politik sampai dengan pembuangannya. Namun, hikmahnya KHD makin matang dalam perjuangan politik menghadapi pemerintah kolonial. Secara umum tentunya IP memberi inspirasi semangat dan pendewasaan nasionalisme, cinta tanah air dan perjuangan kemerdekaan.

D. Aksi, Aliansi dan Nonkooperasi: Nasionalisme dan Demokrasi

Suatu gerakan politik sebagaimana dilakukan KHD tidak mungkin hanya ada dalam pikiran perjuangannya saja tetapi harus membuat kombinasi ke arah realitas sebuah gerakan yang nyata dalam melakukan resistensi terhadap pemerintah kolonial. Aksi-aksinya adalah tindakan atas reaksi pemerintah kolonial yang melakukan diskriminasi, represi, hegemoni sosial dan politik sehingga merendahkan martabat sebagai etnik-etnik yang berkarakter. Pendegradasian martabat melunturkan identitas sehingga terjadi kehilangan karakter. Superioritas kolonial sangat mengganggu eksistensi kultur dan masyarakat Jawa karena tekanan-tekanan sosial-politik yang berakibat pada inferioritas yang kompleks. Ketidakpercayaan diri yang dibangun pemerintah kolonial ini harus dikembalikan sehingga bangsa ini berani masuk dalam masyarakat kolonial dan berkompetisi dengan mereka (Ki Hadjar Dewantara, 1952).

Namun, sekali lagi setiap aksi harus memperhitungkan kekuatan diri dan kekuatan lawan. Merujuk teori sejarawan Inggris, A.J. Toynbee "Teori Tantangan dan Jawaban" sangat cocok bila diterapkan pada aksi-aksi melawan kolonialisme Belanda. Jika kekuatan lawan cukup kuat diperlukan aliansi sesama kekuatan politik bumiputra untuk menghadapi kuasa kolonial. Artinya tantangan kolonial harus dijawab dengan kekuatan yang seimbang.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa DD berusaha membangun IP beraliansi dengan KHD dan Tjipto. Perkumpulan

campuran ini anggotanya berjumlah 7.300 orang, hanya ada 1.500 orang Indonesia, sedang anggota Indo berjumlah 5.800 orang (Koch, 1951: 55). Kuasa kolonial lewat bangunan organisasi moderen harus dihadapi lewat bangunan moderen juga, meski hasilnya tokh belum memuaskan. Akan tetapi aksi-aksi IP telah memberikan inspirasi organisasi politik berikutnya di Indonesia makin solid dalam menghadapi pemerintah kolonial.

Diskriminasi, hegemoni, represi, superioritas dan sejenisnya adalah identitas kolonial yang tidak ingin disentuh dan memang dibuat jarak dengan bumiputra. Melihat keadaan sedemikian ini jelas sukar dilakukan deal sosial-politik karena pada dasarnya sistem politik kolonial yang *gierig* atau pelit dan sulit didekati karena adanya *cultural gap* yang dipertahankan. Sulitya dilakukan pendekatan maka KHD mengambil model nonkoopersi dalam menghadapi pemerintah kolonial. Artinya KHD melakukan perjuangan politik di luar pemerintahan kolonial. Dengan perjuangan cara nonkooperasi ini KHD memlilih mendirikan Sekolah Taman Siswa yang berjiwa ketimuran meski organisasinya mengikuti model Barat. Sekolah ini tentu akan merekrut elite yang sudah dibekali dengan jiwa ketimuran yang *vis ā vis* dengan pemerintah kolonial. Sikap politik nonkooperasi ini akan dibuktikan oleh KHD dalam mengahadapi Undang-undang Sekolah Liar, 1932. Undang-undang itu melarang sekolah bumiputra hidup karena sebagai persemaian nasionalis Indonesia. Pertumbuhan sekolah swasta di Jawa dan Sumatera Barat sangat luar biasa 1920-1931-an. Kurikulumnya tidak seragam dan itulah mengapa pemerintah

menyebut “sekolah liar”. Selain itu, guru-guru diharuskan mendapat izin jika akan mengajar atau bersertifikasi lebih dulu. Pemerintah kolonial khawatir terhadap berkembangnya sekolah swasta di Indonesia.

Pada 1 Oktober 1932 KHD mengumumkan tantangannya terhadap ordonansi itu lewat telegram kepada Gubernur Jenderal de Jonge bahwa KHD akan mengorganisasikan perlawanan pasif. Pada 3 Oktober dikeluarkan manifesto yang menganjurkan perlawanan. Partindo, PNI, Pasundan, PPPKI, BU, dan Muhammadiyah mendukung perlawanan terhadap ordonansi itu, jadi dukungan terhadap perlawanan KHD makin kuat. Pembatasan apapun terhadap sekolah-sekolah membawa konsekuensi jangka panjang yang sangat berat dan menggoyahkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada akhir Februari 1933 de Jonge menetapkan penghentian pelaksanaan ordonansi itu. Berkat perjuangan Taman Siswa, undang-undang itu akhirnya dicabut dan dampaknya menyatukan semangat organisasi politik untuk terus memperjuangkan kebebasan (Ingleson, 1988: 226-230).

Kekhawatiran pemerintah kolonial adalah perluasan nasionalisme. Meski masih dalam lingkup lokal, organisasi BU dipandang oleh orang-orang Belanda yang berpikiran maju sebagai *oosterse renaissance*, atau renaissanse (kelahiran kembali) di timur dengan sebutan “Si Molek telah bangun”. Namun, di pihak lain ada pandangan orang-orang Belanda konservatif yang menyebut lahirnya BU dengan istilah cukup sinis, yang menurutnya, “Orang Jawa banyak cingcong”.

Meski tergambar BU memperjuangkan priyayi, tetapi sebagai gerakan patriotisme lokal BU mempunyai nilai sangat penting karena kepeloporannya sebagai organisasi moderen (Nagazumi, 1986). Memang untuk menghadapi pemerintah kolonial harus dibangun organisasi moderen yang mempunyai pemimpin, massa dan orientasi organisasi yang jelas, yaitu nasionalisme dan kemerdekaan meski masih pada tingkat lokal. Hanya lewat organisasi moderen kolonialisme dapat dilengserkan.

Di pihak lain adalah perkembangan unsur demokrasi yang berhadapan dengan unsur feodal yang masih dominan dan dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial. Sejak datangnya orang-orang Belanda pertama kali di nusantara terjadi kolusi antara kolonialisme dan dan feodalisme. Interes kolonialisme adalah melanggengkan eksploitasi terhadap bumiputra, sedangkan feodalisme yang sudah lama melakukan eksploitasi secara tradisional dipandang mempunyai akar kuat untuk diajak berkolaborasi mengeksploitasi masyarakat pribumi. Istilah mutakhir kolaborasi yang merugikan kelompok lain dan dipandang sebagai suatu yang negatif adalah kolusi.

Dalam hal kolonialisme dan feodalisme di satu pihak dan demokrasi di pihak lain terdapat prinsip berbeda. Kolonialisme dan feodalisme dalam pengertian *"hand in hand"* alias bekerja sama yang menekankan hirarki dan otokrasi, sedangkan demokrasi menekankan kebersamaan yang bersifat populis. Kecenderungan terakhir kehidupan demokrasi menjadi tujuan utama karena membela kepentingan wong cilik yang selama ini belum pernah terangkat derajat dan martabatnya. Namun

demikian, demokrasi juga mempunyai kandungan negatif meski dalam skala kecil. Tirani demokrasi juga menghantui kehidupan demokrasi secara keseluruhan jika pengelolaan demokrasi tidak hati-hati. Yang pasti demokrasi lebih banyak menguntungkan publik dari pada yang hanya menguntungkan kelompok oligarki.

Demokrasi dan nasionalisme mempunyai hubungan kuat dalam pengertian kepentingan bersama yang mencakup seluruh bangsa. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat (*demos* dan *kratein:* B. Lt.) dan nasionalisme merujuk pada kepentingan untuk bangsa (*natie*: b. Bld), Jadi, rakyat dan bangsa mempunyai cakupan arti, yaitu masyarakat kolektiflah yang harus diperjuangkan. Merujuk pada pakar nasionalisme Prancis, Ernest Renan yang menanyakan "Apa bangsa Itu"? *(Qu'est ce qu'une nation?).* Yang dijawabnya "Bangsa adalah keinginan untuk hidup atau ada bersama" (*Nation est le désire de vivre/d'ĕtre ensemble).* Jelas kepentingan bersama yang harus diperjuangkan sebagaimana keinginan KHD maupun pemimpin perjuangan politik Indonesia. Bung Karno sendiri mengakui bahwa nasionalisme harus dibangun lewat keinginan dan kebersamaan (Smith, 1983: 174).

E. Kelanjutan Resistensi : Budaya Politik

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dilakukannya dalam berbagai dimensi, meski lahirnya dimensi-dimensi itu tidak secara simultan tetapi dimensi yang dimunculkan kaum pergerakan sejalan dengan tantangan yang timbul waktu itu.Mengapa BU melakuan terobosan

kultural karena pemerintah kolonial secara politis sudah pasang kuda-kuda dengan mengeluarkan RR 111 (Koch, 1951: 52). Jadi, kaum pergerakan ternyata sangat fleksibel mencari jalan kehidupan pergerakan, meski pada awal gerakannya adalah gerakan emansipasi atau persamaan derajat dalam masyarakat kolonial antara orang-orang Belanda dengan bumiputra. Demikian pula, selanjutnya IP mengubah gerakannya menjadi gerakan politik yang nasionalistis dengan mengakui Hindia (baca Indonesia sebagai tanah airnya). Gerakan selanjutnya berdimensi politik sebagaimana diperjuangkan Sarekat Islam yang menentang diskriminasi ekonomi dengan menyangkutkan kekuatan bumiputra berdasar azas Islam. Gerakan-gerakan dan perjuangan yang multidimensi ini lahir bukan merupakan suatu yang *taken for granted* tetapi melalui tantangan-tantangan kolonial yang diekspose dan jawaban kaum pergerakan yang vleksibel.

Variasi gerakan gerakan yang multidimensi ini dilanjutkan oleh organisasi-organisasi politik yang berdiri kemudian dari yang moderat sampai yang radikal. Pada desenia kedua (1908-1920) corak gerakan masih variatif moderat-radikal yang mencari model yang tepat dalam menghadapi pemerintah kolonial. Pada desenia ketiga (1920-1930) melahirkan gerakan radikal seperti pemogokan, pemberontakan petani, pemberontakan Partai Komunis 1926, pembuangan tokoh-tokoh PNI, dan desenia keempat (1930-1942) bercorak hibrid antara gerakan politik kooperatif dan nonkooperatif yang bergerak pada momen-momen tertentu yang sangat insidental. Pada

periode ini, gerakan politik sangat moderat karena tokoh-tokoh nonkooperasi dibuang oleh pemerintah kolonial, sedangkan tokoh-tokoh kooperasi lebih mendekati pemerintah kolonial dan dengan caranya sendiri bergerak untuk mendapatkan kekuatan di *Volksraad* (Dewan Rakyat). Oleh karena itu, aksi "Indonesia Berparlemen", 1936, yang dituntut oleh Petisi Sutardjo adalah jalan moderat. Di samping itu masih terjadi gerakan radikal sebagaimana yang diusung oleh Perguruan Taman Siswa yang memperjuangkan dihapuskannya Undang-undang Sekolah Liar, 1932 (Ingleson, 1988:226-230).

Tidak dapat dilupakan gerakan-gerakan sosial keagamaan yang lahir di Indonesia memperkaya gerakan politik pada umumnya. Aksi-sosial keagamaan memperkaya dan memberikan kontribusi pada gerakan politik. Modernisme dan reformisme dari pusat-pusat gerakan Islam seperti Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir dan pusat-pusat yang lain seperti Kadian dan Lahore di India. Modernisme menginginkan pembaruan dari perilaku tradisional sedangkan reformisme berusaha memurnikan ajaran Islam keluar dari bid'ah. Ujung-ujung dari gerakan ini mengalir dan bernuansa nasionalisme Islam sebagaimana direprentasikan dalam organisasi Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926), Ahmadiyah (1929), Al Irsyad (1914) dan Partai Arab Indonesia (1934).Masih ada geraskan sosial-politik yang lain dalam bentuk organisasi yang lokal seperti Thawalib, Perti, Persis, dan masih banyak lagi (Suhartono, 1994: 43-51).

Islam dan kebangsaan dimunculkan dalam Partai Serikat Islam Indonesia. Islam dan kebangsaan merupakan dua kunci

menghadapi politik kolonial desenia ketiga waktu itu karena awal desenia itu GJ de Jonge yang sangat reaksioner itu menekan keras gerakan nasionalis dengan memenjarakan dan membuang tokoh-tokoh PNI pada 1929 (Ingleson, 1988).

F. Radikalisasi dan Integrasi Nasional: Landasan Kultural Baru

Radikalisasi adalah bentuk dan perilaku perjuangan keras atau radikal dan sering kali fisikal menghadapi kolonialisme sebagai lawan perikalu lunak. Perubahan ke arah radikalisasi sudah kelihatan ketika dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang dapat julukan "demokrat sejati" itu gagal menyakinkan kongres BU agar terlibat dalam politik (Nagazumi, 1988). Dia mewakili golongan muda dalam kongres itu minta agar BU mengubah diri dengan berjuang di bidang politik dan keluar dari orientasi kultural. Tentu orientasi politik lebih radikal dibanding kultural lewat gerakan-gerakan politiknya menghadapi penjajah. Oleh karena itu, setelah keluar dari BU, dia bergabung dengan DD dan SS mendirikan IP (1912). Sudah disebut di muka bahwa meski IP gagal mendapatkan izin sebagai badan hukum *(rechtspersoon)* dan hidupnya pendek tetapi jiwa dan semangat radikalisme mengilhami partai politik selanjutnya.

IP mengklasifikasi pengertian nasionalisme berdasarkan ras dan kemutlakan domisili yang dibaginya berdasarkan ras yang dirasakan beda adalah Indo, keturunan campuran dan totok, asli atau *voel bloed* dan di pihak lain dibedakannya antara yang *blijvers,* yang sudah lama tinggal di Hindia Belanda dan

trekkers alias mondar-mandir Nederland-Hindia Belanda. Namun hukum kolonial dengan kuat mengkalisifikasinya kalau *inlander* (bumiputera) yang sudah menetap adalah golonggan sosial terbawah, dan orang-orang Belanda ditempatkan pada golongan atas, meski di tengahnya ada golongan timur asing.

Gagasan dan realitas nasionalisme yang radikal sudah dimulai di Indonesia sebagaimana disebut di atas yang dipelopori "Tiga Serangkai". Setelah ketiganya "dibuang ke Nederland semangat nasionalisme radikal itu berkembang dan berkolaborasi dengan *Indonesische Vereeniging* (IV) atau Perhimpunan Indonesia (PI). PI adalah perkumpulan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Nederland yang mempunyai gagasan kuat terhadap nasionalisme Indonesia. Jadi, gagasan nasionalisme Indonesia makin kuat dan terealisasikan setelah terjadi kolaborasi tokoh pendatang mantan PI. Pada awal dasawarsa ketiga pernyataan nasionalisme Indonesia semakin menguat di Indonesia. Pidato Moh, Hatta di dalam Konferensi LigaAntiimperialisme di Brussel pada 1927 membuktikan betapa kuatnya semangat melawan penjajah. Pada 1927 Moh. Hatta membela anggota-anggota PI yang ditangkap polisi Belanda dan membebaskannya dengan pembelaan berjudul *"Indonesia Vrij"* atau Indonesia Merdeka (Suhartono 1994: 63). Sekembalinya tamatan universitas di Nederland bergabung dengan aktivis nasionalis di Indonesia sehingga nasionalisme makin menggumpal. Berdirinya dua studi club dan berdirinya PBI dan PNI memberi bukti tersalurkannya gagasan nasionalisme makin mengristal. Pidato Soekarno di Pengadilan Negeri Bandung yang terkenal dan

berjudul “Indonesia Menggugat” (1929) membuktikan betapa kuatnya perasan dan sikap antikolonialisme dan imperialisme seperti yang disampaikan pembelaan Soekarno di pengadilan itu (Suhartono, 1994: 148).

Paradigma dan konsensus kebangsaan makin nyata setelah terjadinya kolaborasi para mantan anggota PI dari Nederland dan dua anngota studi club di Indonesia. Mereka terus menyuarakan gerakan-gerakan antikolonialisme dan imperialisme dengan cara yang berbeda meski cara nonkooperasi dan kooperasi itu bermuara pada titik temu, yaitu kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi konsensus dan gagasan kebangsaan itu makin berkembang dan di sisi lain juga makin kuat represi pemerintah kolonial dengan *hardzaai artikelen* (pasal karet) yang ujung-ujungnya pembuangan *(interneering dan verbanning)* para nasionalis penentang pemerintah kolonial.

Pada desenia ini kesadaran berbangsa sudah membulat bukan saja kesadaran politik tetapi secara simultan merengkuh kesadaran kultural juga makin menemani gerakan yang mutidimensional. Dua peristiwa perlawanan kultural terhadap pemerintah kolonial diwujudkan dalam bentuk Lahirnya Sekolah Taman Siswa (1922) yang akan merekrut elite Indonesia baru mampu menandingi ideologi kolonial. KHD sangat yakin bahwa pemerintah kolonial hanya dapat dikalahkan lewat rekrutmen elite moderen yang paradigmatis, yaitu kehidukan demokratis dalam arti bahwa pemerintah kolonial harus hilang dari bumi nusantara. Peristiwa kultural kedua adalah berlangsungnya Kongres Pemuda I (1926) dan Kongres pemuda II (28 Oktober

1928) merupakan pijakan kutural untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang pada dasarnya merupakan kesadaran politik bangsa Indonesia berupa pengakuan atas satu nusa, bangsa, dan bahasa Indonesia (Foulcher, 2000). Dilihat dari perkembangan integrasi bangsa maka jelas bahwa Sumpah Pemuda merupakan integrasi bangsa yang makin terealisasikan dan sebagai modal kuat bagi terciptanya Indonesia Merdeka. Berbagai pengakuan dalam Sumpah Pemuda merupakan akumulasi kesadaran nasional *(national consciousness*) akan adanya kesatuan dan persatuan dengan istilah atau kata "satu" yang dijadikan ikatan kuat bagi berbagai etnik, budaya dan bahasa. Hal ini tidak dapat diingkari bahwa sumpah itulah yang akan mengalir dalam realisasi yang masih terbayang (Anderson, 1991).

G. Menjadi Makin Lengkap

Setelah melalui jalan panjang, yaitu perjalanan sosial-politik pergerakan nasional selama tiga dasawarsa termasuk kiprahnya KHD dalam TS menguatkan integrasi nasional, yaitu makin kuatnya kesadaran nasional membanun nasionalisme riil dengan ikrar pemuda Indonesia untuk merealisasikan Indonesia Merdeka. Nasionalisme lokal yaitu nasionalisme jawa terlalu sempit geraknya dan hanya berjuang lewat budaya yang seolah tidak punya kekuatan memaksa. Namun, dari loko-sentrisme kejawaan berkembang ke nasionalisme religio-ekonomi yang dibanguan SI. Kekuatan nasionalisme makin nyata dengan pernyataan IP yang tegas mengakui tanah airnya Hindia, mengawali gerakan politik. Pasang surut organisasi lanjutan pada

dasawarsa kedua dan ketiga dengan unsur-unsur sosio-politik diulang kembali menjadi lebih rasional dan radikal.

Dapat ditambahkan bahwa Sumpah Pemuda merupakan produk kaum inteligensia Indonesia yang menjadi aktor intelektualis “drama nasionalisme Indonesia”. Mereka pencipta identitas nasional yang membangkitkan ekspresi kolektif guna merealisasikan solidaritas nasional. Ikrar itu merupakan pernyataan kepemilikan wilayah *(territory)*, bangsa *(social majorities)* yang merupakan massa dan bahasa *(language)* menjadi pengikatnya dan alat komunikasi yang homogin (Smith, 1983). Lagi pula dengan dikumandangkannya Indonesia Raya ciptaan WR Supratman, meski hanya notenya pada 28 Oktober 1928 itu, sebagai lagu kebangsaan makin lengkaplah dan makin dekatlah cita-cita kemerdekaan. Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan di kemudian hari menyemarakkan hiruk-pikuknya nasionalisme Indonesia itu dan menjadi makin lengkaplah nilai persatuan dan kebangsaan.

Rumusan SP adalah bentuk dari identitas nasional yang menjadi simbol persatuan dalam menggalang kekuatan untuk menghadapi ideologi kolonial *(colonial ideology)*. Jelas SP merupakan simbol kekuatan tandingan dalam melawan kolonialisme Belanda. Fase ini adalah fase konseptualisasi politik dan kaum pergerakan tinggal melanjutkan serta menambah daya juang dan solidaritas nasionalnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesempatan internasional yang sedang dicarinya dimana kaum nasionalis dapat memanfaatkan politik internasional untuk menentukan posisinya sebagai negara merdeka.

Sekiranya tidak terjadi Perang Dunia II dan terjadi perubahan politik internasional yang mengaitkan hubungan kolonialisme antara Belanda dan Indonesia niscaya Indonesia Merdeka dapat diraihnya. Dengan persiapan ideologi kemerdekaan yang sudah berproses lama dan diperkuat kecepatan para nasionalis dalam mengambil putusan untuk meraih kemerdekaan maka cita-cita yang sudah dirintis lama itu akhirnya terwujud dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Semboyan dan ungkapan "Tanah Hindia lepas dari Nederland" dan juga "Indonesia Merdeka, Sekarang" menjadi sangat populer di kalangan nasionalis. Sudah pasti ini merupakan ekspresi kolektif yang tidak dapat ditahan-tahan lagi. Waktunya telah tiba untuk mengaktualisasikan tuntutan kemerdekaan. Para nasionalis sangat optimis bahwa tuntuan kemerdekaan akan terealisasikan, tentunya menunggu perkembangan dan perubahan politik internasional, bahwa dari segi kemanusiaan penjajahan di atas bumi harus dihapus karena tidak sesuai dengan harkat hidup dan kemanusiaan orang banyak.

H. Sekolah Taman Siswa : Resistensi Kultural Terhadap Kolonialisme

Mengapa SS atau KHD mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922? Menurut KHD, pendidikan adalah alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat. Dari pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya

memperoleh pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Jiwa populis KHD sudah mendasarinya untuk menyatu dengan rakyat, sehingga meski beliau keturunan bangsawan yang pada waktu itu terdapat jurang yang lebar dengan kehidupan *wong cilik*, tetapi beliau berusaha menutup celah itu. Sebuah kehidupan yang demokratis yang bisa dinikmati rakyat banyak (Abdurrachman Surjomihardjo, 1979: 98-194).

Gagasan mendirikan sekolah atau pendidikan berasal dari sarasehan (diskusi) tiap hari Selasa-Kliwon. Peserta diskusi sangat prihatin (menderita batin) terhadap keadaan pendidikan kolonial. Sistem pendidikan kolonial yang materialistik, individualistik, dan intelektualistik diperlukan lawan tanding, yaitu pendidikan yang humanis dan populis, yang *memayu hayuning bawana* (memelihara kedamaian dunia).

Lalu bagaimana cara KHD merealisasikan cita-citanya? Tentu metode pengajaran kolonial yang harus diubah, yaitu dari sistem pendidikan “perintah dan sanksi (hukuman)” ke pendidikan *pamong*. Pendidikan kolonial didasarkan pada diskriminasi rasial yang di dalamnya sudah terdapat pemahaman kepada anak-anak bumiputra yang menderita inferioritas. Kondisi seperti ini harus diubah dari pendidikan model ”perintah dan sanksi”, meski pemerintah kolonial sendiri menggunakan istilah santun “mengadabkan “ bumiputra tetapi dalam praktek cara-cara kolonial yang tidak manusiawi tetap berjalan.

Untuk merealisasikan gagasan itu KHD membuat wadah yang waktu itu disebut *“Nationaal Onderwijs Taman Siswa”,*

sebuah wadah pendidikan nasional, sebuah gagasan yang sudah mencakup seluruh bangsa Indonesia *(nation wide).* Sungguh sangat luar biasa bahwa pendidikan harus menyeluruh ke anak bumiputra alias bangsa Indonesia yang dalam istilah politik disebut nasional.

Menurut KHD pendidikan yang mengena kepada bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Tiga hal inilah dasar jiwa KHD untuk mendidik bangsa dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan. Pengalaman yang diperoleh dalam mendalami pendidikan yang humanis ini dengan menggabungkan model sekolah Maria Montessori (Italia) dan Rabindranath Tagore (India). Menurut KHD dua sistem pendidikan yang dilakukan dua tokoh pendidik ini sangat cocok untuk sistem pendidikan bumiputra. Lalu dari mengadaptasi dua sistim pendidikan itu KHD menemukan istilah yang harus dipatuhi dan menjadi karakter, yaitu *Patrap Guru*, atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat (Ki Hadjar Dewantara, 1952: 107-115).

Perilaku guru dalam mendidik murid atau anak bangsa menjadi pegangan dan modal utama sehingga KHD menciptakan istilah yang kemudian sangat terkenal, yaitu:

* *Ing ngarsa sung tulada* (di muka memberi contoh),
* *Ing madya mangun karsa* (di tengah membangun cita-cita),
* *Tut wuri handayani* (mengikuti dan mendukungnya) (Haidar Musyafa, 2015).

Perilaku guru TS ini diterapkan di semua jenjang Pendidikan TS: Taman Indria (Taman Kanak-kanak), Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP), Taman Madya (SMA), dan Taman Guru (Sarjana Wiyata). Patrap guru yang meliputi semua jenjang pendidikan TS merupakan manifestasi resistensi kultural karena berpusat pada sikap yang berlawanan (antitesis) dengan sikap guru dalam pendidikan kolonial. *"Tut wuri handayani"* dijadikan motto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Perkembangan sekolah TS 1922-1930 cukup menggembirakan dalam merespon represi pemerintah kolonial. Selama delapan tahun sejak 1922 terjadi perkembangan sekolah TS di nusantara, dari Aceh sampai Indonesia Timur berdiri 30 cabang dan Pusat Persatuan Pengurus TS tetap di Yogyakarta. TS tetap memegang Azas TS (1922) dan Dasar TS (1947) yang sebenarnya saling berhubungan dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Ki Mangun Sarkara meneruskan cita-cuta dan mengaplikasikan gagasan pendidikan TS. Hanya saja Pendidikan TS tidak seperti jaman kolonial, sekarang TS harus membiayai dana pendidikan sendiri dan orientasi masyarakat sudah berubah karena dana belajar dari masyarakat yang makin berkurang. Namun demikian, TS masih merupakan motor dan jiwa penggerak sekolah swasta di Indonesia dengan swadaya, swausaha, dan swakelola. Semangat kebangsaan, semangat kerakyatan dan keluhuran pekerti sebagai pegangan budaya Timur tetap terpancarkan dari TS.

I. Perluasan Perguruan Taman Siswa dan Pernyataan Azas TS 1922

Berdirinya Perguruan TS bukan sebagai institusi tanpa memiliki azas yang bermakna bagi ciri khas bangsa Timur yang membedakan dengan bangsa Barat, lebih-lebih lagi mengenai filsafat dan pemikiran ketimuran. Azas TS memuat perdebatan internal dalam kongres BU dan juga perdebatan sesama pemimpinnya. Hasil perdebatan itu memperkuat pernyataan azas TS (Abdurrachman Surjomihardjo, 1979: 99-100) yang berisi tujuh pasal:

Pasal 1 dan 2 tentang dasar kemerdekaan setiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Ini dimaksudkan agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam tertib bersama. Pasal 1 termasuk kodrat alam dan kemajuan berjalan kodrati alias evolusi. Dasar ini yang mewujudkan sistem *"among"*, artinya guru-guru meski di belakang tetapi mempengaruhi dan memberi jalan kepada anak didik untuk berjalan sendiri. Inilah yang kemudian terkenal dengan istilah *"Tut wuri handayani"*. Selain itu, guru bisa memotivasi dan menginovasi pikiran murid dan sekaligus memberi contoh.

Pasal 3 mencakup kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Penyesuaian diri dan hidup kebarat-baratan menimbulkan berbagai kekacauan. Pendidikan Barat mementingkan kecerdasan dan melanggar dasar-dasar kodrati dari kebudayaan sendiri, sehingga tidak menjamin keserasian dan dapat memberi kepuasan. Inilah yang disebut dasar Kebudayaan.

Pasal 4 berisi dasar kerakyatan, bahwa pengajaran harus

diperluas dan tidak hanya sekelompok kecil masyarakat.

Pasal 5 merupakan azas sangat penting bagi semua orang yang ingin mngejar kemerdekaan hidup. Azas ini mendasari kemandirian.

Pasal 6 berisi syarat-syarat mengejar kemerdekaan dengan sistem mandiri.

Pasal 7 mengharuskan keikhlasan lahir batin bagi guru-guru untuk mendekati anak didik.

Tujuh pasal ini bisa disebut sebagai "manifes yang penting" dan abadi. Pemimpin TS yang lain, Sarmidi Mangunsarkoro, menyebut pernyataan azas itu sebagai "lanjutan dari cita-cita SS yang terhimpun dalam kelompok rohani *Nationale Indische Partij* (1919-1921) yang merupakan gerakan kebatinan dan kebebasan".

J. Kesimpulan

Gagasan KHD dalam politik adalah suatu jalan yang harus ditempuh dalam mendapatkan sesuatu di masyarakat kolonial karena pemerintah kolonial dengan represinya selalu menekan hak-hak kaum bumiputra. Menurut dia tentu saja hak-hak itu harus diambil kembali (baca direbut) lewat kombinasi gerakan evolusioner-revolusioner, dari gerakan kultural, ekonomi, danpolitik. Perjuangan-perjuangan itu selalu terjadi kombinasi berbagai aspek dan sangat tergantung kekuatan juang mana yang diperlukan dalam mengahadapi pemerintah kolonial. Selain itu betapa kuat dan konsistennya KHD dalam memperjuangkan kepentingan yang populis dan demokratis "sama rata sama rasa".

Tak kalah pentingnya adalah dorongan semangat kebangsaan atau nasionalisme guna meningkatkan martabat bangsa melalui pendidikan (Ki Sugeng Subagyo, 2016).

Gagasan politik KHD diikuti oleh organisaisi sosio-politik di tanah air dan model perjuangannya dianggap akurat dalam memperoleh kemerdekaan bangsa dari penjajah Belanda. Secara politis menurut KHD, lembaga kolonial itu harus mendapat resistensi dengan mendirikan lembaga atau institusi bumiputra yang kuat dan setingkat dengan lembaga kolonial sehingga mampu bersaing dan berkekuatan untuk menekan pemerintah kolonial. Lembaga tandingan *(counter-institution)* inilah yang diimitasi organisasi sosio-politik di tanah air dan ternyata berhasil menumbangkan pemerintah kolonial (Tsuchiya, 1986:188-206). Ujung-ujung dari lembaga tandingan inilah yang mampu menghasilkan kemerdekan bangsa dan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Azas penidikan kolonial berdasar azas *regeering, tucht,* dan *orde* harus diganti dengan sendi Pendidikan TS yang disebut *pamggulawenthah, momong, among* atau *ngemong* yang bermuara pada *tata tentrem*.

MakasudahtepatjikaKHDdianugerahigelarPahlawanNasional (1959) di bidang pendidikan dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diangkat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia atas jasa-jasanya sebagai seorang pejuang dan negarawan. Ke depan bangsa ini harus mencontoh keteladanan Bapak Pendidikan Indonesia dalam berjuang mengisi kemerdekaan guna kesejahteraan bangsa Indonesia. Negarawan Indonesia harus mengikuti model *"among"* seperti dalam Perguruan TS ketika

memerintah rakyat republik ini yang demokratis, humanis dan sejahtera. Satu hal terpenting bahwa KHD adalah negarawan, pejuang kebangsaan yang bukan saja menyampaikan gagasan politik perjuangan tetapi juga dipraktekkan oleh para nasionalis sehingga berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Daftar Bacaan

Abdurrachman Surjomihardjo. “Analysis of Suwardi Surjaningrat, Ideas and National-revolutionary Actions: 1913-1922”. *Madjalah Ilmu-ilmu Sastra Indonersia*. 1964, 3: 371-406.

_______________. *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*. Jakarta: Idayu, 1979.

Anderson, B.R.O’G. *Immagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.* London & New York: Verso, 1991.

Blumberger, J. Th. P. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indiö*. Dordrecht: Foris, 1987.

Foulcher, Keith. *Sumpah Pemuda: Makna & Proses Penciptaan atas Sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2000.

Haidar Musyafa. “Sang Guru”. Novel Ki Hajar Dewantara, Kehidupan, Pemikiran, Perjuangan Pendirian Taman Siswa,1889-1959. Yogyakarta:M. Kahfi, 2015.

Ingleson, John. *Jalan ke Pengasingan. Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES,1988.

Kahin, G. McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952.

Ki Hadjar Dewantara, *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan: Kenang-kenangan Ki Hadjar Dewantara*. Jakarta: Endang, 1952.

Ki Sugeng Subagyo. *Ki Hadjar Dewantara*: *Menawarkan Masa Depan*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.

Koch, D.M.G. *Menuju Kemerdekaan*. Jakarta: Pembangunan, 1951.

Kwantes, R.C. *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*. Groningen: Tjeenk Willink, 1976.

Nagazumi, Akira. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Niel, Robert van. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. The Hague: van Hoeve, 1960.

Pluvier, J.M. *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesië in de jaren 1930-1942*. The Hague/Bandung: van Hoeve, 1953.

Pringgodigdo, A.K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 1964.

Ruslan Abdulgani. *Nasionalisme Asia*. Jakarta: Prapanca, 1967.

Rutgers, S.J. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Surabaya: Hayam Wuruk, 1951.

Sartono Kartodirdjo. "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia abad XIX-XX", *Lembaran Sejarah*, no. 1, 1967.

Scherer, Sawitri Prastiti. *Harmony and Dissonance. Early Nationalist Thought in Java*. Ithaca: Cornell University Press, 1985.

Shiraishi, Takashi. *The Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*. Ithaca & London: Cornell University Press, 1990.

Smith, A.D. *Theory of Nationalism*. New York: Holmers & Meier, 1983.

Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional, 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Suwardi Surjaningrat. " Het Javaansch nationalisme in de Indische beweging". *Soembangsih*, 1918: 27-48.

Taufik Abdullah. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2001.

_____________. (eds.). *Indonesia dalam Arus Sejarah. Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jl. 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.

Tsuchiya, Kenji. "Perjuangan Taman Siswa dalam Pendidikan Nasional". Dalam Akira Nagazumi (ed.), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Veur, P. Van der. "E.F.E. Douwes Dekker, Evangelist for Indonesian Political Nationalism". *Journal of Asian Studies,* 1958, 17: 551-566.

Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Bandung: Sumur Bandung, 1962.

PRINSIP PENDIDIKAN TAMAN SISWO PADA AWAL PENDIRIANNYA[1]

2

OLEH: DJOKO MARIHANDONO[2]

A. Pendahuluan

Ketenangan di wilayah penduduk kolonial Hindia Belanda pada awal 1913 menjadi terhentak ketika pemerintah pada Juni 1913 mengeluarkan pernyataan resmi akan menyelenggarakan perayaan genap 100 tahun kemerdekaan negara itu dari cengkeraman Napoléon Bonaparte. Pernyataan pembebasan negeri Belanda dari kekuasaan Prancis juga akan dirayakan secara besar-besaran di wilayah koloni. Menurut pernyataan itu, tidak hanya orang Belanda yang akan merayakan peringatan itu, akan tetapi juga akan melibatkan penduduk bumiputera. Untuk merayakannya, akan dipungut derma yang berasal tidak hanya dari dari orang-orang Belanda yang tinggal di wilayah koloni,

1. Makalah ini disajikan dalam diskusi terbatas tentang tokoh "Ki Hadjar Dewantoro", yang diselenggarakan di Museum Kebangkitan Nasional Republik Indonesia, pada 30 Maret 2017.
2. Pemakalah saat ini bekerja sebagai Guru Besar Tetap di Departemen Sejarah, Program Studi Prancis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pemakalah dapat dihubungi melalui email: djoko_marihandono@yahoo.com

akan tetapi juga akan dipungut dari penduduk bumiputera. Pemungutan derma ini berlaku bagi seluruh penduduk di wilayah ini.

Himbauan pemerintah ini memperoleh reaksi yang luar biasa dari tokoh masyarakat, khususnya masyarakat bumiputera. Mereka berpendapat bahwa tidaklah sepantasnya bila pesta perayaan kemerdekaan itu melibatkan penduduk bumi putera, karena kondisi mereka yang masih dijajah. Mereka bahkan memperotes mengapa rencana perayaan itu akan diselenggarakan secara besar-besaran. Seyogyanya perayaan itu diselenggarakan secara tertutup di *Societeit* atau di tempat-tempat tertutup lainnya. [3] Banyak penduduk bumiputera termasuk para tokohnya mempertanyakannya, karena mereka tidak mengerti dan tidak paham mengapa mereka diharuskan terlibat dalam acara tersebut. Bahkan beberapa di antaranya menganggap bahwa himbauan ini merupakan suatu hinaan terbuka yang ditujukan kepada mereka.

Atas prakarsa dr, Tjipto Mangoenkoesoemo (selanjutnya disingkat TM), didirikanlah *Inlandsche Comite tot Hardenking van Nederlands Honderjarige Vrijheid,* yaitu "Panitia Peringatan 100 tahun Kemerdekaan Belanda". Komite ini diketuai oleh TM dengan sekretaris dan bendahara RM Soewardi Soerjaningrat (selanjutnya disingkat SS). Sedangkan posisi komisaris dijabat oleh Abdoel Moeis dan AH Wignyadisastra. Komite yang baru dibentuk ini lebih dikenal sebagai *Comite Boemi Poetra*. Komite ini sengaja dibentuk untuk memprotes dilibatkannya penduduk

3. Lihat Irna H.N. Hadi Soewito. *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 23.

bumiputera dalam memperingati 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda, yang diikuti dengan pemungutan sumbangan. Akibat dari kegiatan ini tokoh TM, SS, dan selanjutnya EFE Douwes Dekker ini harus menghadapi pengadilan.[4]

Komite ini selain bereaksi keras atas desakan pemerintah Hindia Belanda agar penduduk bumiputera ikut serta dalam bentuk pemberian sumbangan/derma dalam peringatan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda, juga memberikan reaksi atas suatu rencana dari pemerintah kolonial yang akan membentuk *Koloniale Raad*, yaitu suatu Dewan Kolonial yang beranggotakan sebanyak 29 orang. Dewan ini dibentuk dengan komposisi 21 orang anggotanya berasal dari orang Belanda dan sisanya 8 orang adalah wakil dari kaum bumiputera.[5] Dari 8 orang wakil bumiputera tersebut, 5 di antaranya adalah berasal dari para bangsawan yang menduduki jabatan bupati, suatu jabatan tertinggi yang boleh diduduki oleh penduduk bumiputera. Kelima bupati ini diangkat oleh pemerintah kolonial. Tentu saja, mereka lebih memperjuangkan kepentingan mereka pribadi dan kepentingan pemerintah kolonial dari pada kepentingan penduduk bumiputera. Dengan demikian, Komite ini sengaja

4. Pada saat komite ini dibentuk, Ernest François Eugène Douwes Dekker sedang dalam perjalanan kembali ke tanah air dari negeri Belanda. Ayah EFE Douwes Dekker adalah orang Belanda kelahiran Amsterdam yang memiliki darah campuran orang Fries, Prancis, dan orang Portugal. Ibunya saerang perempuan kelahiran Pekalongan, memiliki darah campuran Jerman, Polandia dan Jawa.
5. Lihat “Indische Partij” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 12 September 1912, lembar ke-2. Selain itu juga lihat “Een Indische Partij” dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 18 September 1912, lembar ke-2.

dibentuk utuk membela kepentingan penduduk bumiputera dan meneruskan saran, pendapat, kritik yang disampaikan untuk diteruskan kepada pemerintah kolonial.[6]

B. Perjuangan Ketiga Tokoh di Komite Boemipoetra

Komite bumiputera selanjutnya mengumpulkan uang yang diperoleh dari para anggotanya. Tujuan pengumpulan uang itu adalah sebagai ongkos pengiriman telegram yang akan dikirimkan kepada Sri Ratu Belanda Wilhelmina. Telegram yang dikirimkan itu berisi selain untuk mengucapkan selamat atas peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda, juga meminta agar Sri Ratu mencabut Peraturan Pemerintah nomor 111 yang melarang kaum bumiputera untuk berkumpul dan berpolitik, serta dibebaskan dari pengumpulan sumbangan dalam rangka peringatan tersebut. Selain mengirimkan telegram, Komite Bumiputera juga mengirim utusan untuk beraudiensi dengan Gubernur Jenderal di Batavia, yang saat itu dijabat oleh Gubernur Jenderal Idenburg, dengan maksud untuk menyampaikan seperti apa yang dituliskan dalam telegram yang dikirimkan kepada Sri Ratu.

Menteri Koloni Pleyte sempat merasa heran, mengapa kaum bumiputera dilibatkan dalam kegiatan ini. Namun, ia lebih merasa heran lagi, mengapa kaum bumiputera juga dipungut sumbangan secara paksa guna mensukseskan perayaan tersebut di Hindia Belanda.[7] Propaganda yang berupa iklan, pamflet banyak

6. Lihat “Indisch Parlement” dalam *De Sumtra Post*, 18 September 1913, lembar ke-2.
7. Dalam harian *De Express* tertanggal 12 Juli 1913 dimuat pidato Menteri

beredar di koran-koran di Jawa. Melalui harian *Tjahaja Timoer* di Malang telah dipasang iklan agar masyarakat bumiputera bersedia mengumpulkan sumbangan itu. Demikian pula dari harian *Pantjaran Warta* terbitan Batavia juga terdapat iklan yang isi dan tujuannya sama. Bahkan SS sempat menyaksikannya sendiri, ketika Asisten Residen di Buitenzorg dengan bantuan kaum bumiputera sibuk mengumpulkan sumbangan yang berasal dari masyarakat itu. Ketika melihat kejadian tersebut, SS kemudian melakukan protes ketidaksetujuannya terhadap pengumpulan uang dari kaum bumiputera. Setelah kejadian tersebut pemerintah menuduh Komite Bumiputera telah melakukan kekacauan di Buitenzorg.

Semua kegiatan di Komite itu dimotori oleh TM dan SS. EFE Douwes Dekker menyusul kemudian karena saat peristiwa itu terjadi ia sedang berada di Negeri Belanda.[8] Upaya mereka sebagai pendiri Indische Partij tidak ditanggapi oleh pemerintah Belanda. Bahkan Indische Partij yang sudah dua kali mengajukan diri untuk memiliki badan hukum, ditolak, padahal semua persyaratan telah dipenuhi termasuk Anggaran Dasarnya. Usulan untuk memperoleh status badan hukum untuk partai mereka diajukan lagi pada 5 Maret 1913, dengan perubahan pada anggaran dasarnya sesuai permintaan dari pemerintah kolonial, agar lebih menekankan pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pleyte yang dimuat dalam *De Express* 7 Januari 1914 dengan judul “De Indische Partij in het Parlement”. Pidato ini isampaikan oleh Menteri Koloni Pleyte di depan sidang parlemen Belanda.

8. Lihat “Grootheidsdroom” dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 17 Oktober 1913, lembar ke-2.

Namun apa yang diharapkan oleh pengurus Indische Partij tetap ditolak.[9]

C. Penangkapan dan Penahanan para Tokoh

Pada saat terjadi kebuntuan dalam proses perolehan status hukum Idische Partij, muncullah brosur yang beredar di masyarakat yang berjudul *Als ik eens Nederlander was* "Andaikata aku seorang Belanda" yang ditulis oleh SS. Karangan ini diterbitkan atas tanggung jawab TM yang dicetak di percetakan *De Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij*, yang dipimpin oleh J.F. Wesselius. [10] Isi tulisan ini merupakan ungkapan hati seandainya SS adalah orang Belanda, ia akan memprotes gagasan peringatan itu. Ia menegaskan bahwa gagasan merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda di wilayah koloni adalah gagasan yang keliru. Dengan merayakan kemerdekaan di wilayah koloni hal itu mengakibatkan kondisi politis yang sangat berbahaya bagi bangsa Belanda. Namun, SS bukanlah orang Belanda, sehingga ia ingin mengusir masyarakat Belanda yang memerintah dan berkuasa di wilayah koloni ini. Tulisan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap Sri Ratu yang tidak dapat dimaafkan oleh siapa pun.[11]

Komite segera dipanggil menghadap Mr. Monsanto yang

---

9. Lihat Irna H.N. Hadi Soewito. *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 27.
10. Koran *De Express* dicetak di percetakan itu. Selama EFE Douwes Dekker pergi ke negeri Belanda, pimpinan redaksi *De Express* diserahkan kepada Mr. Kakebeeke.
11. Lihat "Die het gevaar Zoekt" dalam *De Preanger Bode*, 11 Agustus 1913. Lembar ke-2.

menjabat sebagai *Officier van Justitie*, yang didatangkan dari Batavia ke Bandung, dengan tugas untuk memeriksa masalah SS. Sementara TM juga diperiksa sebagai saksi. Tentu saja SS menyangkal tuduhan itu, namun ditegaskan oleh jaksa bahwa SS dilarang untuk membuat tulisan seperti itu. SS sama sekali tidak paham mengapa ia dituduh menghasut kaum bumiputera. Ketika TM diminta untuk memberikan keterangan, ia menyembunyikan identitas siapa yang menulis sehingga ia diancam akan mengalami nasib yang sama dengan kepala Redaktur koran *De Locomotief* yang dihukum karena menyembunyikan siapa penulis artikel di dalam hariannya. Kemudian TM berjanji untuk mengatakannya siapa yang menulis artikel itu. Dalam proses pemeriksaan itu, ia menulis artikel yang berjudul *Kracht of vrees* (Kekuatan atau Ketakutan). Isi tulisan itu adalah menyadarkan pembacanya bahwa kaum bumiputera adalah pemilik sah negeri ini. Meskipun tidak bersenjata, mereka akan tetap berjuang, karena mereka punya kekuatan.

Melihat tulisan TM, semakin nyata bagi pemerintah kolonial bahwa ialah yang menjadi tokoh intelektual gerakan ini. Melihat bahwa suasana politik semakin panas, pada 28 Juli 1913, terbit tulisan SS yang berjudul *Een voor allen, mar ook allen voor een* (Satu untuk semua, tetapi juga semua untuk satu). Tulisan ini berisi tentang penegasan dirinya bahwa tulisan sebelumnya merupakan refleksi apa yang dipikirkannya selama ini. Ia yakin bahwa semua penduduk bumiputra memiliki perasaan dan pemikiran yang sama dengan dia. Tulisan kedua SS menambah runcing hubungan antara Komite di Bandung dan

pemerintah kolonial. Kantor Komite di Bandung digeledah polisi guna mencari sisa kedua tulisan itu yang belum diedarkan.

Melihat kenyataan bahwa tulisan kedua itu benar-benar telah menghina pemerintah kolonial Belanda, maka pada 30 Juli 1913, SS ditangkap polisi di rumahnya dan langsung ditahan. Selama dalam tahanan, rumah SS dijaga ketat oleh polisi dan tidak seorang pun diizinkan untuk memasukinya. Ia ditangkap karena dituduh menganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain SS, pemerintah juga menahan TM, karena dialah yang dianggap sebagai tokoh intelektual dari semua kegaduhan politik saat itu. Penahanannya merupakan suatu kontroversi, karena ia pernah menerima *De Ridder in de Orde van Oranje Nassau*, penghargaan yang diperoleh dari Sri Ratu Belanda. Namun, kenyataannya ia dipenjara bersama dengan SS. Abdoel Moeis dan AH Wignyadisastra pun juga ditangkap, karena dianggap turut aktif sebagai komisaris dari Komite itu. Selama mereka ditahan, pemerintah kemudian membubarkan *Comite Boemi Poetra*. Namun, berkat protes yang dilancarkan oleh TM dan jaminan dari dirinya, Abdoel Moeis dan AH Wignyadisastra kemudian dibebaskan.

EFE Douwes Dekker yang baru datang dari negeri Belanda pada 1 Agustus 1913 telah memperoleh informasi dari teman-temannya bahwa SS dan TM telah ditahan akibat dari tulisan mereka.[12] Oleh karena itu, ia kemudian menulis opini yang dimuat dalam koran *De Express* terbitan 5 Agustus 1913, yang diberi judul “Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en

12. Lihat “De interneering van den heer EFE Douwes Dekker” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 19 Agustus 1913, lembar ke-2.

RM Soewardi Soerjaningrat" (Pahlawan-pahlawan kami: Tjipto Mangoenkoesoemo dan RM Soewardi Soerjaningrat. Tulisannya ini mengungkapkan jasa yang telah diberikan oleh TM sehingga ia berhak untuk menerima penghargaan bintang ksatria dari kerajaan Belanda, ketika ia berperan aktif dalam pemberantasan penyakit pes di Malang, Pasuruan dan Jawa Timur.

Selama 10 hari ditahan, SS menderita sakit demam tinggi. Sebagai akibat kondisi fisiknya yang sedang sakit, ia kemudian dibebaskan. Namun belum lama ia menghirup udara kebebasan, pada 8 Agustus 1913, ia menerima surat panggilan dari pengadilan di Bandung untuk menghadap ke rumah Residen Bandung TJ Janssen pada pagi harinya, 9 Agustus 1913, pukul 09.00. Ia datang memenuhi panggilan itu. Ia dituduh telah melanggar Peraturan Pemerintah pasal 48 yang intinya bahwa ia telah membahayakan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, ia harus kembali ditahan. Mereka berdua akhirnya divonis harus dibuang dan diasingkan.

Walaupun baru beberapa hari menginjakkan kakinya di tanah air, EFE Douwes Dekker, akibat tulisannya tentang kedua tokoh ini ditangkap dan dipenjarakan di penjara Weltevreden. Pada 11 Agustus 2013 pukul 09.00 ia dipanggil untuk menghadap Residen Batavia H Rijfsijder. Ia pun dituduh sebagai penghasut karena sebagai ketua redaksi koran *De Express,* media itu telah ikut menyebarkan tulisan para terdakwa. Namun, akhirnya ia dinyatakan bebas.

Penahanan TM merupakan dilema bagi pemerintah, karena ia adalah orang yang banyak jasanya di negeri ini,

khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat, bahkan pemerintah pun mengakuinya. Oleh karena itu diciptakanlah beberapa upaya untuk membujuknya agar ia bersedia untuk mengubah pemikirannya. Untuk merayunya agar mau mengubah pemikiran dan pandangannya, beberapa bujukan ditawarkan, antara lain memberikan tawaran kepada adik TM untuk masuk ke HBS secara gratis. Bahkan melalui ayahnya yang menjadi guru di HBS (*Hoogere Burger School)* pun diminta agar membujuk TM. Tidak hanya berhenti di situ saja, melalui sahabat-sahabatnya, diminta untuk membentu membujuk TM agar mengajukan grasi kepada pemerintah. Namun, semuanya bujukan itu ditolaknya.

Aktivitas EFE Douwes Dekker yang sering mengunjungi mereka berdua akhirnya tercium oleh aparat kepolisian. Ia ditangkap dan dipenjarakan besama dengan TM dan SS. Akhirnya keputusan *Raad van Justitie* menetapkan bahwa TM harus segera meninggalkan kota Bandung dan akan dibuang ke Banda. Rekan seperjuangannya, SS juga harus segera meninggalkan Bandung untuk mejalani pembuangannya di pulau Bangka. Sementara EFE Douwes Dekker harus tinggal di Kupang selama masa pembuangannya.[13]

Dalam pembelaannya, mereka bertiga menuntut agar tidak dibuang di ke tiga tempat itu, namun meminta agar diizinkan untuk tinggal di negeri Belanda sebagai tempat pengasingan mereka. Permohonan mereka itu dikabulkan

13. Lihat “Het Verbaningsbesluit” dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 29 Agustus 1913, lembar ke-2.

dengan catatan bahwa paling lama 30 hari sejak keputusan itu, mereka harus segera diberangkatkan ke negeri Belanda sebagai tempat pengasingan dan pembuangan mereka.

D. Pengasingan di Negeri Belanda

Pada 6 September 1913 tiga serangkai ini, TM, SS bersama isterinya, dan EFE Douwes Dekker beserta isteri dan anak-anaknya berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok di Batavia menuju ke negeri Belanda, sebagai tempat pembuangannya melalui Singapura.[14] Namun keberangkatannya mengalami pendundaan, sehingga dikhawatirkan batas waktu keberangkatan ke tempat pengungsian akan terlewati. Pada 13 September 1913, kapal mulai meninggalkan pelabuhan Tanjuk Priok. Dari atas kapal Melchior Treub, sebuah kapal milik maskapai pelayaran Jerman, yang akan membawa mereka ke Belanda, SS masih sempat menulis pesan yang disampaikan kepada kawan-kawannya yang mengantarnya dari pelabuhan Tanjung Priok. Pesan itu diberi judul "Vrijheidsherdenking en Vrijheidsberooving" (Peringatan Kemerdekaan dan Perampasan Kemerdekaan). Beberapa saat sebelum kapal bergerak, ia menerima kabar dari kawan-kawannya bahwa uang sumbangan yang telah terkumpul telah dikembalikan kepada para donaturnya.

Sesampainya di negeri Belanda, mereka hidup dengan menggunakan uang yang diperoleh dari sumbangan teman-

14. Lihat HAH Harahap dan BS Dewantara. *Ki Hadjar Dewantara Dkk.* Jakarta: PT Gunung Agung, 1980, hlm. 148.Lihat pula "DD Naar Europe" dalam *De Sumatra Post,* 9 September 1913 lembar ke-2.

teman mereka yang telah membentuk suatu badan pengumpul dana yang diberi nama TADO yang merupakan singkatan dari *Tot Aan De Onafhankelijkheid* (Sampai Kemerdekaan Tercapai), yang memberikan uang bantuan beaya hidup bagi para buangan itu. Dari dana TADO ini, untuk keperluan sehari-hari SS dan TM f 150 per bulan. EFE Douwes Dekker bersama isteri dan dua orang anaknya menerima f 250 per bulan. Tentu saja beaya sebesar itu tidak akan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu mereka juga memperoleh bantuan dari teman-temannya yang sedang belajar di negeri Belanda yang secara spontan mengirimkan beras, pakaian, serta peralatan rumah tangga.[15]

Dalam mengatasi kesulitan hidup ini isteri SS, Soetartinah, yang ikut serta mendampingi suaminya melamar untuk bekerja sebagai guru di Fröbel School, sebuah taman kanak-kanak di Weimar, Den Haag. Sementara itu, SS dan TM sibuk dengan urusan jurnalisme yang telah ia tekuni sejak lama.[16] Dari honor mereka menulis inilah, mereka dapat menyambung hidupnya di negeri kincir angin tersebut. Namun, TM harus dipulangkan segera ke tanah air pada 27 Juli 1914 akibat penyakit kronis yang dideritanya, walaupun terhadap dirinya tetap diberlakukan kembali Ketetapan Surat Keputusan Hukuman 18 Agustus 1913 berupa "interneering" (pengasingan) ke pulau Banda. Namun

15. Lihat "DD in Holland", dalam *Bataviaasche Nieuwsblad.* 22 Oktober 1913, lembar ke-2.
16. Lihat "De Sociaal Democraten en de Bannenlingen" dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 10 November 1913, lembar ke-2.

sesampainya di Hindia Belanda, ia diizinkan menetap di kota Solo sebagai seorang dokter swasta di daerah Kusumoyudan Solo.

Banyak karya yang dihasilkan selama SS berada di pembuangan, antara lain ia sempat mendirikan *Indonesisch Pers Bureau*, dengan sekretariat di jalan Fahrenheitstraat 473 di Den Haag. Pendirian pers nasional di Belanda ini berhasil didirikan berkat pinjaman uang dari H. Van Kol seorang Belanda yang pernah bekerja di Departemen Pekerjaan Umum di Jawa. Uang pinjaman sebesar f 500 akan dikembalikan dengan cara diangsur.[17]

Diilhami oleh pekerjaan isterinya, di samping kesibukannya bekerja mengurus masalah pers, SS masih menyempatkan diri untuk mengikuti kuliah singkat di *Lager Onderwijs* (Sekolah Guru), yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda di Den Haag. Pada 12 Juni 1915, ia memperoleh ijazah *Akte van bekwaam als Onderwijzer* (Ijazah Kepandaian Mengajar). Mendengar berita kelulusan SS, sahabatnya EFE Douwes Dekker menyarankan agar ia tidak lagi membuat onar di bidang politik.[18] Namun himbauan sahabatnya itu tidak dapat dipenuhi, sehingga ia tetap menulis artikel yang dimuat di koran-koran Belanda. Kegiatan dalam bidang pendidikan pun yang semula merupakan kegiatan iseng dengan

17. Lihat "Van Kol over I.P" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad.* 3 Oktober 1913, lembar ke-2.
18. Lihat "De Banneling Soewardi" dalam *Leeuwarder Courant,* 17 Juni 1915, lembar ke-1.

tujuan untuk memperoleh hasil tambahan untuk biaya hidup, akhirnya mempengaruhi hampir seluruh kehidupannya. Ia sependapat dengan isterinya bahwa perjuangan dapat dilakukan tidak hanya dengan berperang, atau tindakan kekerasan lainnya. Perjuangan dapat dilakukan dengan mempersiapkan bangsanya untuk merdeka melalui pendidikan. Banyak buku pendidikan yang telah dibacanya, termasuk sistem pendidikan yang digagas oleh tokoh Montessori, seorang pendidik dari Italia, yang mengarahkan anak-anak didik pada kecerdasan budi. Ia juga membaca buku tentang Rabindranath Tagore, tokoh pendidikan dari India yang menekankan pentingnya pendidikan keagamaan yang baik sebagai alat untuk memperkokoh kehidupan manusia. Beberapa prinsip dasar pendidikan nasional sudah dipikirkannya, antara lain dengan menggunakan bahasa ibu, dan bukan bahasa kolonial.

Kemantapan dirinya untuk menjadi pendidik semakin tertanam dalam dirinya, tatkala anak pertamanya lahir, yang diberi nama Asti pada 24 Agustus 1915. Asti lahir dengan berkebutuhan khusus. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh hubungan darah yang masih dekat dengan isterinya (saudara sepupu). SS yang semula adalah seorang jurnaslis sekaligus politikus mulai tertarik dan berniat untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa kebangsaan Indonesia. Ia sangat sadar bahwa pendidikan merupakan dasar perjuangan untuk meninggikan derajat rakyat di tanah airnya, sekaligus melihat kelemahan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. SS meletakkan dasar kemerdekaan melalui pendidikan anak-anak

karena ia sadar bahwa mengisi jiwa anak-anak merupakan suatu keharusan agar mereka berani untuk berjuang, yang merupakan senjata yang paling ampuh untuk merebut kemerdekaan. Sistem pendidikan kolonial membuat anak-anak selalu bergantung kepada bangsa Barat.[19]

Setelah menjalani hukuman buang di negeri Belanda, keluarga SS yang terdiri atas isterinya dan dua anak mereka (Asti dan adiknya Broto) direncanakan akan meninggalkan Belanda pada 24 Mei 1917 dengan menaiki kapal *Rinjani*. Namun, pada saat menjelang keberangkatannya, anak pertama mereka sakit keras, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Tentu saja dengan kejadian ini keluarga SS membatalkan keberangkatannya untuk kembali ke tanah air. Namun rencana kepulangan ini menjadi tertunda cukup lama sebagai akibat dari pecahnya Perang Dunia I di Eropa. Hampir dua tahun berselang, pada 6 Juli 1919 Asti yang sakit dinyatakan sembuh, dan pada 26 Juli 1919, keluarga SS meninggalkan negeri Belanda dengan menaiki kapal *Rinjani*. Perjalanan ke tanah air ditempuhnya selama 51 hari. Pada 15 September 1919, keluarga SS merapat di Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia.

E. Prinsip-Prinsip Pendidikan Taman Siswo

Setibanya di tanah air, SS tidak menginginkan untuk melanjutkan karirnya di bidang politik. Ia kemudian mengkonsentrasikan dirinya dalam kegiatan pendidikan untuk anak-anak bumiputera. Informasi yang didapat diperoleh

19. Lihat Irna H.n. Hadi Soewito, *loc.cit.* hlm. 103.

berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh SS, yang telah berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara bersama dengan Ki Mangoensarkoro yang diterima terima oleh Penasehat Urusan Pribumi.[20]

Taman Siswo, yang merupakan singkatan dari Pergerakan Kebangsaan Taman Siswo, yang merupakan merupakan sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantoro pada Juli 1922 di Yogyakarta. Pada 6 Januari 1923 Pergerakan Kebangsaan Taman Siswo dinyatakan sebagai “wakaf bebas”. Lembaga ini diserahkan oleh Ki Hadjar Dewantara pada 7 Agustus 1930 kepada Yayasan Taman Siswo, yang berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan tujuan untuk memperoleh suatu wawasan dalam pemikiran yang mendasari Perguruan Taman Siswo, perlu untuk mengetahui prinsip dasar yang diuraikan dalam rapat pendiriannya pada 3 Juli 1922 oleh Ki Hadjar Dewantara. Terdapat tujuh prinsip dari lembaga pendidikan ini.

Hak menentukan nasib sendiri. Hak menentukan nasib sendiri dari individu yang perlu memperhitungkan tuntutan kebersamaan dari masyarakat harmonis, sebagai prinsip dasar lembaga pendidikan ini. Tertib dan Damai menjadi tujuan tertingginya. Tidak ada ketertiban yang terjadi di masyarakat apabila tidak ada perdamaian. Akan tetapi juga tidak akan ada

---

20. Lihat arsip koleksi Taman Siswo, *Brief van den Directeurvan Onderwijs en Eredienst van 23 September 1938no. 27203A*, dan *Brief vanden Directeur van Financien van 7 December no. LB 1/18/38* Koleksi NAN, Den Haag dan Arsip Nasional RI (fotokopi)

perdamaian selama individu dihalangi dalam mengungkapan kehidupan normalnya. Pertumbuhan alami, merupakan tuntutan yang dibutuhkan bagi pengembangan diri seseorang. Dengan demikian, lembaga ini menolak pengertian "pengajaran" dalam arti "pembentukan watak anak secara disengaja" dengan tiga istilah "pemerintah – patuh – tertib". Metode pengajaran yang dianut memerlukan perhatian menyeluruh yang menjadi syarat bagi pengembangan diri demi pengembangan akhlak, jiwa dan raga anak. Perhatian inilah yang disebut sebagai "sistem among".

Siswa yang mandiri. Sistem ini diterapkan untuk mendidik Siswa menjadi mahluk yang bisa merasa, berpikir dan bertindak mandiri. Di samping memberikan pengetahuan yang diperlukan dan bermanfaat, guru perlu membuat Siswa cakap dalam mencari sendiri pengetahuannya dan menggunakannya agar diperoleh manfaat. Inilah pengutamaan sistem pendidikan among. Pengetahuan yang diperlukan dan bermanfaat adalah pengetahuan yang sesuai kebutuhan ideal dan material dari manusia sebagai warga di lingkungannya.

Pendidikan yang mencerahkan masyarakat. Sehubungan dengan masa depan, anggota masyarakat harus diberikan pencerahan. Sebagai akibat dari kebutuhan yang menumpuk, yang sulit dipenuhi dengan sarana sendiri sebagai akibat pengaruh peradaban asing, lembaga pendidikan ini harus sering bekerjasama dalam mengatasi gangguan perdamaian. Sebagian dari kaum bumiputera tidak merasa puas. Juga sebagai akibat dari ketersesatan sistem pendidikan itu. Lembaga pendidikan ini harus mencari perkembangan intelektual yang

timpang, yang menjadikan kaum bumiputera tergantung secara ekonomi dan juga membuat terasing dari rakyat yang menjadi bagian dari pemerintah kolonial. Dalam kebingungan ini mereka menjadikan budaya Eropa sebagai titik tolak, sehingga Taman Siswo dapat mengambil langkah maju. Atas dasar peradaban sendiri, hanya pembangunan dalam kondisi damai bisa terwujud;

Pendidikan harus mencakup wilayah yang luas. Tidak ada pendidikan betapapun tingginya juga yang bisa membawa dampak bermanfaat bila hanya mencapai kehidupan sosial yang bertahan secara sesaat. Pendidikan harus mencakup wilayah yang luas. Kekuatan suatu negara merupakan kumpulan dari kekuatan individu. Perluasan pendidikan rakyat terletak dalam usaha lembaga ini;

Perjuangan menuntut kemandirian. Perjuangan setiap prinsip menuntut kemandirian. Oleh karenanya kaum bumiputera jangan mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain, termasuk di dalamnya untuk mewujudkan kemerdekaan. Dengan senang lembaga ini menerima bantuan dari orang lain akan, tetapi menghindari apa yang bisa mengikatnya. Jadi Taman Siswo ingin bebas dari ikatan yang menindas dan tradisi yang menekan dan tumbuh dalam kekuatan dan kesadaran kaum bumiputera.

Sistem ketahanan diri. Bila bangsa ini bisa bertumpu pada kemampuan sendiri, semboyannya cukup sederhana. Tidak ada persoalan di dunia yang mampu bekerja sendiri. Persoalan itu tidak akan bertahan lama. Mereka tidak bisa bertahan sendiri karena sangat bergantung dari kaum bumiputera. Atas semua

yang sudah terjadi selama ini, akan muncul "sistem ketahanan diri" sebagai metode kerja lembaga pendidikan ini.

Pendidikan anak-anak. Lembaga ini bebas dari ikatan, bersih dari praduga. Tujuan lembaga ini adalah mendidik anak-anak. Bangsa bumiputera tidak meminta hak, akan tetapi meminta diberikan kesempatan untuk melayani anak-anak.

Pada 1921, Taman Siswo di Yogyakarta disiapkan, dan pada 1922 didirikan secara permanen. Sekolah ini muncul sebagai "perguruan pendidikan nasional".

Segera di berbagai tempat, sekolah-sekolah Taman Siswo berdiri, terutama setelah pendirinya berceramah di kota-kota besar di Jawa, sehingga prinsip Taman Siswo dapat diuraikan secara panjang lebar. Sebagai pedoman telah diterima semboyan "kembali dari Barat menuju nasional" dengan penggunaan bahasa ibu sebagai pengantar pendidikan yang akan berdampak dalam menjalankan ibadah agama, penghapusan permainan dan lagu-lagu anak-anak Belanda dan menggantinya dengan model nasional.[21]

Sebagai sekolah nasional jauh lebih banyak yang akan diberikan budaya sendiri daripada di lembaga lain (bahasa, sejarah, moral, musik, tari dan sebagainya). Apabila tidak ada bahasa ibu yang masih murni, (seperti di Batavia misalnya), sebagai pengantar akan digunakan bahasa Melayu baru yang disebut bahasa Indonesia. Beberapa mata pelajaran diberikan dalam bahasa Belanda, untuk melatih siswa dalam penggunaan

---

21. Arsip *Taman Siswo* koleksi B21A dan B21 B Koleksi Nationaal Archief Nederland dan Arsip Nasional Republik Indonesia (Fotokopi).

praktis bahasa itu. Juga kadang-kadang bahasa Jawa atau bahasa Melayu masih sulit untuk diterima. Sehubungan dengan pendidikan bahasa, aturan dalam kurikulum ini berbunyi: bahasa ibu sebagai pengantar, terutama untuk kelas rendah, pendidikan dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu berlangsung di kelas yang lebih tinggi dari sekolah dasar.

Dalam bahasa terletak semua yang tersimpan, apa yang dimiliki rakyat dari nilai kebatinan. Bahasa sendiri akan memberi anak sebagai jalan masuk menuju ke hati rakyat. Bila pendidikan berjalan dengan baik, pasti akan terjadi pengalihan budaya. Penguasaan bahasa rakyat sendiri menjadi syarat pertama karena hanya dengan itu rakyat bisa merasakan kebudayaannya sendiri. Hal ini menjadi suatu syarat demi munculnya rasa kasih terhadap budaya sendiri, yang merupakan faktor penting dalam usaha untuk pengembangan budaya, menuju pengembangan lebih lanjut. Sehubungan dengan ini, dalam sistem *among* berlaku prinsip bahwa pendidikan harus dilaksanakan dalam bahasa ibunya sendiri. Terutama bagi anak kecil, penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan dianggap sangat penting, karena pendidikan baru bisa hidup. Hantu, mitos dan legenda bisa dikisahkan kepada anak ketika mereka masih sangat peka. Jadi anak hidup dalam fantasinya dengan rakyatnya sendiri dan ikut terlibat dalam penilaian rohani sejauh daya tangkapnya memungkinkan.

Penggunaan bahasa ibu merupakan suatu tuntutan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi proses berpikir. Jadi pendidikan dengan menggunakan bahasa asing diperlukan pada usia yang

lebih tinggi, bila anak sudah mampu menguasai bahasa mereka sendiri. Di tingkat Taman kanak-kanak, masih belum ada pendidikan bahasa asing yang diberikan.

Sistem *among* menganggap permainan anak memegang peranan penting dalam mendidik anak, karena semuanya terletak dalam jiwa anak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan fantasi mereka dan dorongan bagi kegiatan dan gerak motorik mereka. Tidak ada yang lebih alami dari pada anak bisa memperoleh permainannya sendiri yang berasal dari lingkungannya sendiri. Jadi anak tetap berada dalam lingkup rakyatnya sendiri. Jika sebaliknya anak menerima permainan asing, maka akan tertanamkan inti pemisahan dari bangsanya sendiri. Melalui pemainan nasional, pemikiran anak secara alami tumbuh bersama kehidupan rakyatnya.

Watak nasional Taman Siswo mengakibatkan orang memperkenalkan anak dengan ide nasional yang tertanam pada rasa kasih kepada bangsa dan tanah airnya sendiri. Namun ide nasional itu tidak disertai dengan kebencian terhadap bangsa lain, karena akan menjadi penghambat dalam perkembangan terhadap kesadaran kasih bagi kemanusiaan. Oleh karenanya, menurut pandangan Taman Siswo nasionalisme tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Azas Taman Siswo adalah kemanusiaan dengan sifat kebangsaan.

Dalam *Poesara,* majalah Taman Siswo terbitan Maret 1933, Ki Hadjar Dewantara menulis artikel dengan judul "Kembali ke ladang". Ki Hadjar Dewantara menggambarkan hubungan Taman Siswo dengan pergerakan politik sebagai

berikut: “Taman Siswo dan selanjutnya juga dalam setiap karya sosial, ladang atau sawah tempat orang menanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pergerakan politik nasional menjadi pagar, pagar untuk melindungi ladang agar tanaman di ladang tidak diganggu oleh hewan liar atau dicuri oleh orang asing.”[22]

Bisa dikatakan bahwa Taman Siswo tidak ikut campur dalam bidang politik. Pergerakan politik nasional harus memperhatikan agar orang tidak menghambat tumbuhnya sekolah nasional, sehingga pembinaan terhadap pemuda secara nasional tidak terganggu. Hal inilah yang menjadi inti pembangunan nasional. Politik tidak diizinkan di sekolah. Ada larangan keras bagi guru untuk membawa politik ke ranah sekolah, karena Taman Siswo menduga bahwa politik tidak boleh mengorbankan anak-anak kecil. Orang tidak boleh memasukkan suasana politis di sekolah. Dalam kaitan ini tidak ada lagi keterlibatan dalam politik, atau politik praktis. Politik harus dibatasi oleh tenaga pengajar dan diatur. Orang bisa terlibat dalam partai politik sebagai tenaga pengajar Taman Siswo, tetapi orang harus memperhitungkan semua yang disebutkan di atas. Saat itu di Taman Siswo juga berlaku aturan bahwa setiap guru mengucapkan janjinya bahwa dia perlu mengutamakan kepentingan sekolah dan bukan kepentingan lainnya. Taman Siswo menuntut dari guru agar guru bisa mencurahkan jiwanya untuk mendidik anak. Ini hanya akan terjadi bila orang menganggap karyanya untuk pendidikan dan

22. Arsip *Taman Siswo*, koleksi B28A, B28 B, Koleksi Nationaal Archief Nederland dan Arsip Nasional Republik Indonesia (Fotokopi).

pengembangan Taman Siswo sebagai tujuan nomor satu. Taman Siswo menuntut lebih banyak karena berdasarkan "ide Paguron" yang dianut oleh Taman Siswo. Guru melihat tugas hidupnya dalam karya pendidikan.

Taman Siswo ingin tetap menjaga jarak dari politik, atas dasar pedagogis. Apabila pada saat tertentu disinggung tentang warna politik Taman Siswo, maka ini biasanya dianggap berasal dari para pelakunya. Akan tetapi Taman Siswo sendiri bisa merujuk pada tata tertib yang telah ada.[23] Taman Siswo merasa wajib dengan tujuan untuk tetap setia kepada prinsipnya, yakni melayani anak-anak.

Prinsip kemanusiaan, tidak diabaikan oleh Taman Siswo dalam usaha menanamkan jiwa nasionalisme. Prinsip moral membatasi pelaksanaan ide nasionalis. Tanpa itu, Taman Siswo tidak bisa menjadi lembaga pendidikan. Dengan demikian yang penting adalah pernyataan bahwa pada tahun 1921 dalam pendirian Taman Siswo digunakan semboyan "Suci Ngesti Tata Tunggal, yang berarti "kemurnian dan ketertiban berjuang demi kesempurnaan", dan menurut versi Jawa bersama menunjuk angka tahun 1854 Caka. Moral dalam Taman Siswo muncul

23. Tata tertib telah diatur secara jelas. Hal ini terbukti dari kenyataan, bahwa hari peringatan Diponegoro sebagai pahlawan nasional di semua lembaga sekolah Taman Siswo diadakan pada tangal 8 Februari. Pada setiap tanggal itu, tidak diselenggarakan kegiatan sekolah. Sementara itu, pada hari besar nasional (Belanda), semua sekolah Taman Siswo terpaksa ditutup. Di gedung-gedung tidak ada bendera dikibarkan, tenaga pengajar tidak ikut terlibat dalam upacara, para murid sebaliknya dibebaskan jika mau untuk ikut terlibat. Di banyak sekolah Taman Siswo, selain "lagu-lagu nasional", lagu Indonesia Raya juga dilantunkan.

dalam agama. Hal ini diketahui dari semboyan tersebut. Tunggal berarti juga satu, di sini dicantumkan dalam arti mistis kata itu.

Semua ini selanjutnya bisa dijelaskan dari kenyataan bahwa para pendiri Taman Siswo tanpa terkecuali adalah sosok agamis.

Taman Siswo memiliki visi bahwa hanya ada perkembangan alami apabila anak dididik:

* Sesuai dengan kondisi alam materi;
* Atas dara bakat alamnya;
* Sesuai kondisi alamnya;

Dalam alam, pusat pendidikan utama terletak pada keluarga. Ayah dan ibu merupakan pendidik anak yang paling utama. Suatu pandangan alami tertentu untuk mendidik selalu terpusat pada ayah atau ibu. Pandangan ini menjadikan keluarga sebagai pusat pendidikan alami. Pandangan ini menghendaki sistem *among* dialihkan kepada *Paguron*, di sekolah. Dari sana Taman Siswo dalam organisasinya tampil sebagai "keluarga besar dan suci". Keluarga ini pada dasarnya berbeda dari keluarga alami.

Keluarga alami didasarkan pada hubungan darah. Taman Siswo didasarkan sebagai "keluarga" atas hubungan roh. Hubungan roh di sini menunjukkan bahwa di Taman Siswo orang bisa saling merasa dirinya sebagai saudara, atas dasar kenyataan bahwa orang menganut ide yang sama. Juga hubungan keluarga yang membuat hubungan antara majikan dan pekerja tidak dapat diterima di Taman Siswo. Sebagai anggota dari keluarga yang sama, orang berjuang demi tujuan yang sama, dan untuk gagasan yang sama. Sewajarnya ada kepemimpinan, seperti dalam

keluarga. Demikian pula dalam Taman Siswo kepemimpinan dipegang oleh orangtua, bukan menurut ukuran raga melainkan menurut ukuran jiwa.

Di sekolah setiap Siswa bisa menyebut gurunya dengan "bapak" atau "ibu" sesuai pengajar pria atau wanita. Bentuk-bentuk fisik yang bukannya tanpa pengaruh muncul pada hubungan antara guru dan Siswa. Pada tahun-tahun pertama anak merasa sangat dekat dengan ibunya. Unsur "keibuan" juga ingin ditetapkan dalam sistem among di sekolah. Di Taman Anak, di mana anak-anak mencapai usia 9 tahun, diberi pelajaran oleh guru perempuan.[24]

Sekolah menyebut dirinya "perguruan" (*paguron*). Ditarik dari kata "guru" (pengajar). Kata ini secara harafiah berarti: tempat di mana guru tinggal. Orang juga bisa menarik makna dari kata "berguru" (*meguru*), yakni belajar, kemudian perlu diberikan pemahaman belajar pada kata itu. Sering kata "paguron" memperoleh makna belajar sendiri, yakni karena bila sosok guru menjadi unsur yang dominan, maka *paguron* berarti arah perguruan ditunjukkan di situ.

Taman Siswo menyebut kata ini dalam tiga makna. Paguron berarti: pusat belajar dengan arah tertentu sekaligus rumah guru. Menurut sistem pendidikan Jawa lama, juga Indonesia lama, mungkin Asia pada umumnya, sekolah juga menjadi rumah guru. Di sana dia tinggal selamanya; dia memberikan namanya, atau lebih tepat lagi dikatakan orang menyebut dusun itu dari namanya.

24 Arsip *Taman Siswo* B28C Koleksi Nationaal Archief Nederland dan Arsip Nasional Republik Indonesia (Fotokopi).

Dari jauh dan dekat para Siswa datang kepadanya; dia tidak mendatangi murid. Orang berkata: dia jangan menjadi "sumber lumaku tinimba" (sumber air yang berjalan untuk diambil oleh orang). Suasana paguron didominasi dengan semangat kepribadiannya. Belajar di paguron demikian menjadi masalah kedua. Tidak bisa dikatakan bahwa hanya sedikit perhatian yang dicurahkan; jika tidak maka orang tidak akan memberikan nama khusus pada lembaga ini: *pawiyatan* (*wiyata* = belajar). Jadi pada prinsipnya sosok guru memberikan bimbingan hidup. Inilah yang disebut dengan kata yang lain "pengajaran".

Dalam "rumah sekolah Taman Siswo ideal", para murid selama pagi, siang dan malam sibuk dengan belajar, dengan olah raga atau olah seni, di bawah bimbingan para gurunya. Semuanya tinggal dengan keluarga mereka. Kurikulum pagi biasa tidak terlalu penting dibandingkan dengan kebersamaan murid dan guru selama ini sampai larut malam. Kenyataan tidak bisa dibantah bahwa para murid mengalami kehidupan keluarga yang sama dalam asrama (sebuah nama lain bagi *paguron* dalam masa Hindu-Jawa) seperti di rumah bersama ayah dan ibunya.

Yang dimaksudkan kata "among" dalam bahasa Jawa adalah "membimbing". Dalam kehidupan sehari-hari kata ini digunakan bagi hubungan pengasuh yang diserahi tugas membimbing anak kecil. Dalam wayang istilah ini ditemukan kembali pada hubungan panakawan, khususnya Semar dengan Arjuna. Akan tetapi dalam prinsip yang dianut oleh Taman Siswo kondisinya sedikit berbeda, lebih dalam lagi dan harus

dihubungkan dengan pandangannya tentang tugas manusia di dunia ini.

Di Taman Siswo perlu dibedakan tiga periode perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa. Setiap periode mencakup waktu delapan tahun (windu). Windu pertama disebut “zaman wiraga” (wi = mengikuti, raga = fisik). Hal ini merupakan masa perkembangan fisik dan bagian tubuh lainnya. Windu kedua disebut “zaman wicipta”. Periode ini merupakan perkembangan daya intelektual anak, yang sangat mempengaruhi sifat pemahamannya. Windu ketiga disebut ‘zaman wirama” (wirama = keharmonisan). Ini merupakan masa penyesuaian dengan dunia luar, di mana anak akan menentukan tempat yang akan didudukinya di sana. Setelah masa ini, anak menjadi dewasa. Pada masa ini anak sudah mencapai usia sekitar 23 tahun.[25]

Lembaga sekolah disesuaikan dengan tuntutan khas setiap periode. Cabang “Taman Muda” bagi Siswa kira-kira berkisar dari 9 sampai 14-16 tahun. Periode ini bagi sebagian besar merupakan “zaman wicipta”, windu kedua. Taman Anak dan Taman Muda besama-sama menjadi cabang pendidikan dasar utuh. Lembaga pendidikan menengah yang berada di atasnya mencakup lima tahun ajaran, dibagi dalam dua sub-cabang, satu cabang awal tiga tahun yang disebut Taman Dewasa dan cabang lanjutan dua tahun yang disebut Taman Dewasa Raya (yang berarti di sini adalah diperluas). Kedua cabang ini menampung

25. Arsip *Taman Siswo* nomor B28 D Koleksi Nationaal Archief Nederland dan Arsip Nasional Republik Indonesia (Fotokopi).

Siswa dari 14-16 tahun sampai 19-23 tahun. Bagi sebagian besar, periode ini bersamaan dengan “zaman wirama”, masa penyesuaian dengan dunia luar, masa pematangan usia muda, masa puber. Zaman wirama dimulai dengan masa kehancuran, yang kira-kira bersamaan dengan periode Taman Dewasa, atau bagian awal dari sekolah menengah.

Sebagai organisasi, Taman Siswo bukan merupakan lembaga (juga tidak memiliki anggota yang membayar iuran) tetapi merupakan “wakaf bebas”, sejenis “yayasan” bumiputra, tetapi tidak tercatat sebagai lembaga Islam, seperti halnya yang diwajibkan bagi wakaf biasa, karena mereka tidak terikat pada aturan-turan Islam. Selanjutnya juga harus ditunggu untuk meminta status badan hukum karena badan hukum termasuk kewenangan hukum Eropa.

Setiap Taman Siswo menjadi cabang perserikatan yang disebut Persatuan Taman Siswo, berkedudukan di Yogyakarta di bawah pimpinan sebuah Majelis Luhur atau pengurus pusat yang dipilih oleh kongres tiap empat tahun. Di atas lembaga ini masih ada “pimpinan umum”, yang untuk jangka waktu tidak terbatas dipilih. Bersama “Dewan Sesepuh”, memberikan nasehat, pemimpin umum dan pengurus pusat bersama-sama menjadi kepemimpinan tertinggi.

Penyelesaian masalah Taman Siswo hanya merupakan hak anggota yang diserahi oleh para anggota kepada lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga itu adalah:

* Rapat Besar Umum
* Rapat Besar

Pemimpin Umum dan Hak leluasa (pemimpin umum dengan kewenangan tak terbatas)

* Majelis luhur
* Majelis Cabang

Rapat Besar Umum memiliki kekuatan tertinggi dan yang paling berhak untuk memutuskan sesuatu. Mereka bertemu empat tahun sekali di Yogyakarta dan juga mengadakan pertemuan khusus yang dihadiri oleh semua utusan cabang dari Persatuan Taman Siswo. Pada Rapat Besar Umum ini juga dipilih anggota Majelis Luhur yang akan memiliki masa kerja selama periode 4 tahun. Rapat Besar Umum diberi kewenangan untuk menentukan pandangan (organisasi) dalam semua persoalan organisasi dan berwenang untuk mengambil suatu keputusan dengan memperoleh suara 2/3 dari suara yang ada. Setiap cabang dalam Rapat Besar Umum setiap lima anggota atau sebagian darinya bisa memiliki satu suara dengan maksimal lima suara.

Perintah Umum dan Hak Leluasa dipegang oleh pimpinan umum, yang dipilih untuk jangka waktu tak terbatas oleh Rapat Besar Umum melalui referendum yang dipilih oleh ¾ dari seluruh jumlah suara anggota. Pimpinan Umum memanfaatkan kewenangan ini hanya dalam kondisi penting dan mendesak. Waktu ketika kewenangan ini dimanfaatkan, ditentukan sendiri oleh pimpinan umum, di samping atas permohonan Majelis Luhur. Pimpinan umum hanya bertanggungjawab kepada Rapat Besar Umum.

Rapat Besar merupakan konferensi Majelis Luhur yang dihadiri oleh semua utusan lembaga pendidikan Taman Siswo di

seluruh Hindia Belanda. Rapat Besar diadakan sekali per tahun. Rapat besar diadakan untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Besar Umum dan selanjutnya mengatur semua persoalan yang belum diputuskan oleh Rapat Besar Umum. Majelis Luhur menjadi pengurus harian Taman Siswo dan kadang-kadang bila tidak ada Rapat Besar Umum dan hak leluasa sebagai kekuasaan tertinggi tidak bisa digunakan. Mereka memegang kekuasaan dan memperhatikan semua pesoalan organisasi serta bertanggungjawab atas ketertiban dan perdamaian sendiri, dan membuat laporan tentang aktivitasnya pada setiap Rapat Besar dan Rapat Besar Umum.

Majelis Luhur terdiri atas:

Badan Pemimpin, yakni lembaga yang memegang kepemimpinan. Dalam lembaga ini duduk tiga orang anggota. Salah satu dari ketiganya menjadi ketua yang sekaligus menjadi ketua Majelis Luhur. Badan Pemimpin mewakili Taman Siswo untuk kegiatan-kegiatan keluar. Secara garis besar mereka menjalankan aktivitas Majelis Luhur;

Badan Pemangku Azas, yakni lembaga yang mengawasi "pelaksanaan" prinsip Taman Siswo murni;

Badan Pemangku Benda, yakni lembaga yang mengawasi harta milik;

Badan Pengurus, yakni lembaga pengelola, yang memperhatikan penyelesaian semua persoalan dari lembaga yang disebut sub a, b dan c;

Juga dalam Majelis Cabang, yang terdiri atas anggota lembaga pendidikan (lokal), orang menjumpai pembagian

yang sama dalam badan seperti pada Majelis Luhur dengan kewenangan yang sama (dalam konteks cabang).

Dalam anggaran dasar dilarang menerima hadiah, yang bisa mengikat Taman Siswo baik ekstern maupun intern. Sebaliknya hadiah yang diberikan tanpa ada ikatan justru tidak boleh ditolak. Tidak boleh bantuan dimintakan dari orang lain karena hal ini akan mengganggu jalannya proses pendidikan.

Menurut laporan periode 1935-1936 Taman Siswo dalam periode itu memiliki 187 cabang, tersebar di seluruh Hindia Belanda. Jumlah murid dari 136 cabang ini mencapai 11.335 (8.350 Siswa dan 2.855 siswi). Dari periode 1936-1937 Taman Siswo menampung 184 cabang, dan dari 115 cabang, jumlah muridnya mencapai 9.015 termasuk 6.653 Siswa dan 2.362 siswi. Laporan periode 1937-1938 menyebutkan informasi berikut ini: jumlah cabang 190 dengan 225 sekolah; beberapa cabang dan sekolah masih menjadi calon karena belum diperiksa atas nama kepemimpinan pusat atau belum disetarakan.

Dari 190 cabang itu, ada 147 cabang di Jawa dan Madura yang dibuka, 37 di Sumatra, 4 di Borneo, 1 di Celebes dan 1 di Bali. Selama periode 1938-1939 Taman Siswo memiliki 187 cabang. Dari 160 cabang seluruh murid berjumlah 14.627 termasuk 10.476 siswa dan 3.881 siswi.

Semua cabang ini memiliki sekolah Taman Anak dan sebuah sekolah dasar dan/atau sekolah penghubung; selanjutnya ada 21 sekolah MULO, 7 sekolah guru dan 1 sekolah menengah. Juga beberapa cabang mengelola sebuah sekolah rakyat, sebuah sekolah rakyat khusus untuk gadis, sebuah sekolah pertanian

dasar dan/atau sekolah perdagangan, sebuah sekolah pekerjaan rumah dan sebagainya sebagai bentuk percobaan. Seluruhnya ada 733 tenaga pengajar, termasuk 100 guru perempuan dan 20 ribu pelajar termasuk 4 ribu siswi.

F. Penutup

Setelah melihat riwayat aktivitas politik RM Soewardi Soerjaningrat sejak sekolah di STOVIA hingga aktivitasnya di dunia pers, pembuangannya di negeri Belanda, serta pendirian lembaga pendidikan Taman Siswo, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut:

SS adalah orang yang bersikap sangat nasionalis. Ia dengan segala resiko yang ada berani mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan masyarakat bumiputera;

Sebagai seorang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, ia dengan segala upaya dan keahlian dirinya tidak segan-segan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dianggapnya tidak menghiraukan penderitaan yang dialami oleh kaum bumiputera;

Dengan keahlian dirinya dalam bidang jurnalistik, ia mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak sesuai dengan hati nuraninya. Walaupun dituduh sebagai penghasut, namun ia tetap merasa benar karena keyakinannya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Bahkan, ancaman pembuangan pun tidak membuatnya gentar;

Sebagai seorang yang nasionalis, ia tidak berhenti untuk belajar. Banyak hal yang dipelajarinya termasuk mengikuti

pelajaran sebagai pengajar. Banyak tokoh yang ia jadikan panutan, dari tokoh pendidikan Italia, India, maupun tokoh pendidikan lainnya;

Kesadaran dirinya bahwa pendidikan merupakan unsur yang sangat penting dalam mempersiapkan bangsa yang terbebas dari penjajahan merupakan titik tolak karier dalam hidupnya dalam bidang pendidikan. Sementara itu kehidupan politik ia gunakan sebagai pagar untuk melindungi pendidikan dari intervensi kolonial.

Sistem pendidikan yang didasarkan dari jati diri bangsa akan membuat bangsa yang mandiri, terlepas dari kungkungan bangsa Barat yang selama ini telah menciptakan pendidikan yang berorientasi pada kepentiangan kolonial.

Sistem *among* yang ia canangkan memiliki makna bahwa anak akan tumbuh secara leluasa. Pamong wajib *Tut Wuri Andayani* yang berarti mengikuti dan mempengaruhi agar anak asuh dapat berjalan ke arah yang baik. Dengan adanya sistem *among* ini, maka bebaslah anak mengembangkan bakatnya dan anak didik selalu mencari jalan sendiri tanpa menunggu perintah dari atasannya.

Dengan sistem pendidikan yang mengangkat budaya nasional, maka Perguruan Taman Siswo merupakan lembaga pendidikan yang meletakkan dasar pendidikan nasional Indonesia. Dengan mengelaborasi kekayaan kebudayaan nasional, maka nilai budaya daerah dan nasional tidak akan pernah luntur dalam kehidupan masyarakatnya. Permainan anak, lagu-lagu daerah, kesenian khas daerah merupakan kekakayaan

nasional yang dijunjung tinggi dan dipelajari dalam lembaga ini. Dengan upaya yang telah dilakukannya, pantaslah negara ini memberikan tempat yang tinggi dan terhormat bagi tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang mengelaborasi budaya bangsa Indonesia sebagai landasan dari sistem pendidikannya.

Jakarta, 26 Maret 2017

Daftar Rujukan

Arsip

* Arsip Taman Siswo nomor B21A, B21B Koleksi Nationaal Archief Nederland, Den Haag, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (fotokopi).
* Arsip *Taman Siswo* nomor B28 A, 28 B, 28C, dan 28 D koleksi Nationaal Archief Nederland, Den Haag, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (fotokopi).

Koran

* "Indische Partij" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad,* 12 September 1912, lembar ke-2.
* "Een Indische Partij dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 18 September 1912, lembar ke-2.
* "Indisch Parlement" dalam *De Sumtra Post,* 18 September 1913, lembar ke-2.
* "Grootheidsdroom" dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 17 Oktober 1913, lembar ke-2.

* “Die het gevaar Zoekt” dalam *De Preanger Bode,* 11 Agustus 1913. Lembar ke-2.
* “De interneering van den heer EFE Douwes Dekker” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 19 Agustus 1913, lembar ke-2.
* “Het Verbaningsbesluit” dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 29 Agustus 1913, lembar ke-2.
* “DD in Holland”, dalam *Bataviaasche Nieuwsblad.* 22 Oktober 1913, lembar ke-2.
* “De Sociaal Democraten en de Bannenlingen” dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 10 November 1913, lembar ke-2.
* “Van Kol over I.P” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad.* 3 Oktober 1913, lembar ke-2.
* “De Banneling Soewardi” dalam *Leeuwarder Courant,* 17 Juni 1915, lembar ke-1.
* “DD Naar Europe” dalam *De Sumatra Post,* 9 September 1913 lembar ke-2.

Buku

* Soewito, Irna H.N. Hadi. 1985. *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan.* Jakarta: Balai Pustaka.
* Harahap, HAH dan BS Dewantara. 1980. *Ki Hadjar Dewantara Dkk.* Jakarta: PT Gunung Agung.

RAWE-RAWE RANTAS MALANG-MALANG PUTUNG: JEJAK SOEWARDI SOERJANINGRAT HINGGA PEMBUANGAN

3

DJOKO MARIHANDONO

A. Pengantar

Setiap 2 Mei, bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional, yaitu suatu perayaan untuk mengingatkan bangsa ini bahwa bidang pendidikan merupakan suatu bidang yang sangat penting bagi kelanjutan, kejayaan, dan keagungan bangsa Indonesia. Tanggal ini sengaja dipilih sebagai hari Pendidikan Nasional karena pada tanggal ini seorang tokoh pendidikan lahir. Penghargaan yang tinggi diberikan oleh bangsa Indonesia kepada tokoh pendidikan Indonesia yang telah mengabdikan dirinya pada pendidikan di Indonesia, yakni Ki Hadjar Dewantara.

Ki Hadjar Dewantara semula memiliki nama Soewardi Soerjaningrat (SS). Sebelum mendharmabaktikan hidupnya dalam bidang pendidikan, ia banyak berkecimpung dalam bidang politik bersama-sama dengan teman seperjuangannya: Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (TM) dan Ernest François Eugène Douwes

Dekker (DD), yang nantinya juga dikenal sebagai Danoedirdja Setiabhoedi.[1] Tiga serangkai ini pernah dihukum dan dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai akibat dari tulisan-tulisan mereka yang disebarkan ke masyarakat pada masa itu. Apa yang ia lakukan dalam karier sepanjang hidupnya dijadikan panutan bagi generasi muda khususnya dalam mengatasi permasalahan yang ada pada zamannya. Tulisan ini hanya akan difokuskan pada tokoh SS saat sebagai pengurus Indische Partij hingga menjadi seorang pendidik yang mendirikan perguruan Taman Siswo.

B. Soewradi Soerjaningrat

SS dilahirkan pada 2 Mei 1889 di kampung Soerjadiningratan, yang letaknya berada di sebelah timur

1. Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, terdapat dua orang yang menggunakan nama Douwes Dekker. Yang pertama adalah tokoh yang memiliki nama lengkap Edouard Douwes Dekker yang dikenal dengan nama pena Multatuli. Ia dilahirkan di Amsterdam pada 2 Maret 1820, dan meninggal di Rhein (wilayah Jerman) pada 19 Februari 1887. Multatuli dikenal sebagai penulis buku novel yang berjudul *Max Havelaar* (1860). Jabatan terakhir yang diembannya adalah Asisten Residen di Lebak (Karesidenan Banten). Sementara itu, Ernest François Eugène Douwes Dekker dilahirkan pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan, dan meninggal di Bandung pada 28 Agustus 1950. Ia dikenal sebagai Penulis dan mantan pemimpin redaksi koran *Bataviaasche Nieuwsblad*. Ia dikenal sebagai pendiri Indische Partij, Saat kembali dari pembuangan, ia kembali ke Hindia Belanda dengan nama samaran Danoedirdja Setiabhudi. Pada saat pendirian Indische Partij, duduk dalam kepengurusan antara lain Douwes Dekker, van der Poel, Brunsveld van Hulten, Topee, Fundter dan Tjipto Mangoenkoesoemo (Lihat “Een vergadering der Indische Partij, dalam *Bataviaasche Nieuwsblad*, 19 September 1912, lembar ke-2.

puro Paku Alaman, Yogyakarta. Ia adalah putra keempat dari pasangan RM Soerjaningrat, putra dari dari permaisuri Sri Paku Alam III. Ibunya adalah seorang putri kraton sebagai pewaris Kadilangu, yang merupakan keturunan dari Sunan Kalijogo.[2] Pertemuannya dengan isterinya yang bernama Soetartinah diawali dengan peristiwa keduanya yang harus berhadapan dengan polisi kolonial, Wedana Sentana Puro Paku Alaman serta kepala sekolahnya msing-masing. Penyebabnya adalah SS harus berkelahi dengan anak Belanda yang menggangu Soetartinah.

Setamat dari Europeesche Lagere School (ELS), SS melanjutkan sekolahnya di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) yang berada di Weltevreden. Namun berhubung fisiknya yang kurang kuat, menyebabkan ia sering sakit-sakitan, sehingga beasiswa yang diterimanya harus dicabut sebagai akibat dari seringnya tidak masuk sekolah.[3] Selepas dari STOVIA, ia bekerja sebagai ahli kimia di pabrik gula Kalibagor,

2. Pasangan ini memiliki putra sebanyak 8 orang, yakni RM Soerjosisworo, RA Dokter Bintang, RA Pratiknyo, RM Soewardi Soerjaningrat, KRMT Soewarto Serjaningrat, RM Soemarman, RM Soerjodipoero, dan RM Soerjopranoto. (Irna HN Hadi Soewito, *Soewardi Soerjaningrat*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985, hlm. 13).
3. SS tidak tercatat sebagai lulusan STOVIA. Berdasarkan daftar lulusan terdapat beberapa siswa yang berasal dari Paku Alaman, antara lain: Dr. Raden Mas Soedjono, masuk 17 Juni 1889, lulus pada 19 Januari 1997, Raden Mas Notosoerasmo, masuk 22 Maret 1997, lulus 1 November 1907; Raden Mas Sosroprawiro, masuk 1 Maret 199 lulus 1 Oktober 1909; dan Raden Mas Gondhokoesoemo masuk 14 Desember 1905, lulus 28 Juni 1915 (A. De Waart.(Ed). *Ontwikkeling van het Geneeskundig Onderwijs te Weltevreden, 1851-1926, Perkembangan Pendidikan Kedokteran di Weltevreden: 1851-1926* (Terj. Djoko Marihandono dan Harto Juwono), Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2014:, hlm. 291-301)

Banyumas. Namun, tidak berapa lama bekerja sebagai ahli kimia, ia pindah ke kota Yogyakarta. Di kota ini, ia bekerja di apotik Rathkamp. Namun tidak lama ia bekerja di apotik itu, ia harus segera meninggalkan pekerjaannya karena di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Waktunya banyak tersita untuk melakukan korespondesni dengan berbagai macam surat kabar daerah, terutama dengan surat kabar *De Express.*[4] Selepas dari bekerja di apotik, ia memutuskan untuk bekerja sebagai jurnalis seperti apa yang digelutinya selama itu. Atas permitaan pemimpin redaksi *De Expres* Douwes Dekker, SS diminta untuk membantu koran terbitan Bandung itu. Dengan demikian, ia harus hijrah dari Yogyakarta ke kota Bandung.[5] Keduanya sudah lama saling mengenal tatkala Douwes Dekker masih bekerja sebagai redaktur di surat kabar *Bataviaasche Nieuwsblad* di bawah pimpinan J.H. Ritman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa banyak siswa STOVIA, terutama tokoh-tokoh Boedi Oetomo yang merasa cocok dengan DD yang tidak selalu sepaham dengan kebijakan pemerintah kolonial. Tatkala terjadi pergantian pemimpin koran itu dari J.H. Ritman ke Zaalberg, banyak di antara redaktur koran

---

4. Lihat laporan Residen Yogyakarta Liefrink yang berjudul *Nota de betreffende Geschriften van Douwes Dekker.*
5. Kedua tokoh ini sudah saling berhubungan. Tatkala Soewardi Sorjaningrat sekolah di STOVIA, Douwes Dekker dikenalnya sebagai redaktur koran *Bataviaasche Nieusblad*. Koran ini berada di bawah pimpinan seorang Belanda yang bernama JH Ritman. Surat kabar ini dikenal sebagai media cetak yang objektif, tidak selalu mengikuti garis kebijakan pemerintah kolonia.(Lihat Margono Djojohadikusumo. *Dr. EFE Douwes Dekker*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 28.)

itu yang merasa tidak sepaham dengan pemimpin yang baru itu. Atas alasan itulah DD menyatakan diri keluar dari *Bataviaasche Nieuwsblad* kemudian mendirikan majalah berkala yang berjudul *Het Tijdschrift*. Majalah ini bersama-sama dengan *De Express* menyeponsori berdirinya Indische Partij.[6]

Secara sadar dan dengan semangat yang menyala-nyala, SS mulai berkecimpung di arena politik di bawah bendera Indische Partij, yang menerima semua suku bangsa yang ada di wilayah koloni Hindia Belanda. Partai ini dia rasakan sangat berguna dalam upaya memajukan pendidikan karena tidak membedakan suku, agama, dan golongan dari mana anggota berasal.[7] Oleh karena itu, semangat persatuan dan kesatuan

---

6 Majalah ini selalu memberitakan aktivitas dari Indische Partij yang izinnya belum diberikan oleh pemerintah kolonial. Dilaporkan bahwa di Bandung partai ini memiliki 200 orang anggota, di Semarang 200 orang anggota, bahkan pada saat dilakukan rapat di Semarang yang dihadiri antara 400 – 500 orang partai baru ini berhasil mengumbulkan dana dari simpatisannya sebesar f 195, yang berasal dari 135 orang anggota. Di Surabaya, partai baru ini memiliki anggota sebanyak 600 orang. (Lihat "DD te Soerabaja" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie* 9 Desember 1912 lembar ke-2; "De Indische Partij" dalam *De Sumatra Post* 20 September 1912 dan *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie* 20 September 1912 lembar ke-2; "De Bandoengsche Verkieziezingstrijd" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad* 4 Desember 1912 lembar ke-2). Di Padang kepengurusan Indische Partij diketuai oleh FAN Loth, dr. Rivai sebagai wakil ketua, L. Ginus sebagai sekretaris, Lim Ek Tie sebagai bendahara, JC Holtzapffel Sr, J.P.C.A Alting Siberg, Jr, dan HHJB Mes sebagai komisaris.

7 Lihat "Grootheidsdroom" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 17 Oktober 1912. SS bersedia bergabung dengan Indische Partij karena ia menganggap partai ini akan memajukan pendidikan bagi seluruh bangsa di Hindia Belanda tanpa membedakan

serta memperjuangkan satu cita-cita menjadikan partai ini lebih memiliki kekuatan.

Indische Partij didirikan pada 6 September 1912 oleh DD, seorang indo dari ayah Eropa dan ibu Jawa, yang memiliki semangat nasionalis yang tinggi, bersama-sama dengan TM dan SS. Sejak awal, Indische Partij sudah menyatakan dirinya sebagai partai politik. Partai politik ini tidak hanya diminati oleh orang bumiputera, namun juga oleh orang-orang Indo yang tinggal di Hindia Belanda. Namun, dalam perkembangannya, orang Indo ini berdiri sendiri, melepaskan diri dari perkumpulan bumiputera. Gagasan ini sangat ditentang oleh DD. Sejak awal tiga serangkai ini telah berikrar untuk menanamkan rasa kebangsaan untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka. Penanaman jiwa nasionalisme inilah yang selalu ditanamkan oleh ketiganya terhadap para anggotanya.

Rawe-rawe rantas malang-malang putung merupakan semboyan yang tetap dipegang teguh terutama oleh ketiga pendiri partai ini. Semboyan ini mereka pertahankan dalam banyak peristiwa yang menimpa nasib mereka bertiga. Semboyan ini tertulis dalam lencana Indische Partij, sehingga semoboyan itu menjadi pedoman dan pegangan seluruh anggota partai tersebut. Semboyan ini merupakan gambaran semangat partai politik ini yang tidak mengenal kata menyerah, karena semua hambatan

suku bangsa maupun agama. Selain itu juga kekaguman SS pada Douwes Dekker yang mahir dalam menulis yang membuat ia senang bergabung di partai ini.

dan rintangan akan mereka hadapi. Begitulah semboyan ini tetap hidup dalam semua aktivitas partai yang masih muda usianya ini.

C. Comite Boemi Poetera

Perjuangan partai ini dimulai tatkala pemerintah kolonial Belanda hendak merayakan pembebasan negeri Belanda dari cengkeraman Prancis. Napoléon Bonaparte yang kalah perang dan ditangkap di Leipzig menyebabkan ia dibuang di pulau Elba. Dengan peristiwa ini maka dimulailah Traktat London I, yang salah satu pasalnya berbunyi mengembalikan Eropa pada kondisi tahun 1792 tatkala Napoléon Bonaparte belum melakukan ekspansionisme Napoléon atas seluruh wilayah Eropa. Berdasarkan kesepakatan itu, pada 15 Nopember 1813, Belanda dinyatakan bebas dari cengkeraman Prancis. Peringatan 100 tahun peristiwa pembebasan Belanda ini akan dirayakan secara besar-besaran di wilayah koloni Hindia Belanda. Oleh karena itu semua tidak hanya orang Belanda saja yang wajib merayakannya, namun juga penduduk bumiputera. Untuk menyambut pesta 100 tahun kemerdekaan Belanda ini, atas inisiatif TM, SS, Abdul Moeis, AH. Wignyodisastra dan beberapa tokoh lainnya dibentuklah suatu Komite Peringatan Seratus Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda yaitu *Inlandsche Comite tot Herdenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid (*Panitia Peringatan 100 tahun kemerdekaan Negeri Belanda) di

Bandung.[8] Komite ini dikenal sebagai *Comite Boemi Poetera.*[9] Tujuan dari komite ini adalah mempergunakan kesempatan untuk menarik perhatian perhatian umum. Hal ini akan dimanfaatkan untuk mengkritik pemerintah kolonial dan untuk melakukan propaganda menentang kebijakan pemerintah, karena menurut rencana, perayaan itu tidak hanya akan dirayakan oleh bangsa Belanda saja, tetapi juga juga oleh masyarakat bumiputera. Semua harus memberikan sumbangan yang dipungut secara paksa. Pemungutan sumbangan ini bertujuan agar pesta 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari kungkungan Prancis dapat dilaksanakan secara besar-besaran di wilayah koloni Hindia Belanda. Para anggota *Komite Boemi Putera* menghendaki agar pesta perayaan itu dilaksanakan di ruang tertutup. Banyak di antara para penduduk bumiputera yang bertanya, mengapa mereka harus ikut merayakannya. Mereka beranggapan bahwa kondisi ini merupakan penghinaan kepada bangsa terjajah. [10]

8. Lihat HAH Harahap dan BS Dewantara, *Ki Hajar Dewantara Dkk.* Jakarta: PT Gunung Agung, 1980,hlm.15.

9 Menurut *De Preanger Bode*, Komite Bumi Putera ini didirikan pada 13 Juli 1913 dengan susunan pengurus sebagai berikut: dr. Tjipto mangoenkoesoemo, Soejatiman Soeriokoesoemo dari Dinas Pekerjaan Umum, A.H. Wignja Disastra dari Kaum Muda, Nyonya Soeradji (terlahir Oneng), Roem pekerjaan dokter bumiputera, Abdoel Moeis redaktur Sarikat Hindia, dan Soewardi Soerjaningrat. Tujuan didirikannya komite ini adalah ingin mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda pada hari peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari tangan Prancis. (Lihat “Die het gevaar Zoekt” dalam *De Preanger Bode,* 11 Agustus 1913, lembar ke-2).

10. Asisten Residen di Bogor telah membentuk suatu panitia pengumpulan uang, sementara di kota lain, seperti di Malang, dengan bantuan para

Komite Boemi Poetra mengedarkan selebaran yang pertama. Selabaran itu bertuliskan *Wij zullen niet mee* yang artinya 'Kami tidak akan ikut serta' yang ditulis oleh DD sebelum ia pergi ke Belanda untuk menghadap ke Mejelis rendah. Berikut kutipan tulisannya:

> ….Mengapa kamoe tidak merajakan pesta ito di dalam kamar bolah dengan pantes-pantes, di tempat sendirian, di mana kamoe dapat minoem-minoem soepaja moedah akan berminoem atas kehormatan tanah ajermoe? Tentoe kamoe ta'akan mendengar setjara bentjih daripada kami dalam perajaan itoe, kerna kami tida haroes toeroet pesta, tentoe kamoe tida akan mendengar satjara salah seorang dari medan kami, jang soeka berpidato, seperti kehendak saja akan nantang pada kamoe begitoe tiadalah kamoe akan dapat melarang pada saja akan berpidato begitoe. Sjoekoerlah sekarang soedah banjak orang, jang djadi besar di dalam sekolah saja, ja'ni sekolah kemerdekaan.

Ja, Toewan-toewan commisie, mengapakah kamoe tidak bersoeka-soeka di medan kamoe ampenya kaoem sendiri…[11]

---

pamong praja Eropa dan bumiputera berusaha untuk mengumpulkan uang dari rakyat kecil agar dapat menyelenggarakan pesta yang meriah. (Lihat HAH Harahap dan BS Dewantara. *Loc. Cit.* hlm, 15-16.)

11 EFE Doewes Dekker, et al. *Mijmeringen van Indiers over Hollands Feesttervierderij in de Kolonie*, 1913, hlm. 2.

DD memprotes peringatan itu dan meminta agar perayaan itu dilangsungkan tanpa mengikutkan penduduk bumiputera.

Comite Boemi Poetra juga mempertanyakan akan mendirikan suatu *Kolonial Raad* atau Dewan Kolonial dengan anggota yang berjumlah 29 orang, dengan komposisi yang bukan wakil orang Eropa berjumlah 8 orang. Dari 8 orang tersebut, 5 di antaranya adalah kaum bangsawan. Setelah melakukan kritik terhadap *Kolonial Raad* yang baru dibentuk, Comite Boemi Poetra kemudian melakukan mobilisasi anggotanya untuk mengumpulkan uang yang akan dipergunakan untuk mengirimkan sebuah telegram kepada Ratu Wilhelmina di Belanda. Telegram ini intinya mengucapkan selamat atas perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari kaki tangan Prancis. Akhir dari telegram itu adalah pernyataan bahwa penduduk bumiputera pun juga menghendaki adanya Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Belanda.

Indische Partij menghendaki agar partai baru ini memperoleh status hukum di wilayah Hindia Belanda. Usulan pertama ditolak pada 6 Januari 1913 yang didasarkan pada hasil keputusan rapat tanggal 25 Desember 1912 setelah melalui perdebatan dalam pembuatan konsep anggaran dasar partai itu. Usulan kedua ditolak berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 4 Maret 1913 nomor 1. Setelah diubah anggaran dasarnya, pada 5 Maret 1913 DD mengajukan kembali anggaran dasar yang sudah diperbaharui. Kemudian untuk ketiga kalinya usulan ditolak melalui keputusan Gubernur Jenderal tanggal 11

Maret 1913 nomor 1. Dasar penolakannya adalah adanya pasal 111 yang seharusnya tidak boleh ada dalam Anggaran dasar Indische Partij, karena organisasi ini merupakan partai politik yang saat itu dilarang oleh pemerintah kolonial. Isi pasal 111 adalah tentang "Tujuan organisasi yaitu mendorong kepentingan lahir dan batin para anggotanya di setiap bidang dan pertumbuhan serta kemakmuran Hindia Belanda melalui sarana sah yang ada dan berusaha menghilangkan semua keterbelakangan dan ketentuan umum yang menghambat pencapaian tujuan itu, dan pembentukan lembaga serta ketentuan yang bermanfaat bagi tujuan itu". Pasal ini dianggap krusial karena dapat merusak tatanan yang sudah ditanamkan oleh pemerintah kolonial di wilayah koloni Hindia Belanda. Kedua, alasan penolakannya pemberian status hukum adalah karena Indische Partij dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.[12] Dengan penelokanan itu, DD akan segera pergi ke Belanda untuk menghadap ke Majelis Rendah untuk mengadukan penolakan pendirian Indische Partij setelah menghadap Gubernur Jenderal bersama dengan TM dan Van Ham.[13] Dua hari setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal, anggota Indische Partij berkumpul di Gedung Cabang Bandung. Hadir dalam rapat itu DD, Mr. Brunsveld van Hulten,

12. Lihat "Koloniale Zaken" dalam *De Sumatera Post*, 25 maret 1913 lembar ke-2 dan "RIP" dalam *De Preanger Bode",* 20 Maret 1913, lembar ke-1. Lihat pula *De Sumatra Post* 19 Maret 1913 lembar ke-2 yang berjudul "De regeering en de IP".

13 Lihat "De Indische Partij" dalam *De Sumatra Post*, 15 Maret 1913 lembar ke-2. Koran ini mengutip berita yang sudah dimuat terlebih dahulu di Koran *De Express.*

dan Agerbeek. Agerbeek membentak polisi yang datang, yang mengakibatkan semua hadirin disuruh meninggalkan gedung itu, kemudian gedung Indische Partij disegel dan dijaga polisi.[14] Hal tersebut juga terjadi di Batavia. Anggota Indische Partij cabang Batavia mengadakan rapat di gedung Loge setelah keluarnya surat keputusan itu. Pengelola gedung Loge memberitahukan bahwa atas permintaan dari pemerintah, gedung itu tidak boleh disewakan kepada Indische Partij.[15]

D. Als ik eens Nederlander was

Komite ini kemudian mengeluarkan brosur kedua yang ditulis oleh SS dengan judul *Als ik eens Nederlander was* atau "Seandainya aku seorang Belanda".[16] Dari tulisan ini, muncullah kehebohan yang luar biasa Brosur ini dikirimkan ke semua media yang terbit di Jawa saat itu. Harian *De Express* misalnya memuat secara utuh tulisan itu. Bahkan diketahui pula bahwa brosur tersebut dicetak di percetakan De Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij di bawah pimpinan van der Hoek, yang

14 Lihat "de Indische Partij" dalam *De Sumatra Post*, 18 Maret 1913 lembar ke-2. Pers Belanda pada umumnya sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Gubernur Jenderal. Hanya Koran *Het Volk* saja yang mengkritik kebijakan Gubernur Jenderal ini. (Lihat 'De Nederlandsche Pers over de Indische Partij" dalam *De Sumatra Post*, 8 Maret 1913).

15 Lihat "Indische Partij" dalam *De Sumatra Post*, 8 Maret 1913 lembar ke-2.

16 Selebaran ini dicetak oleh NV. Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij, yang dipimpin oleh Van der Hoek sebagai direkturnya. Selebaran ini bias diperoleh dengan membayar f 1 sen. (Lihat "Zig-Zags" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlnadsch Indie.*, 26 Juli 1913.

juga menerbitkan harian *De Express*. [17] Isi brosur itu intinya antara lain:

Bangsa bumiputra Hindia seyogyanya tidak ikut serta dalam merayakan peringatan kemerdekaan bangsa Belanda, yang saat itu sedang menindas kaum bumiputera;

Andai kata SS seorang Belanda, ia akan memprotes gagasan peringatan itu, karena kebijakan itu salah. protesnya, karena itu kebijakan yang salah. Ia akan menyalahkan bangsanya bahwa merayakan peringatan itu sangat berbahaya, karena akan menyadarkan kaum bumiputera untuk merdeka;

Andaikata ia orang Belanda, ia tidak akan menghina dan menindas kaum bumiputera;

Andaikata ia orang Belanda, ia akan meminta sumbangan kepada semua orang Belanda yang tinggal di wilayah koloni Hindia Belanda, dan tidak akan mengikutsertakan kaum bumiputera karena kondisi mereka saat itu tertindas;

Sebagai bangsa yang tertindas, dengan perayaan itu, kaum bumiputera memiliki keinginan untuk merdeka seperti yang dialami oleh orang belanda pada saat itu;

Ia sebagai seorang seorang bumiputera sebagaimana juga orang Belanda, juga mencintai tanah airnya sepenuh hati. Oleh karena itu, peringatan perayaan itu sangat menyakitkan hati kaum bumiputera. Di akhir tulisannya ia mengatakan sbb:

17 Berdasarkan data yang ada, brosur ini dicetak sebanyak 5.000 eksemplar , yang ditulis dengan dua versi, yakni bahasa Belanda dan bahasa Melayu.

….Andaikata akoe seorang Belanda, akoe tidak akan merajakan perajaan itoe di dalam negeri jang sedang kami djadjah. Pertama, kami haroes memberikan kemerdekaan kepada rakjat jang kami djadjah, kemoedian baroe memperingati kemerdekaan kami sendiri……[18]

Dalam bagian akhir tulisannya SS bersyukur bahwa dia tidak dilahirkan sebagai orang Belanda.

Reaksi pemerintah Kolonial Belanda emosional. Pada 20 Juli 1913, pihak Kejaksaan mulai menyita brosur-brosur itu, dan memusnahkannya. TM, SS dan Abdoel Moeis diminta segera menghadap Jaksa Tinggi (*Officier van Justitie)* Mr. Monsato yang secara sengaja didatangkan dari Batavia untuk memeriksa mereka sebagai saksi.[19] Pada saat didengar keterangannya SS mengakui terus terang bahwa ialah yang menulis dalam brosur itu. Akhirnya, ia dinyatakan melanggar Undang-Undang Percetakan pasal 26 yang intinya sanksi bagi mereka yang mengadu domba antargolongan yang ada di dalam negeri. SS dianggap membakar semangat dengan mengadu domba antargolongan yang ada di wilayah Hindia Belanda, dan langsung ditahan.[20] Dikabarkan

18 Lihat Dra. Irna H.N. Hadi Soewito. *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm 29. Pengarang buku ini mengutip dari tulisan EFE Douwes Dekker *Mijmeringen van Indiers over Hollands Feesttervierderij in de Kolonie,* 1913, hlm. 68-73.

19 Lihat "Het Masker af" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 6 Agustus 1913, lembar ke-2.

20 *De Preanger Bode* dalam tulisan berjudul "Toelichting" terbitan 31 Juli 1913 memaparkan tentang penangkapan keempat anggota Komite

oleh De Preanger Bode bahwa penangkapan itu dilakukan secara tiba-tiba. Semuanya berlangsung serba cepat. Satu setengah kompi pasukan dari Cikudapateuh dikirim untuk penangkapan itu. Pasukan berada di bawah komando Letnan den Hartig yang ditempatkan di sebelah timur stasiun , sementara di bengkel kereta api SS di sebelah barat berada di bawah komando Letnan de Voogt. Beberapa gedung penting pemerintah seperti: kantor pos, kantor telepon, rumah bupati, gedung residen dan kantor asisten residen serta penjara dijaga ketat. Bahkan di Cimahi pada peristiwa penangkapan itu disiagakan kesatuan kavaleri untuk melindungi jalur telegraf dan telepon.[21]

Tentu saja, tuduhan itu langsung disangkal oleh yang bersangkutan. Namun, proses hukum tetap berjalan, dan dia memperoleh peringatan jeras untuk tidak mengulangi perbuatannya. Alasannya adalah dapat menganggu keamanan dan ketenteraman semua bangsa di Hindia Belanda. Namun, SS menyangkal terus tuduhan itu dengan alasan bahwa ia kurang mengerti atas tuduhan menghasut dengan tulisan *Als ik eens Nederlander was.* Ia membela diri bahwa yang ia tulis itu sama dengan yang dirasakan oleh kaum bumiputera. Berhubung tulisan ini dibuat dalam dua Bahasa, Belanda dan Melayu, maka semua penduduk bisa membaca dan memahami tulisan itu.

Bumi Putra gara-gara tulisan *Seandainya aku orang Belanda.* Tulisan ini dianggap menghasut dan meresahkan masyarakat. Empat orang yang ditangkap adalah TM, SS, Abdoel Moeis, dan sekretaris Wignjadisastra.

21 Lihat "Een Arrestatie" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie,* 31 Juli 1913, lembar ke-2.

Dengan demikian ia dianggap menghasut yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Lain SS lain pula TM. Ia tidak mau memberikan keterangan apa pun kepada Jaksa, karena dianggap bertentangan dengan kode etik dalam undang-undang pers. Ia bahkan diingatkan oleh jaksa bahwa sebelumnya telah terjadi kasus yang mirip dengan peristiwa itu, yang menyangkut kasus Redaktur Kepala surat kabar *De Locomotief* Vierhout yang tidak mau menyebutkan siapa penulis artikel di dalam koran itu. TM tidak mau menanggung resiko. Akhirnya ia berjanji untuk menyebut nama-nama orang yang ikut serta dalam penyebaran brosur-brosur itu. Abdoel Moeis termasuk orang yang dipanggil untuk dimintai keterangannya. Ia mengakui bahwa ialah yang menerjemahkan tulisan itu dari Bahasa Belanda ke Bahasa Melayu. Akhirnya Abdoel Moeis dilepas karena hanya dianggap sebagai seorang pembantu pelaksana saja.

Untuk menampik tulisan SS *Als ik eens Nederlander was*, terbit tulisan yang mirip sama di koran *De Preanger Bode*, tulisan yang berjudul *Als ik eens Inlander was*, yang ditulis oleh H. Mulder. Banyak kata kotor muncul dalam tulisan yang bergaya kasar ini. Bahkan, banyak kalangan para penduduk Belanda yang tidak dapat menerima tulisan ini. Beruntung Menteri Koloni Pleyte dalam sidang Parlemen Belanda menyatakan bahwa ia merasa muak membaca tulisan yang sangat kasar itu.[22]

22. Lihat tulisan DMG Koch. *Menuju Kemerdekaan, Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942*. Terjemahan Abdoel Moeis: *Om de Vrijheid),* Jakarta, Jajasan Pembangunan, 1941, hlm. 53.

Setelah pemeriksaan terhadap tulisan SS berakhir, pada 21 Juli 1913 ketiga anggota Komite dipanggil kembali untuk diperiksa. Namun dari pemanggilan itu, tidak ada perubahan apa pun dari berita acara yang dibuat pada hari sebelumnya. Anggota komite berpendapat bahwa pemanggilan oleh pihak kejaksaan menunjukkan bahwa pemerintah merasa terusik dan menganggap bahwa peristiwa yang lebih besar bias terjadi. Oleh karena itu sebagai insan pers, setidaknya TM dan SS ingin menjajagi lebih dalam lagi bagaimana reaksi pemerintah di Batavia mendudukkan permasalahan ini. Berhubung tidak ada kelanjutan apa-apa setelah pemanggilan itu, pada 26 dan 28 Juli 1913 keluarlah tulisan mereka berdua di *De Express*. Pada 26 Juli muncul tulisan TM yang berjudul *Kracht of Vrees,* (Kekuatan atau Ketakutan). Kemudian pada 28 Juli 1913 muncul tulisan SS yang berjudul *Een voor Allen, Allen voor Een* (Satu untuk semuanya, semuanya untuk satu). Dalam tulisannya ini SS berpendapat bahwa apa yang ia tuliskan mewakili perasaan kaum bumiputra Walaupun sebagian besar masyarakat diam seribu bahasa, namun di balik itu semua dirasakan oleh semua bumiputra termasuk TM dan SS.

Dalam tulisannya itu, SS mengajak kaum bumiputra untuk bersikap tenang, dan selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Berikut sebagian isi tulisannya itu:

> …. Kita haroes mempoenyai kekoeatan dan kepribadian dalam menghadapi perdjoeangan nasional ini. Djika

tidak, maka selamanja saoedara-saoedara akan tetap menjadi boedak! Lepaskan diri dari perboedakan ini!.

E. Penghuni Hotel Prodeo

Pada 30 Juli 1913 secara tiba datang polisi yang mengepung rumahnya, dan menangkap SS. Pemerintah telah memutuskan untuk menangkap dan menahannya. Selain Soewardi, dr. Tjipto juga ditangkap dan ditahan bersamanya. Dikerahkan polisi Belanda dan polisi Ambon yang bersenjata lengkap untuk menahannya. Selain mereka berdua, Abdoel Moeis dan AH. Wignyadisastra pun tidak luput dari penangkapan polisi, karena mereka berdua bekerja sebagai komisaris Komite. Mengingat bahwa Abdoel Moeis dan Wignjadisastra hanya sebagai pembantu, dr. Tjipto melakukan protes atas penangkapan mereka berdua. Berdasarkan protes inilah Abdoel Moeis dan Wignjadisastra dibebaskan kembali.

Beberapa hari setelah itu, tepatnya pada 1 Agustus 1913, DD tiba kembali ke tanah air setelah beberapa mengunjungi negeri Belanda untuk menjelaskan status dari partai yang didirikannya Indische Partij di depan sidang Majelis Rendah Belanda. Setelah mengetahui apa yang terjadi atas tulisan dua sahabatnya itu, ia menulis di *De Express* terbitan 5 Agustus 1913 yang berjudul *Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en RM Soerjadi Soerjaningrat* (Pahlawan-pahlawan kami: Tjipto Mangoenkoesoemo dan RM Soewardi Soerjaningrat). Tulisan itu menjelaskan siapa sebenarnya dr. Tjipto Mangoenkoesoemo.

Ia adalah orang yang sangat kuat kepribadiannya, dan dikenal sebagai orang yang taat pada prinsip yang diyakininya. Atas jasanya keyika menumpas penyakit pes, ia dianugerahi bintang tertinggi *Ridder in de Orde van Oranje Nassau* (Bintang Ksatria dari Kerajaan Belanda), atas jasanya menumpas penyakit itu yang menjalar di Surabaya, Malang dan Pasuruan pada April 1911.[23] Tulisan DD ditujukan untuk memberikan klarifikasi tentang siapa-siapa sebenarnya kedia tokoh yang telah ditahan oleh kejaksaan.

Dengan ditahannya TM dan SS dipenjara, Douwes Dekker menulis sebagai berikut:

> …..Bagaimanapoen djoega, teman-temankoe Tjipto dan Soewardi, karena sikapnya jang berani di dalam pendjara mereka tidak merasa terpoekoel djatoeh dan merasa berbahagia demi kekoeatan bangsa Hindia.[24]

Sejak munculnya tulisan Soewardi yang pertama yang menghebohkan masyarakat, *Comite Boemi Poetra* tidak diizinkan lagi mengadakan kegiatan apa pun. Semua isi koran yang sudah terbit diperiksa dan mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Setelah beberapa lama, hanya berita resmi saja yang diizinkan untuk diterbitkan dalam koran.

Alasan penahanan SS adalah bahwa ia yang menulis brosur selebaran yang dianggap dapat mengganggu ketertiban

23. Lihat Tjipto Mangoenkoesoemo. *De Pest op Java en Hare Bestrijding*. Catatan rapat umum pada 10 Januari 1914 di s'Gravenhage.
24. EFE Douwes Dekker, *op.cit.* hlm. 79.

masyarakat dan keamanan umum. Namun dalam dakwaannya SS ditahan karena peranannya sebagai sekretaris dan bendahara *Comite Boemi Poetra*. Oleh karena itu, dampak lain dari penahanan itu adalah dibekukannya komite itu. Sementara itu, penahanan TM didasarkan pada dakwaan yang tidak berdasar. Untuk mengubah sikap TM, pemerintah mencoba untuk melakukan pendekatan pada ayahnya yang saat itu menjadi direktur *Hoogere Burger School,* yakni sekolah setingkat SMA pada zaman Belanda. Tujuannya adalah untuk membujuk agar TM tidak bersikap ekstrem. Namun ayahnya menolah untuk melakukan itu.

Upaya kedua dilakukan dengan menawarkan kepada adik TM untuk dapat sekolah di HBS secara gratis. Namun, bujukan itu pun ditolaknya. Pemerintah kolonial tidak habis akal untuk membujuk dr. Tjipto mangoenkoesoemo yang telah mendapatkan bintang dari Sri Ratu Belanda. Melalui R. Soemarsono seorang jaksa di Purwakarta yang merupakan teman baiknya dan dr. Hazeu yang menjabat sebagai *Adviseur voor Inlandsche Zaken* (Penasehat urusan bumiputera) menyarankan agar TM mengajukan grasi agar tidak ditahan. Namun usaha ini ditolaknya.

Selama masa penahanan itu, SS mengalami sakit demam tinggi, yang perlu segera ditangani oleh dokter, Permintaan ini pun tidak dikabulkan oleh sipir penjara. Bahkan istrinya yang bernama RA. Soetartinah yang datang dari Batavia tidak diizinkan untuk menengok suaminya. Ia diharuskan memperoleh

izin dari Gubernur Jenderal. Nasib yang sama dialami ayahnya, secara khusus datang dari kota Yogyakarta, hanya diizinkan untuk menemuinya selama 15 menit dengan didampingi oleh komisaris polisi.

Beberapa upaya dilakukan agar SS dan TM bersedia untuk meminta maaf kepada pemerintah kolonial Belanda. Namun mereka tidak mau. Kedua tokoh ini tetap tegar tidak mau menuruti apa yang dikehendaki oleh pemerintah kolonial. Nasehat yang diberikan oleh ayahnya pun dia terima. Namun SS tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau diminta untuk mengundurkan diri dari semua kegiatan partai politik. Bahkan dia mengajak seluruh keluarga agar merasa bangga bahwa salah satu keluarganya dipenjara berkat pendiriannya yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. TM dan SS sepenuhnya menyadari bahaya dan resiko yang akan mereka hadapi sebagai akibat dari sikap keras mereka itu.

DD melihat kedua sahabatnya ditahan, ia tidak tinggal diam. Ia menulis di koran beberapa kali demi membela kedua sahabatnya itu. Akhirnya DD dituduh melanggar pasal 47 undang-undang pemerintah kolonial Belanda yakni menganggu keamanan dan ketertiban umum, dengan melakukan propaganda yang menghasut masyarakat dan dianggap merugikan pemerintah kolonial pada khususnya dan pemerintah negara induk pada umunya. Hal yang paling membuat marah penguasa, ketika ia menulis tentang *Brieven van de Koningin* (Surat-surat untuk Ratu). Surat ini dianggap telah memprovokasi masyarakat

untuk melakukan pemeberontakan terhadap pemerintah. Akhirnya, DD mengalami nasib yang sama dengan kedua sahabatnya, yakni ditangkap dan diadili.[25] Walaupun di dalam proses pengadilan pemerintah tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan kepadanya, namun ia tetap ditahan hingga 11 Agustus 1913. Ia ditahan di rumah tahanan di Weltevreden. Pada 11 Agustus ia dihadapkan Residen Batavia H. Rijfsnijder, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan dengan syarat tidak akan memprovokasi masyarakat dengan tulisan-tulisannya.

Namun apa yang disyraratkan pada EFE Douwes Dekker tidak dipatuhinya. Ia tetap mengkritik penahanan kedua sahabatnya itu, yang menyebabkan ia segera ditangkap dan dipenjarakan bersama dengan kedua sahabatnya itu. SS mencoba menenangkan sahabat-sahabatnya bahwa perjuangan mereka akan tertoreh pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Perang urat syaraf antara mereka yang dipenjara dengan masyarakat di luar penjara terjadi. Desas-desus mengenai rencana pembuangan mereka pun dihembuskan bahwa mereka akan dibuag ke Fak-Fak Papua, atau ke Ambon atau bahkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Namun mereka bertiga tetap tegar dan pantang menyerah, karena di dalam penjara pun mereka tetap menulis dan memprotes kebijakan pemerintah kolonial.

Berhubung himbauan pemerintah tidak dihiraukan, bahkan di dalam penjara pun mereka bertiga masih tetap

25. Lihat “Optreden der regeering” dalam *De Preanger Bode*, 5 Agustus 1913, lembar ke-2.

melakukan provokasi politik, maka pada 18 Agustus 1913, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan kepada ketiga tokoh ini. Atas persetujuan *Raad van Nederlandsch Indie,* pemerintah memutuskan untuk menghukum ketiga tokoh ini dengan dijauhkan dari masyarakat yakni dengan cara dibuang, dengan alasan demi keamanan dan ketertiban umum. *Raad van Justitie* telah memutuskan bahwa ketiganya akan dibuang ke luar pulau Jawa. Berdasarkan keputusan pemerintah pasal 1 tanggal 18 Agustus 1913 nomor 2 a, dan berdasarkan pasal 47 peraturan tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda demi keamanan dan ketertiban umum, diputuskan:

- TM akan dibuang ke pulau Banda, karesidenan Amboina;
- SS dibuang ke pulau Bangka; dan
- DD dibuang ke Kupang, karesidenan Timor. [26]

Dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan mereka harus segera mengemas barang-barangnya untuk segera menjalani pembuangannya. Namun berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila mereka menginginkannya, mereka dapat dikirimkan ke Negeri Belanda sebagai tempat pembuangannya. Permintaan ketiga tokoh ini dikabulkan untuk dibuang ke negeri Belanda dengan harapan dapat melanjutkan kegiatan politik mereka. Asumsi para pemegang keputusan di wilayah koloni, bahwa dengan dibuang ke Belanda, mereka akan berhadapan dengan tokoh-tokoh politik lainnya dan akan terlindas oleh lawan-

26. Lihat “Het Verbaningsbesluit” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie.* 29 Agustus 1913 lembar ke-1.

lawan politik mereka yang sudah senior dan memiliki reputasi dunia. Dengan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permintaan mereka untuk dibuang ke negeri Belanda dengan ketentuan 30 hari setelah keputusan dibacakan, mereka segera diberangkatkan ke negeri Belanda. Ketiga terhukum tersebut, walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan hukum dengan mengajukan banding, namun usaha mereka untuk banding gagal. Hal ini menyebabkan rekan seperjuangan mereka seperti dr. Wahidin Soedirohoesodo, H. Oemar Said Tjokroaminoto melakukan protes kepada pemerintah atas keputusan pembuangan itu. Selain teman seperjuangan mereka, dari Belanda pun muncul reaksi yang keras baik dari partai Buruh Sosial Demokrat (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij*, dari rekatur majalah *Theosofie* juga melakukan protes.[27] Namun, keputusan telah dijatuhkan dan mereka bertiga harus segera menjalani hukumannya. Selain hukuman yang dijatuhkan kepada ketiga tokoh ini, *Comite Boemi Poetra* juga dibubarkan dan dianggap sebagai suatu organisasi yang terlarang di wilayah koloni Hindia Belanda.

F. Perjalanan menuju Pengasingan

Pada 6 September 1913 tiga serangkai ini, TM, SS

27. Mr.Toelstra, telah mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal bahwa Partai Sosial Demokrat tidak menyetujui penahanan dan pembuangan ketiga tokoh ini. Liht "Nog een Verrassing" dalam *De Tijd,* 4 November 1913, lembar ke-2.

bersama isterinya, dan DD beserta isteri dan anak-anaknya berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok di Batavia menuju ke negeri Belanda, sebagai tempat pembuangannya melalui Singapura.[28] Namun keberangkatannya mengalami penundaan, sehingga dikhawatirkan batas waktu keberangkatan ke tempat pengungsian akan terlewati. Pada 13 September 1913, kapal mulai meninggalkan pelabuhan Tanjuk Priok. Dari atas kapal Melchior Treub[29], sebuah kapal milikmaskapai pelayaran Jerman, yang akan membawa mereka ke Belanda, SS masih sempat menulis pesan yang disampaikan kepada kawan-kawannya yang mengantarnya dari pelabuhan Tanjung Priok. Pesan itu diberi judul "Vrijheidsherdenking en Vrijheidsberooving" (Peringatan Kemerdekaan dan Perampasan Kemerdekaan). Beberapa saat sebelum kapal bergerak, ia menerima kabar dari kawan-kawannya bahwa uang sumbangan yang telah terkumpul telah dikembalikan kepada para donaturnya.

Sesampainya di negeri Belanda, mereka hidup dengan menggunakan uang yang diperoleh dari sumbangan teman-teman mereka yang telah membentuk suatu badan pengumpul dana yang diberi nama TADO yang merupakan singkatan dari *Tot Aan De Onafhankelijkheid* (Sampai Kemerdekaan Tercapai),

28 Lihat HAH Harahap dan BS Dewantara. *Ki Hadjar Dewantara Dkk.* Jakarta: PT Gunung Agung, 1980, hlm. 148.Lihat pula "DD Naar Europe" dalam *De Sumatra Post*, 9 September 1913 lembar ke-2.

29 Sumber lain mengatakan bahwa mereka bertiga diangkut dengan kapal *Bulow* dari pelabuhan Tanjung Priok. Lihat Irna HN Hadi Soewito *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan.* Jakarta: Balai Pistaka, 1985, hlm. 54.

yang memberikan uang bantuan beaya hidup bagi para buangan itu. Dari dana TADO ini, untuk keperluan sehari-hari SS dan TM f 150 per bulan. EFE Douwes Dekker bersama isteri dan dua orang anaknya menerima f 250 per bulan. Tentu saja beaya sebesar itu tidak akan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu mereka juga memperoleh bantuan dari teman-temannya yang sedang belajar di negeri Belanda yang secara spontan mengirimkan beras, pakaian, serta peralatan rumah tangga.[30]

G. Kegiatan selama di Belanda

Kehadiran ketiga buangan politik ke Belanda disambut musim salju yang mulai turun dan suasana politik yang memanas sebagai akibatd ari dimulainya Perang Dunia I di Eropa. Kegiatan pertama yang mereka lakukan adalah mencari tempat tinggal agar mereka dapat segera berlindung dari serangan hawa dingin. Dengan uang yang pas-pasan, mereka berhasil menemukan tempat tinggal di lantai paling atas dari suatu apartemen. Uang yang mereka peroleh dari dana TADO yang berasal dari Indische Partij, sangat bermanfaat bagi mereka. Dari dana tersebut, keluarga SS dan TM masing-masing menerima f 150 per bulan. DD bersama isteri dan anak-anak mereka menerima f 250 per bulan. Kondisi itu diketahui oleh kaum bumiputera yang sedang melanjutkan sekolahnya di Belanda, seperti Gondowinoto,

30. Lihat “DD in Holland”, dalam *Bataviaasche Nieuwsblad.* 22 Oktober 1913, lembar ke-2.

yang juga masih berkerabat dengan Sri Paku Alam. Keluarga SS menerima bantuan beras dan pakaian serta sekadar peralatan rumah tangga dari Gondowinoto. Kondisi ini mendorong orang Belanda yang simpati pada perjuangan kaum bumiputera datang kepada keluarga SS, namun semua tawaran yang baik itu ia tolak. Demikian juga tawaran bantuan datang dari Van Deventer yang menawarkan kepada SS agar bersedia menjadi guru di HIS (*Hollands Inlandsche School*) di pulau Bangka dengan pencabutan status hukuman buangnya dan iming-iming gaji yang tinggi, namun tawaran itu tetap ditolaknya. [31]

Kondisi kehidupan SS beserta isterinya semakin memprihatinkan. Cadangan uang dari bantuan TADO sudah semakin menipis. Ketiga tawanan politik ini telah bersepakat bahwa mereka tetap akan berkecimpung dalam bidang jurnalistik. Oleh karena itu mulailah mereka menulis kembali yang akan dikirimkan ke pelbagai surat kabar di negeri Belanda. Tentu saja tulisan yang berbau propaganda ini akan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam kondisi keuangan yang sangat kritis, timbul gagasan dari isterinya kalau ia akan mengiktu tes untuk menjadi guru taman kanak-kanak Fröbel School di Weimar, Den Haag. Dengan bekerjanya Soetartinah, isteri SS sebagai guru taman kanak-kanak, kondisi ekonomi mereka mulai membaik. SS dan TM mulai berkonsentrasi

31. Kesediaan SS sebagai guru HIS di Bangka akan membebaskan dirinya dari hukuman buang. Bila ia bersedia, ia akan menerima gaji sebesar f 200 per bulan, dan masih dapat dinegosiasikan tambahan gajinya, asalkan ia mau menjadi pengajar di HIS di pulau Bangka.

untuk memberikan kontribusi mereka dalam bidang jurnalistik. Walaupun isteri SS sudah bekerja, namun berhubung kondisi negeri Belanda sendiri sedang dalam kondisi perang akibat dari mulainya Perang Dunia I, kondisi persuratkabaran Belanda juga goyah, sehingga penghasilan mereka masih belum cukup. Kondisi yang semakin memburuk menyebabkan kebiasaan mereka makan nasi setiap hari harus diganti dengan roti, karena harga beras di negara itu cukup mahal. Bantuan dan tawaran kerjasama mereka tolak karena alasan tidak ingin terikat, Jadi SS maupun TM telah bersepakat untuk menerima kondisi apa adanya, asalkan bebas dan tidak terikat oleh kepentingan orang lain.

Bantun dari tanah air juga mengalir secara spontan. HOS Tjokroaminoto sebagai ketua umum Serikat Dagang Islam dan pimpinan harian *Oetoesan Hindia* sepakat untuk mengirimkan uang dari tanah air sebesar f 25 per bulan untuk menambah kebutuhan sehari-hari kedua tokoh itu. Dalam kondisi yang semakin terpepet, DD berhasil memperoleh bantuan dari pemerintah melalui Menteri Koloni FHT Pleyte. Berdasarkan surat dari Menteri Koloni, DD akan menerima tambahan uang sejumlah f 175 sebulan dari Gubernur Jenderal di Batavia sebagai bantuan selama ia dibuang. SS juga akan menerima tambahan uang sebesar f 75 sebulan dan TM akan menerima tambahan uang sebesar f 125. Setelah pembayaran berakhir sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam surat itu, mereka diizinkan untuk

meminta perpanjangan bantuan itu, hingga statusnya sebagai tahanan buangan berakhir.

Dalam kondisi ekonomi yang menghimpit akibat terlalu sedikit uang yang diterimanya, mereka bertiga telah bersepakat untuk menulis guna mengisi pendapatan mereka, khususnya guna menyambung kehidupan sehari-hari. Sejak masih di tanah air, memang mereka dikenal sebagai penulis yang ulung. TM dikenal sebagai penulis yang sangat lugas, bahasanya pendek-pendek dan dengan mudah dapat dicerna oleh pembacanya. DD dikenal sebagai penulis yang sangat kritis, yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Tulisannya selalu menyerang lawan-lawannya secara telak, sehingga orang sangat kagum dengan kemampuan yang dimilikinya. Bahkan oleh penulis lainnya ia mendapatkan julukan *oproermaker* (si Pemberontak). Demikian pula SS, yang menghebohkan di tanah air berkat tulisannya yang berjudul *Seandainya Aku Orang Belanda"* yang mengakibatkan mereka bertiga ditahan dan dibuang di negeri Belanda.

Atas bantuan dari Partai Buruh Sosial Demokrat (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij)*, DD diberikan kesempatan untuk memberikan caramah di Paleis voor Volkvlift di Amsterdam. Ceramah itu mendapatkan banyak simpati dari partai tersebut karena berisi tentang protes terhadap kolonialis. Tentu saja partai Demokrat merasa senang karena ceramah itu berisi tentang kritikan terhadap pemerintah yang saat itu berkuasa. Dengan ceramah tersebut, partai Demokrat semakin

banyak mengkritik pemerintah, terutama atas terjadinya ktidakadilan antara penduduk bumiputera dan kaum kolonial.

Pada kesempatan lain, ketiga orang buangan ini diminta untuk memberikan ceramah di Gedung Diligentia di Den Haag[32]. Acara itu dihadiri oleh banyak orang karena ada 3 orang buangan dari Hindia Belanda yang akan memberikan ceramah di gedung tersebut. Ketiganya menjadi tokoh yang dibicarakan dalam baik dalam koran lokal di Hindia Belanda maupun koran-koran di Belanda. Oleh panitia ketiganya dijajar di podium. TM duduk di sebelah kiri disampinya SS beserta isteri, dan kemudia DD didampingi isterinya, sehingga ketiga tokoh ini tampah dengan jelas dari kejauhan. Pada kesempatan ini DD diberikan kesempatan untuk pertama berbicara. Ia mengemukakan falsafah yang kemudian dikenal banyak orang, yakni *Onhoorbar groeit de padi* 'Padi tumbuh tanpa suara'. Ia mengumpamakan gerakan nasional di Hindia Belanda tumbuh bagaikan padi yang sedang tumbuh. Giliran TM tampil di mimbar. Dengan gayanya yang khas, ia mengemukakan tentang rakyat di Hindia Belanda yang ingin merdeka, bebas dari cengkeraman penjajah. Ia berbicara dengan nada yang halus, tanpa ada rasa dendam sedikitpun kepada bangsa Belanda. Giliran SS berbicara sebagai pembicara

32 Dalam kegiatan itu DD menjelaskan kaitan antara Indische Partij dan penahanannya. Pidato DD disambut dengan baik dalam ceramah di gedung Diligentia, yang disewa untuk keperluan itu. Dilaporan bahwa ketiga tahanan politik itu dengan gambling telah menjelaskan proses sejak awal hingga mereka dibuang ke negeri Belanda. (Lihat "DD in Holland" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad,* 22 Oktober 1913 lembar ke-2).

ketiga. Dengan kepribadiannya yang halus ia menjelaskan mengapa mereka bertiga sampai menjadi orang buangan di negeri Belanda.

Banyak orang yang menghendaki agar pertemuan seperti itu sering diselenggarakan. Permintaan itu muncul karena pera hadirin banyak yang tidak memahami apa yang terjadi di wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itu, atas kesepakatan bersama mereka membuat sebuah majalah yang ditujukan bagi para pemuda di Hindia Belanda. Majalah itu diberi nama *De Indiër*, yang dipimpin oleh TM. Pada edisi pertama dimuat tulisan DD dan TM, yang menjelaskan bahwa majalah ini merupakan kelahiran kembali Indische Partij yang telah dibubarkan sebelum mereka diberangkatkan dengan paksa ke Belanda.[33] Sementara itu SS meluruskan pandangan pendapat kebanyakan orang Belanda tentang kondisi di Hindia Belanda. Hal ini ia tegaskan karena informasi yang ada di Belanda tidak sesuai dengan kenyataannya di wilayah koloni. Ia lebih sening untuk berkeliling di beberapa wilayah di Belanda untuk memberikan ceramah tentang kondisi yang sebenarnya terjadi di tanah air. Kegiatan Ss beserta kawan-kawannya mendapat bantuand ari *Algemeen Nederlands Verbond (*Perkumpulan Umum di negeri Belanda), *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (Partai Buruh Sosial Demokrat) yang saat itu beroposisi dengan pemerintah,

33 Lihat Frans Berding dalam “Wat we willen” yang dimuat dalam *De Indiër*, tahun I, 1913, hlm. 1-2.

dan mingguan terbitan Rotterdam yang berjudul *Oost en West.*[34] Majalah ini sesuai dengan judulnya, omsetnya cukup banyak, dan beredar tidak hanya di Eropa (*West*) tetapi juga di Hindia Timur (*Oost).*[35]

Dengan demikian, TM dan SS sudah kembali berkarya sesuai dengan bidang yang selama ini ditekuninya, yaitu dalam bidang pers. Beberapa kali tulisannya dimuat dalam dalam mingguan *De Indiër,* atau kadang-kadang ditulis bersama-sama oleh ketiga orang buangan ini.Tulisan-tulian mereka dapat dimuat antara lain di *Koloniaal Weekblad,* mingguan *Indie, Nederlandsch Indië oud en Nieuw, Hollandsche Revue, De Nieuwe Courant, Nieuwe Amsterdammer, Groene Amsterdammer, Het Volk, Bataviaasche Nieuwsblad, Mataram, Darmo Kondo, Oetoesan Hindia, De Express,* dan beberapa majalah atau koran lainnya.[36]

Selain sebagai penulis aktif di beberapa koran dan mingguan, SS juga mendirikan *Indonesisch Pers Bureau* (Biro Pers Indonesia). Kantornya terletak di Fahrenheitstraat nomor 473, Den Haag. Untuk mendirikan kantor Biro Pers Indonesia ini, SS meminjam uang sebesar f. 500 dari H. Van Kol, seorang

---

34. Lihat Darsiti Soeratman *Pahlawan Nasional Ki Hadjar Dewantara,* Jakarta:Djambatan, 1977, hlm. 41.
35. Majalah ini diterbitkan sejak 1878, dan saat itu dijual f 0.10 sen per eksemplarnya. Majalah ini memuat berbagai macam berita dari Belanda, surat-surat dari wilayah koloni, cerita pendek, iklan, dsb. Dalam majalah ini nama Soewardi Soerianingrat tercatat sebagai redaktur pembantu untuk koresponden Belanda.
36. Lihat Irna H.N. HadiSoewito, *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan.* Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 70.

anggota Staten Generaal, yang pernah bekerja di Hindia Belanda sebagai Kepala Departemen Pekerjaan Umum di Jawa. Uang ini akan dia kembalikan secara bertahap sebesar f 25 setiap tanggal 1 setiap bulannya. Maksud dan tujuan didirikannya Biro Pers Indonesia antara lain untuk memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat Belanda di negeri Belanda tentang apa yang sebenarnya terjadi di wilayah koloni Hindia Belanda. [37] Biro Pers Indonesia ini tidak hanya bergerak dalam bidang pers, tetapi juga dalam pengembangan kesenian.

Selain berkecimpung dalam bidang pers, SS mulai tertarik untuk mengikuti pelajaran di *Lager Onderwijs* (Sekolah Guru), sesuai apa yang dicita-citakan selama ia mulai aktif di Indische Partij, sekaligus melihat aktivitas isterinya sebagai guru di *Fröber School.* Sekolah guru ini diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Den Haag. Setamat mengikuti sekolah itu, ia memperoleh akta mengajar *Akte van Bekwamheid als Onderwijzer* (Ijazah Keterampilan Mengajar). Berita ini

---

37. SS pernah menerima surat dari GH Fromberg yang beralamat di Bourbonstraat no. 16 Charlotte, pada 29 November 1918. Ia menawarkan kepada SS apakah bersedia menerbitkan tulisannya yang berjudul “Het Geval Soewardi” (Peristiwa Soewardi). Apabila SS tidak bersedia, maka ia akan mengirimkan tulisannya itu ke majalah *De Gids.* Surat itu disambut senang hati oleh SS demi berkembangnya Pers Biro Indonesia. Selain itu, SS juga pernah menerima surat dari Wakil Kepala *Centraal Bureau voor Sociale Adviezen* (Biro Pusat Penasehat Sosial) tertanggal 8 Agustus 1918 yang berkeinginan menarik SS untuk bersedia bekerja sama dengan dengan biro tersebut. Tawaran ini diterimanya dengan senang hati, dengan suatu syarat bahwa ia tidak mau nama SS dicantumkan dalam tulisan-tulisannya, mengingat bahwa statusnya adalah orang buangan.

mengagetkan teman-temannya, terutama DD. Oleh karena itu, ia memberikan saran kepadanya agar tidak lagi membuat permasalahan politik baik di Negeri Belanda maupun di wilayah koloni. Selepas memperoleh ijazah tersebut, banyak pihak menyarankan agar dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengajar di sekolah di Belanda. Momen-momen kebahagiaan tiga tokoh buangan ini segera berakhir, karena DD harus segera melanjutkan studinya ke Zurich di Jerman untuk menekuni ilmu ekonomi. Sementara itu TM harus segera dikembalikan ke wilayah Hindia Belanda karena penyakit asma yang dideritanya.[38]

Kepiawaian SS dalam menulis, menyebabkan dirinya ditawari untuk bekerja di *Nederlandsch Zuid-Afrikaansch Pers Bureau* (Biro Pers Afrika Selatan di Belanda). Demikian pula redaktur majalah *Oost en West* meminta kepadanya untuk lebih sering menulis untuk diterbitkan di majalahnya. Nama SS mulai naik daun. Banyak kalangan terutama kalangan mahasiswa yang belajar di negeri Belanda, mulai tertarik dengan tulisan SS, dengan memperkokoh semangat kebangsaan mereka. SS mulai bergabung dengan *Indische Vereeniging* yang didirikan oleh R. Soemitro pada 1908. Wadah persatuan Indonesia ini tidak hanya diikuti oleh bangsa Hindia, melainkan juga diminati oleh orang Tionghoa dan maupun orang Belanda. Bersama

38. TM berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Idenburg 27 Juli 1914, diizinkan kembali ke tanah air. Semula ia harus dikirimkan ke tempat pembuangannya di Banda. Namun berhubung alas an kesehatannya, ia diizinkan untuk tinggal di kota Solo.

dengan para mahasiswa inilah SS banyak berkecimpung dalam bidang kesenian. Hal yang mengejutkan terjadi tatkala *Indische Vereeniging* yang beralamat di Havenstraat 7 A, Delft mengirim surat kepada Ss di Fahrenheitstraat 475 untuk memintanya menjadi tenaga arsiparis lembaga itu dengan memperoleh imbalan sebesar f 7.50 untuk setiap bulannya. Surat pengangkatan ini ditandatangani oleh Goenawan Mangoenkoesoemo di atas sebuah kartupos. Dari sini, kepercayaan terhadap dirinya terus berkembang, bahkan SS diminta untuk menangani majalah mereka yang berjudul *Hindia Poetra.* Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi ketua redaksi majalah itu. Kebijakan yang diterapkannya agar tidak terputus dengan kondisi di Hindia Belanda, ia mengutip beberapa berita dari surat kabar *Oetoesan Hindia*, *Medan Boediman*, dan koran-koran Hindia Belanda lainnya. Perkembangan *Hindia Poetra* tidak terlepas dari paham yang pro maupun kontra. Jelaslah bahwa harian *Maasbode* menyambut dengan hangat mulai tergarapnya majalah *Hindia Poetra* ini. Namun majalah *Het Vaderland* mengkritik habis-habisan munculnya majalah *Hindia Poetra.* Hal ini tidak terlepas dari ideologi dari masing-masing majalah itu. Selanjutnya dalam perkembangannya, pada 17 April 1917 malam diselenggarakan pertemuan dengan *Koninkelijke Nederlandsche Vereeniging* di Amsterdam. Pada kesempatan itu Sstelah membuat corat-coret di atas peta Hindia Belanda dengan tulisan *De Kurk, waarop Neerlands welvaart drijft* (Sebuah Gabus, di mana kemakmuran Belanda terapung). Di bawah peta dia menulis *Het Paard*,

waarop... een dief zit!. (Kuda, di atas mana... seorang pencuri duduk). Hal ini menyebabkan munculnya reaksi dari orang-orang Belanda, yang membuat persatuan orang Hindia semakin kokoh. Oleh sebab itu, organisasi *Indische Vereeniging* diganti namanya menjadi *Indonesische Vereeniging*, dan majalah *Hindia Poetra* diganti menjadi *Indonesia Merdeka*.

Di sela-sela waktu senggangnya, SS mulai membaca karya beberapa tokoh pendidikan seperti Montessori dari Italia, dan karyo tokoh pendidikan India Rabindranath Tagore. Ia sangat berkesan dengan kedua tokoh pendidikan itu. Montessori mementingkan hidup jasmani anak-anak dan mengarahkannya agar mereka memiliki kecerdasan budi. Menurut Montessori dasar utama pendidikan adalah adanya kebebasan dan spontanitas untuk memperoleh kemerdekaan hidup dalam arti seluas-luasnya. Sementara itu tokoh pendidikan Rabindranath Tagore, pendidikan merupakan suatu syarat untuk memperkokoh kemanusiaan dalam arti seluas-luasnya, termasuk dalam bidang keagamaan. [39] Bagi SS sendiri, mereka itu adalah pembongkar dunia pendidikan lama serta pembangunan pendidikan yang baru, yang mendasarkan diri pada Kebudayaan Nasional. Prinsipnya adalah *Kembali Kepada yang Bersifat Nasional*.

---

39. Lihat Irna H.N. Hadi Soewito, *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 99.

H. Penutup

SS yang semula adalah seorang politikus, telah berganti profesi menjadi seorang penulis. Profesinya ini ia manfaatkan benar untuk melakukan rekonsiliasi dengan beberapa elemen masyarakat yang menganggap betapa pentingnya memunculkan rasa nasionalisme di Hindia Belanda. Berkat perenungannya yang cukup cerdas, dibarengi dengan perluasan wawasan tentang pendidikan, tekadnya untuk menyiapkan generasi muda dalam menyongsong kemerdekaan semakin besar. Ia semakin yakin setelah memahami pandangan tokoh pendidik dari Italia dan India, bahwa generasi muda perlu dipersiapkan dengan baik. Perubahan secara radikal dapat dilakukan apabila dimulai dari generasi muda.

Upaya mendidik kaum muda merupakan syarat utama dalam membebaskan diri dari kungkungan penjajah. Pendidikan yang mendasarkan kebudayaan nasional akan mampu menampik semua upaya pembodohan masyarakat melalui pendidikan sistem kolonial. Pendidikan kolonial yang ada pada saat itu tidak membuat masyarakat menjadi cerdas, melainkan mendidik manusia yang tergantung pada nasib dan bersikap pasif, menunggu perintah atasan tanpa memiliki inisiatif untuk memajukan bangsanya yang nyata-nyata berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah anak-anak bumiputera yang masih buta huruf seera harus diatasi. Keinginan untuk merdeka harus dimulai dengan mempersiapkan kaum bumiputera yang bebas, mandiri, cerdas, dan siap bekerja keras. Oleh karena itu generasi

muda, khususnya anak-anak harus dipersiapkan agar kelak menjadi bangsa yang mandiri, sadar akan makna kemerdekaan, sehingga kesadaran akan merebut kemerdekaan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang terdidik yang memiliki jiwa merdeka.

Pengajaran di bawah pemerintah kolonial menjadikan bangsa Hindia Belanda selalu bergantung kepada bangsa Eropa. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus diubah tidakhanya melalui gerakan politik, namun juga melalui gerakan pendidikan dan pengajaran nasional yang kondisinya saat itu sangat diperlukan kehadirannya. Pendidikan nasional harus mampu untuk mandiri, merdeka, berdasarkan kekuatan sendiri. Merdeka berarti bebas dari semua jenis ikatan. Demikian pula prinsip pendidikan bagi anak-anak muda tidak untuk meminta hak mereka, melainkan untuk menitikberatkan kepada perkembangan si anak itu sendiri. Oleh karena itu, tema pendidikan yang penting adalah pendidikan yang tumbuh menurut kodrat, yang didasarkan atas budaya nasional, yang dilakukan dengan sistem *among*. Para pendidik harus *Tut Wuri handayani* (Mengikuti dan mempengaruhi agar anak asuh dapat berkembang ke arah yang baik". Dengan adanya sistem ini, maka bebaslah anak dalam mengembangkan bakatnya dan mereka akan selalu penuh dengan inisiatif, tanpa harus menunggu perintah yang diberikannya. Semua ini hanya dapat terjadi dengan tekad yang bulan, menghancurkan semua hambatan yang berada di depannya. *Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung*.

Daftar Rujukan

Koran

* “Optreden der regeering” dalam *De Preanger Bode,* 5 Agustus 1913, lembar ke-2.
* “Het Verbaningsbesluit” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie.* 29 Agustus 1913 lembar ke-1.
* “Nog een Verrassing” dalam *De Tijd,* 4 November 1913, lembar ke-2.
* “Het Masker af” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad,* 6 Agustus 1913, lembar ke-2.
* “Toelichting” dalam *De Preanger Bode,* 31 Juli 1913 lember ke-2.
* “Een Arrestatie” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie,* 31 Juli 1913, lembar ke-2.
* “DD in Holland”, dalam *Bataviaasche Nieuwsblad.* 22 Oktober 1913, lembar ke-2.
* Berding, Berding, 1913. “Wat we willen” yang dimuat dalam *De Indiër,* tahun I.
* “Een vergadering der Indische Partij”, dalam *Bataviaasche Nieuwsblad,* 19 September 1912, lembar ke-2.
* “DD te Soerabaja” dalam *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie* 9 Desember 1912 lembar ke-2.
* “De Indische Partij” dalam *De Sumatra Post* 20 September 1912 dan *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie* 20 September 1912 lembar ke-2;
* “De Bandoengsche Verkieziezingstrijd” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad* 4 Desember 1912 lembar ke-2).
* Grootheidsdroom” dalam *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 17 Oktober 1912.
* “Die het gevaar Zoekt” dalam *De Preanger Bode*, 11 Agustus 1913, lembar ke-2.
* “Koloniale Zaken” dalam *De Sumatera Post*, 25 maret 1913 lembar ke-2
* “RIP” dalam *De Preanger Bode”,* 20 Maret 1913, lembar ke-1.
* “De regeering en de IP” dalam *De Sumatra Post* 19 Maret 1913 lembar ke-2

* “De Indische Partij” dalam *De Sumatra Post*, 15 Maret 1913 lembar ke-2.
* “De Nederlandsche Pers over de Indische Partij” dalam *De Sumatra Post*, 8 Maret 1913).
* “Indische Partij” dalam *De Sumatra Post*, 8 Maret 1913 lembar ke-2.
* “Zig-Zags” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlnadsch Indie.*, 26 Juli 1913.
* “DD Naar Europe” dalam *De Sumatra Post*, 9 September 1913 lembar ke-2.

Buku

* Dekker, EFE Douwes. 1913. *Mijmeringen van Indiers over Hollands Feesttervierderij in de Kolonie.*
* Djojohadikoesoemo, Margono. *Dr. EFE Douwes Dekker*, Jakarta: Bulan Bintang.
* Harahap, HAH dan BS Dewantara. 1980. *Ki Hadjar Dewantara Dkk.* Jakarta: PT Gunung Agung.
* Koch, DMG. 1941. *Menuju Kemerdekaan, Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942.* Terjemahan Abdoel Moeis: *Om de Vrijheid)*, Jakarta, Jajasan Pembangunan.
* Mangoenkoesoemo, Tjipto. *De Pest op Java en Hare Bestrijding*. Catatan rapat umum pada 10 Januari 1914 di s’Gravenhage. Tt.tth.
* Soeratman, Darsiti . 1977. *Pahlawan Nasional Ki Hadjar Dewantara*, Jakarta:Djambatan.
* Soewito, Irna H.N. Hadi. 1985. *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan.* Jakarta: Balai Pustaka.

Waart, A. De (Ed). 2014. *Ontwikkeling van het Geneeskundig Onderwijs te Weltevreden, 1851-1926, Perkembangan Pendidikan Kedokteran di Weltevreden: 1851-1926* (Terj. Djoko Marihandono dan Harto Juwono), Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.

TIGA SERANGKAI DALAM PERGERAKAN NASIONAL

4

Oleh: Prof. Dr. Nina Herlina, M. S.
(Guru Besar Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)

A. Pengantar

Dalam periodisasi Sejarah Indonesia, awal abad XX merupakan salah satu episode yang ditandai dengan tumbuhnya pemikiran-pemikiran yang mendorong terbentuknya nasionalisme Indonesia yang mulai tumbuh meski masih bersifat abstrak. Di sisi lain, kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda semakin konkret terwujud karena wilayah kekuasaan, hukum, dan struktur pemerintahan yang nyata sudah terbentuk. Nasionalisme Indonesia, tumbuh di seluruh strata sosial, termasuk di lingkungan priyayi (bangsawan) Jawa. Mereka tumbuh sebagai representasi kelompok "pembangkang" terhadap tatanan sosial-budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat Jawa. Mereka sadar bahwa tatanan tradisional tersebut menjadi alat efektif Pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan kekuasaannya yang nyata di Indonesia (Scherer, 1985: 15).

Dari sekian banyak tokoh pergerakan nasional generasi pertama, terdapat golongan priyayi Jawa yang berpikiran nasionalis, yaitu Soewardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan dr. Soetomo. Ketiga tokoh tersebut memiliki karakter yang berbeda dalam menyebarluaskan nasionalisme Indonesia. Sebagaimana digambarkan oleh Savitri Prastiti Scherer (1985), Soewardi Soerjaningrat adalah seorang nasionalis yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisi. Sementara itu, Tjipto Mangoenkoesoemo digambarkan sebagai seorang nasionalis yang menunjukkan jati diri sebagai seorang pembakang (terhadap nilai-nilai tradisi) sedangkan Soetomo dipandang sebagai seorang nasional moderat sehingga ditempatkan sebagai juru damai.

Foto 1: Soewardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soetomo
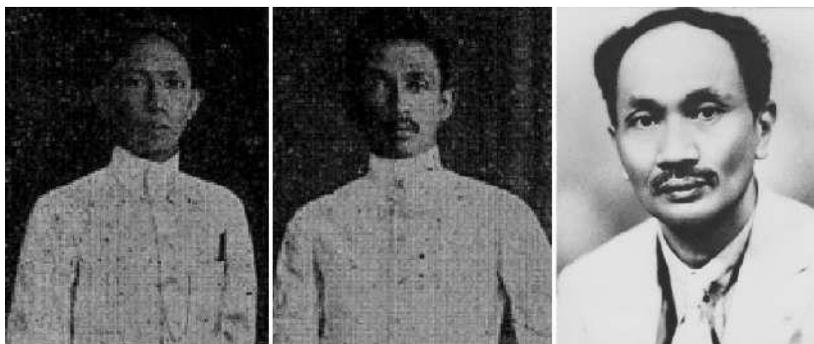
Sumber: Indonesia. 1950. *20 Mei Pelopor 17 Agustus 1945*. Jakarta: Kementerian Penerangan; *Dr. Soetomo*. Diakses dari http://kebudayaan-indonesia.net/figure/49/dr-soetomo. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.24 WIB.

Dengan persamaan yang dimiliki, sekaligus melekat di dalamnya perbedaan yang begitu kontras, menarik untuk diungkap latar belakang budaya yang membentuk karakter ketiga tokoh nasionalis tersebut. Menarik juga untuk dikaji tentang pemikiran ketiganya yang sangat berpengaruh, tidak hanya pada masa pergerakan nasional, namun masih dirasakan setelah Indonesia merdeka. Kedua hal itulah yang menjadi tujuan utama penulisan makalah ini.

B. Profil Ringkas Tiga Serangkai

Soewardi Soerjaningrat lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ayahnya, Pangeran Soerjaningrat merupakan putra pertama Paku Alam III sehingga status sebagai putra mahkota Pakualaman melekat pada dirinya. Dengan perkataan lain, Soewardi Soerjaningrat merupakan pewaris kedua tahta Pakualaman apabila Paku Alam III mangkat dan ayahnya tidak bisa naik tahta. Akan tetapi, tahta Pakualaman itu diserahkan oleh Belanda kepada saudara sepupu Pangeran Soerjaningrat yang kemudian menjadi Paku Alam IV.[1] Setelah Paku Alam IV mangkat, tahta diserahkan kepada Paku Alam V yang tidak lain adalah adik laki-laki Paku Alam III. Dari sini, tahta Pakualaman

1. Irna Hanny Hadi Soewito (1982: 51-52) mengatakan bahwa kegagalan Pangeran Soerjaningrat menjadi Paku Alam IV karena mengalami cacat netra sejak lahir dan Pemerintah Hindia Belanda menolak menyerahkan tahta Pakualaman kepada adiknya, Pangeran Sasraningrat karena masih terlalu muda. Atas usul Ratu Sepuh, sebagai pinisepuh Pakualaman, salah seorang cucunya yang sarat pengalaman di bidang kepamongprajaan diangkat menjadi Paku Alam IV.

diwariskan kepada keturunan Paku Alam V[2] (Scherer, 1985: 77).

Dengan kondisi ekonomi yang tidak lebih baik dibandingkan dengan para pangeran Pakualaman lainnya, Soewardi Soerjaningrat dimasukkan ke *Europeesche Lagere School* (ELS). Selesai dari ELS, Soewardi Soerjaningrat melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru di Yogyakarta. Akan tetapi, tidak selesai karena terbentur masalah biaya. Saat itulah, datang tawaran beasiswa dari dr. Wahidin Soedirohoesodo kepada Soewardi untuk menempuh pendidikan di *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA). Dengan beasiswa itu, pada 1905, Soewardi mulai belajar ilmu kedokteran di Stovia, yang di kalangan pribumi lebih dikenal dengan sebutan Sekolah Dokter Jawa.[3] Akan tetapi, pendidikan Soewardi di Stovia

2. Dengan pewarisan tahta Pakulaman kepada keturunan Paku Alam V, maka Pemerintah Hindia Belanda telah memutus hak atas tahta Pakualaman bagi seluruh keturunan Paku Alam III. Selain itu, kedua anak Paku Alam III pun menghadapi intrik di antara pangeran yang berdampak pada "keluarnya" mereka dari keraton. Situasi ini merupakan pondasi awal bagi Soewardi Soerjaningrat dalam pembentukan karakternya, yakni aristokrat yang merakyat (Soewito, 1982: 52).
3. Masuknya Soewardi Soerjaningrat ke Stovia di luar tradisi kalangan priyayi-aristrokrat. Hal yang sama ditempuh juga oleh kakaknya yang melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pertanian di Bogor. Lazimnya, seorang keturunan priyayi-aristokrat, menempuh pendidikan ke HBS atau Osvia (Scherer, 1985: 78). Dalam pandangan Liesbeth Hasselink (2011: 208) pada umumnya, kaum priyayi memiliki karakter sebagai administrator pemerintahan. Oleh karena itu, merekaakanmenyekolahkan anak laki-lakinya ke Osvia, bukan ke Stovia. Secara pragmatis, sebagai administrator pemerintahan, priyayi memiliki tanggung jawab, yang di dalamnya melekat faktor kekuasaan. Sementara itu, seorang dokter tidak memiliki tanggung jawab di birokrasi dan memiliki karakter tunduk atas perintah. Dalam perspektif inilah, pilihan ke Osvia menjadi "sebuah

terhenti pada 1910, karena selama empat bulan mengalami sakit sehingga dirinya gagal naik kelas (Soewito, 1982: 53).

Setelah gagal menyelesaikan pendidikannya di Stovia, Soewardi memutuskan untuk bekerja di pabrik gula Kalibagor di Banyumas (Jawa Tengah), kemudian bekerja di apotek Rathkamp, Yogyakarta. Dengan pengalaman pendidikannya di Stovia, Soewardi mencoba untuk menjadi peramu obat-obatan di tempatnya bekerja, namun usahanya tersebut gagal. Kegagalannya itu disebabkan oleh ketidakfokusan dirinya terhadap pekerjaannya karena tertarik dengan dunia jurnalistik yang ditandai dengan pengiriman artikelnya secara konsisten ke surat kabar *De Express* dan *Oetoesan Hindia*. Setelah diberhentikan dari Apotek Rathkamp, pada 1912, Soewardi ditawari bekerja di *De Express* oleh Ernest François Eugène Douwes Dekker yang berkantor di Bandung[4] (Soewito, 1982: 53-54; Scherer, 1985: 86-87). Tawaran tersebut langsung diterima karena sesuai dengan minatnya yang mulai tumbuh di dunia jurnalistik.[5] Sejak saat itu, Soewardi Soerjaningrat

---

kewajiban" bagi kalangan priyayi, dibandingkan dengan Stovia yang menjadi pilihan utama bagi priyayi rendah.

4. Ernest François Eugène Douwes Dekker menawari pekerjaan di *De Express* kepada Soewardi Soerjaningrat karena sangat terkesan dengan tulisan-tulisannya yang dimuat di koran *De Express* dan *Oetoesan Hindia*. Tulisan-tulisannya yang dibuat selama bekerja di Pabrik Gula Kalibagor dan Apotek Rathkmap itu, sangat tajam mengkritik pemerintah sehingga Dekker memandangnya sebagai individu dengan visi yang sejalan dengan dirinya (Scherer, 1985: 86-87)

5. Soewardi telah mengenal Douwes Dekker ketika masih sekolah di Stovia yang ada saat itu berkedudukan sebagai redaktur *Bataviaasche Nieuwsblad*, sebuah surat kabar berhaluan bebas dan tidak mengikuti haluan Pemerintah Hindia Belanda. Douwes Dekker dengan surat

berhasil membentuk jati dirinya sebagai salah seorang pemimpin pergerakan yang sangat dikhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda sehingga setiap tindak-tanduknya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah. Buah penanya begitu tajam mengkritik pemerintah, sehingga pernah dibuang ke Belanda bersama-sama dengan Tjipto Mangoenkoesoemo, rekan seperjuangannya di Bandung.

Tokoh kedua dari tiga serangkai dalam makalah ini adalah dokter Tjipto Mangoenkoesoemo yang dilahirkan di Ambarawa pada 1886 sebagai anak pertama dari sebelas saudara.[6] Ayahnya, Mangoenkoesomo, merupakan seorang guru Bahasa Melayu di Sekolah Dasar Pribumi di Ambarawa. Sementara itu, kakeknya, Mangoensastro, merupakan seorang guru agama dan putra tertua seorang perwira pasukan Pangeran Diponegoro. Meskipun demikian, Tjipto tidak termasuk sebagai golongan priyayi-birokratis karena tidak seorangpun dari kerabatnya yang bekerja di pemerintahan (Balfas, 1952: 30; Scherer, 1985: 122-123; Shiraishi, 1981: 95).

Meskipun berasal dari kalangan priyayi rendah,

---

kabarnya itu berhasil menarik simpati dari para murid Stovia dan secara pribadi, Douwes Dekker menaruh kekaguman kepada Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Di awali dengan saling berkomunikasi, ketiganya berhasil menjalin persahabatan karena merasa memiliki satu tujuan yang sama, yakni membebaskan masyarakat pribumi dari ketidakadilan akibat kebijakan Pemerintah Hindia yang bersifat diskrimintif (Soewito, 1982: 54).

6. Mengenai jumlah saudara kandungnya, M. Balfas (1952: 30) mengatakan bahwa Tjipto memiliki delapan orang saudara kandung, sedangkan Savitri Prastiti Scherer (1985: 122) mengatakan bahwa saudara kandung Tjipto seluruhnya berjumlah sepuluh orang.

Mangoenkoesoemo berhasil menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tjipto diterima sebagai siswa STOVIA yang mendapat predikat dari para gurunya sebagai murid yang berbakat (*een begaald leerling*).[7] Predikat itu diberikan, karena selama menempuh pendidikannya di STOVIA, Tjipto dinilai sebagai pribadi yang cerdas, jujur, rajin, berpikiran tajam, dan bersikap tegas. Sikap tegasnya itu, tidak dapat dilepaskan dari situasi lingkungan sosial-budayanya. Tjipto terdorong untuk melabrak tradisi bahwa priyayi rendah harus membungkukkan badan apabila berjumpa dengan priyayi tinggi dan pejabat Belanda dari golongan apapun.

Perlakuan diskriminatif itu, diterapkan juga dalam penggunaan baju, baik batik maupun model baju Belanda. Penggunaan baju tradisional Jawa bagi priyayi rendah sekaligus sebagai pembeda status sosial yang berdampak pada perlakuan sosial yang mereka terima. Oleh karena itu, mudahlah dipahami kalau sejak 1907, Tjipto acapkali melontarkan kritik terhadap Pemerintah Hindia Belanda dan kalangan priyayi aristrokrat dan priyayi birokratis, karena mereka pada dasarnya menyokong Pemerintah Hindia dalam proses merendahkan martabat bangsa

---

7 Tiga orang adik Tjipto, yakni Gunawan, Budiardjo, dan Sjamsul Ma'arif pun melanjutkan pendidikan ke Stovia. Sementara itu, adiknya yang lain, Garmawan, melanjutkan pendidikannya ke *Delf Universiteit* di Negeri Belanda (Scherer, 1985: 123). Hal ini menunjukkan bahwa Mangoenkoesoemo, seorang priyayi rendah, telah berhasil menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi sehingga mampu meningkatkan status sosial mereka sebagai priyayi-profesional (Scherer, 1985: 53-60).

sendiri. Kritik tersebut dilontarkan Tjipto melalui artikel yang dimuat di surat kabar *De Locomotif* dan *Bataviaasche Nieuwsblad*.

Sikap kritis yang melekat pada diri Tjipto diperlihatkan juga oleh tindakannya yang membangkang terhadap tradisi di kalangan masyarakat Jawa. Sebagai seorang dokter, Tjipto memiliki status tinggi dan terhormat di kalangan Pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi, dalam pandangan masyarakat Jawa, profesinya sebagai dokter tidak berpengaruh apa-apa terhadap status sosialnya. Dokter Tjipto, hanyalah seorang priyayi rendah yang status sosialnya tidak lebih tinggi daripada seorang asisten wedana. Tindakan pembakangannya terhadap tradisi diperlihatkan ketika bekerja di Demak. Sebagai seorang dokter, Tjipto memiliki gaji tinggi sehingga mampu membeli dua ekor kuda untuk menarik keretanya. Tindakan Tjipto mendapat reaksi keras dari Hadiningrat, Bupati Demak karena sesuai tradisi kepemilikan kereta dengan dua ekor kuda merupakan hak istimewa bupati dan keturunan dekatnya. Sikap yang sama diperlihatkan Tjipto ketika bekerja di Surakarta. Pada saat itu, Tjipto menggunakan alun-alun untuk dijadikan sebagai tempat melatih kudanya. Tindakan tersebut mengundang reaksi keras dari Sunan karena secara tradisi, penggunaan alun-alun merupakan hak istimewa Sunan dan keturunan dekatnya (Scherer, 1985: 133-134).

Sikap berani Tjipto ditujukan pula kepada Pemerintah Hindia Belanda ketika ia menerima penghargaan *Ridderkruis van Oranye-Nassau*. Penghargaan itu diterima oleh Tjipto setelah

berhasil membasmi wabah pes di Malang pada 1910. Waktu itu, banyak dokter yang menolak membasmi penyakit menular itu. Akan tetapi, Tjipto menerima penugasan itu dan berhasil sehingga mendapat penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda, tetapi penghargaan itu dipasang pantatnya.[8]

Tjiptomenjadi sangat terkenal dengan sikapnya itu sebagai seorang dokter bumiputera yang secara radikal menentang sikap diskriminatif yang diterapkan secara sistematis dalam kehidupan masyarakat Jawa oleh penguasa pribumi maupun Belanda, meskipun tahu resiko yang akan dihadapinya.[9] Sikap pembangkangan yang diperlihatkan Tjipto, berbeda dengan Soetomo yang memperlihatkan sikap moderat dalam upaya mengubah tradisi Jawa yang bersifat diskriminatif. Soetomo, mengambil jalan tengah karena sikap radikal memiliki resiko tinggi mengingat kedudukan priyayi birokrat masih sangat kuat, sekaligus untuk mengamankan kedudukan ayahnya.

Pada 1920, Tjipto Mangoenkoesoemo menikahi Maria Vogel, seorang Indo-Belanda (Eurasia). Dua puluh tiga tahun

---

8. *Tiga Dokter Pelopor Pergerakan Nasional*. Diakses dari http://sejarahri.com/perjuangan-para-dokter-di-masa-revolusi/. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 19.44 WIB

9. Aktivitas Tjipto di dunia pergerakan nasional membawa dampak negatif terhadap karier dokternya. Setelah kembali ke Indonesia dari hukuman pembuangannya di Belanda (1913-1917), karier Tjipto sebagai dokter tidak berjalan dengan lancar. Berbagai hambatan dirasakannya, antara lain penolakan atas izin menjadi dokter pribadi Mangkunegara dan warga tidak memberikan tempat bagi praktik kedokterannya sehingga ia di-persona non grata-kan (Hasselbink, 2011: 204). Namun demikian, sikap Tjipto tidak pernah berubah meskipun karier dokternya dihambat pemerintah.

kemudian atau tepatnya pada 1943, Tjipto Mangoenkoesoemo meninggal dunia dan jenazahnya dikebumikan di Ambarawa. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama RS Tjipto Mangoenkoesoemo atau RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah ejaannya disesuaikan dengan EYD. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, rumah sakit ini bernama *Centrale Burgerlijke Zieken-inrichting*.[10]

Tokoh ketiga yang dikaji dalam makalah ini bernama Soetomo yang dilahirkan di Desa Ngepeh, dekat Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888.[11] Pada saat dilahirkan, orang tuanya memberi nama Soebroto yang kemudian diubah menjadi Soetomo ketika didaftarkan ke Sekolah Rendah Belanda di Bangil. Ayahnya bernama R. Soewadjilah, yang pada awalnya seorang guru, tetapi kemudian berpindah menjadi pegawai administrasi pemerintahan yang berhasil menggapai puncak kariernya sebagai wedana (Soetomo, 1934: 64-65). Kedudukan ayahnya tersebut, langsung tidak langsung membentuk sikap moderat pada dirinya, karena Soetomo di satu sisi harus

---

10. *Tjipto Mangoenkoesomo*. Diakses dari https://alchetron.com/Tjipto-Mangoenkoesoemo-1270640-W#-. Tanggal 24 Maret 2017. Pukul 08.11 WIB.
11. Soetomo memiliki dua orang saudara laki-laki yaitu Soeratmo dan Soesilo. Keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Stovia dan setelah menjadi dokter, Soeratmo berdinas di Batavia sampai meninggal, sementara Soesilo berdinas di Palembang. Satu-satunya saudara perempuan Soetomo yang bernama Siti Soendari berhasil meraih gerlar *Meester in de Rechten* (Mr., sekarang S.H., sarjana hukum) pada 1934 dari Rijksuniversiteit (*Dokter Soetomo*. Diakses dari http://www.imexbo.nl/dokter-soetomo.html. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.17 WIB).

menjaga keserasian tatatan sosial di kalangan masyarakat Jawa. Di sisi lain, Soetomo memiliki pemikiran bahwa tatanan sosial tersebut harus dirombak dan hal itu tidak bisa dilakukan secara radikal-revolusioner. Kakek Soetomo, baik dari garis ayah maupun ibunya, tidak masuk ke dalam golongan priyayi birokrat, melainkan sebagai pemilik tanah sehingga dipandang sebagai orang-orang terkemuka sekaligus sebagai kepala desa di desanya masing-masing (Scherer, 1985: 205).

Sebelum memasuki usia sekolah, Soetomo diasuh oleh kakek-neneknya dari garis Ibu. Pada saat memasuki sekolah, pamannya yang menjadi guru di Bangil. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, Soetomo diterima di STOVIA, sekolah favorit para priyayi rendah. Berbeda dengan Tjipto, Soetomo telah mendapat pengakuan status sosialnya karena kedudukan ayahnya sebagai wedana sangat diterima di kalangan para siswa Stovia.[12] Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, pada 1903, Soetomo menempuh pendidikan kedokteran di STOVIA dan dapat menyelesaikannya pada 1911 sehingga Soetomo menjadi seorang dokter. Dalam kurun waktu 1911-1919, Soetomo bekerja di tujuh tempat berbeda di Jawa, Sumatera Selatan, dan Sumatera Timur, antara lain Blora, Semarang, Tuban, Lubuk Pakam, dan Malang. Pada 1912,

12. Berbeda dengan Tjipto, pengakuan terhadap status sosialnya baru diterima setelah Tjipto dipandang memiliki prestasi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan kedokteran. Dengan demikian, pengakuan atas status sosial yang diterima Soetomo berdasarkan pada nilai-nilai tradisional yang hidup di kalangan masyarakat Jawa, sedangkan Tjipto berdasarkan pada nilai-nilai keilmuan (Scherer, 1985: 207).

Soetomo ditugaskan menjadi seorang dokter di Rumah Sakit Blora (Scherer, 1985: 220; Hasselink, 2011: 172; 177).

Pada 1917, Soetomo menikah dengan Everdina de Graaf-Brüring, seorang suster berkebangsaan Belanda. Dua tahun kemudian (1919), Soetomo pergi Belanda untuk mengembangkan kemampuannya sebagai seorang dokter dan pada 1923, Soetomo menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Selama di Belanda, Soetomo tidak hanya belajar ilmu kedokteran, melainkan juga aktif di dunia pergerakan bersama-sama dengan para pelajar Indonesia lainnya.[13].

Lingkungan sosial yang sarat dengan saling menghargai, khususnya di keluarga kakek-neneknya, merupakan kondisi yang tidak bisa diabaikan dalam membentuk sikap moderat dirinya. Status sosial kakeknya lebih rendah jika dibandingkan dengan status sosial neneknya. Mereka bersikap sebagaimana tradisi yang berlaku, tetap dalam waktu yang bersamaan mereka pun saling menghargai. Situasi di dalam keluarganya, terbawa ke tengah kehidupan masyarakat dan benar-benar dipraktikkan oleh Soetomo. Selain itu, didikan kedua kakek-neneknya yang lebih dominan mengarah pada tradisi Jawa daripada Islam pragmatis, menjadikan Soetomo sebagai sosok dengan pembawaan tenang, tidak meledak-ledak seperti rekannya, Tjipto Mangoenkoesoemo (Scherer, 1985: 211).

Jiwa moderatnya itu terlihat dari sikapnya yang sangat

---

13. *Dokter Soetomo*. Diakses dari http://www.imexbo.nl/dokter-soetomo.html. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.17 WIB; *Dr. Soetomo*. Diakses dari http://kebudayaan-indone-sia.net/figure/49/dr-soetomo. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.24 WIB.

dermawan. Selain aktif di dunia pergerakan, Soetomo pun aktif di bidang sosial dan budaya pun tidak kalah pentingnya dengan aktivitas politiknya. Soetomo membangun rumah sakit, panti asuhan, rukun tani, lembaga kesehatan umum, bank desa, dan koperasi yang dimaksudkan sebagai upaya membantu masyarakat tidak mampu. Aktivitas politik yang dilakukan oleh Soetomo semakin meningkat seiring pembentukan *Algemeene Studie Club* (1924), yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI, 1930), dan puncaknya dengan mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) pada 1935.[14] PBI kemudian mendirikan bank yang sekarang menjadi Bank Negara Indonesia, menerbitkan surat kabar *Soeara Oemoem*, menerbitkan majalah *Penyebar Semangat*, membuka koperasi Pertoekangan, mendirikan Roekoen Tani, dan Roekoen Pelajar.[15] Perjuangan Soetomo yang berupaya mangangkat harkat derajat bangsanya berakhir pada 30 Mei 1938, seiring dengan Sang Pencipta memanggil dirinya. Jenazah Soetomo, kemudian dikebumikan di Surabaya, Jawa Timur. Namanya kemudian diabdikan sebagai nama rumah sakit di Surabaya, yakni RSUD Dr. Soetomo.

---

14. Parindra dibentuk oleh Soetomo sebagai hasil fusi dua buah organisasi, yakni Boedi Oetomo dan Persatoean Bangsa Indonesia. Kedua organisasi itu memiliki hubungan erat dengan kiprah Soetomo dalam memperjuangkan hak-hak bangsanya yang telah lama dirampas oleh bangsa Belanda (*Dokter Soetomo*. Diakses dari http://www. imexbo.nl/ dokter-soetomo.html. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.17 WIB).
15. *Dr. Soetomo*. Diakses dari http://kebudayaan-indonesia.net/figure/49/dr-soetomo. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.24 WIB.

Foto 2: Dokter Soetomo dengan Istri (Kiri) dan Prosesi Pemakaman Dr. Soetomo (Kanan)

Sumber: *Dokter Soetomo*. Diakses dari http://www.imexbo.nl/dokter-soetomo.html. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.17 WIB.

C. Pemikiran Tiga Serangkai

Kegagalan Soewardi Sorjaningrat menjadi seorang dokter dan ketertarikannya pada dunia jurnalistik, menjadikan dirinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh pada masa awal pertumbuhan pergerakan nasional. Gagasan nasionalisme disebarluaskan melalui tulisannya yang sangat tajam mengkritik Pemerintah Hindia Belanda. Salah satu tulisannya *Als ik eens Nederlander was* (Andaikata aku seorang Belanda) yang diterbitkan pada 1913. Melalui tulisan itu, Soewardi mengkritik sangat pedas perayaan seratus tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Terhadap peringatan itu, Soewardi bersama-sama dengan Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker, membentuk Komite Bumiputera atau resminya *Inlandsche Comité tot Herdenking voor Nederlands Honderdjarige Vrijheid.* Tujuannya hendak menyadarkan masyarakat bahwa peringatan kemerdekaan Belanda yang dirayakan secara meriah

di Hindia Belanda, merupakan bentuk ketidakadilan pemerintah Hindia Belanda terhadap golongan pribumi. Soewardi dan Tjipto mengkritik bahwa sementara Pemerintah Hindia Belanda merasakan kemerdekaan negerinya, pada sisi yang sama, mereka merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Khawatir tulisan Soewardi akan menyadarkan bangsa Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda menyita seluruh dokumen terkait dengan tulisan itu pada saat melakukan penggeledahan ke kantor Komite Bumiputera (Soewito, 1982: 54).

Tindakan Pemerintah Hindia Belanda tersebut mendorong amarah dari Tjipto Mangoekoesoemo dan menyerang pemerintah dengan menulis *Kracht of Vrees* (Kekuatan atau Ketakutan). Melaluibuahpenanyaitu,Tjiptomempertanyakanpenggeledahan kantor Komite Bumiputera yang dilakukan dengan sangat tidak beradab. Tjipto menegaskan tindakan tersebut sebagai bentuk ketakutan pemerintah terhadap pertumbuhan nasionalisme dan menakuti bangsa pribumi dengan memamerkan kekuatan mereka. Terhadap tulisan Tjipto, Soewardi pun menerbitkan artikelnya di *De Expres* edisi 28 Juli 1913 dengan judul *Een voor allen, maar ook allen voor een* (Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu) yang menegaskan bahwa sebuah perjuangan, bangsa Indonesia harus memiliki kekuatan dan kepribadian sehingga akan siap menghadapi berbagai kemungkinan terbaik dan terburuk[16] (Dekker, 1913: 68-73; Soewito, 1982: 54).

16. Douwes Dekker, sebagai sahabat Soewardi Soerjaningrat dan Tjipo Mangoekoesoemo, sekaligus sebagai pemimpin redaksi *De Express*, menanggapinya dengan menerbitkan tulisannya di *De Express* edisi 5 Agustus 1913. Ia menggambarkan kedua orang priyayi nasionalis itu

Tulisan-tulisan tajam yang dibuat oleh Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoekoesoemo, serta Douwes Dekker mendorong Pemerintah Hindia Belanda menangkap ketiganya. Atas tuduhan menentang kebijakan pemerintah dan mengganggu ketertiban umum, serta atas persetujuan *Raad Nederlandch-Indie*, Soewardi dan Tjipto dinyatakan bersalah oleh *Raad van Justitie*. Tjipto Mangoekoesoemo diasingkan ke Banda (Maluku) dan Soewardi Soerjaningrat diasingkan ke Bangka (Sumatera).[17] Akan tetapi, kedua tokoh pergerakan itu memilih opsi lain, yakni meninggalkan Hindia Belanda dan pergi ke Belanda. Keduanya memilih Belanda atas pertimbangan bahwa di sana aktivitas politik mereka dapat dilanjutkan bersama-sama para mahasiswa yang sekaligus sebagai aktivis pergerakan nasional juga (Soewito, 1982: 54).

Selama menjalani pengasingan di Belanda, Soewardi bersama-sama dengan Tjipto tetap aktif di dunia pergerakan dengan bergabung ke dalam *Indische Vereeniging* di Den Haag.[18] Soewardi dan Tjipto selalu menghadiri diskusi-diskusi

---

sebagai pahlawan bagi kaum pribumi yang berjuang untuk membebaskan masyarakat pribumi dari ketidakadilan kolonialisme. Judul artikelnya memang sangat provokatif, yakni *Onze Helden: Tjipto Mangonkoesoemo en R.M. Soewardi Soerjaningrat* atau Pahlawan-Pahlawan Kami: Tjipto Mangoenkoesoemo dan R.M. Soewardi Soerjaningrat (Dekker, 1913: 68-73; Soewito, 1982: 54).

17. Sementara itu, E. F. E. Douwes Dekker diasingkan ke Kupang, Timor. Seperti halnya Soewardi dan Tjipto, Douwes Dekker pun memilih opsi diasingkan ke Belanda, sehingga mereka bertiga berangkat ke Belanda untuk menjalani hukuman pengasingan (Soewito, 1982: 54)

18 *Indische Vereeniging* didirikan pada 1908 atas atas prakarsa R. Soemitro, seorang bangsawan Jawa, bersama dengan R. Soetan Casajangan Saripada, dari Mandailing. Anggota *Indische Vereeniging* bukan hanya

yang diselenggarakan oleh *Indische Vereeniging* sehingga cita-cita menjadikan Hindia Belanda lebih maju lagi semakin tersebar luas (Soewito, 1982: 56; Bachtiar, 1976: 31). Selain itu, Soewardi bersama-sama dengan Tjipto, Dekker, dan aktivis lainnya berhasil mendirikan *Indonesisch Pers Bureau* yang tidak hanya berfungsi semacam kantor berita, melainkan juga sebagai media massa. Melalui biro inilah, berbagai informasi tentang Hindia Belanda disebarluaskan (Soewito, 1982: 56).

Foto 3: dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (kiri, duduk) dan Soewardi Soerjaningrat (kanan, duduk) ketika di Belanda
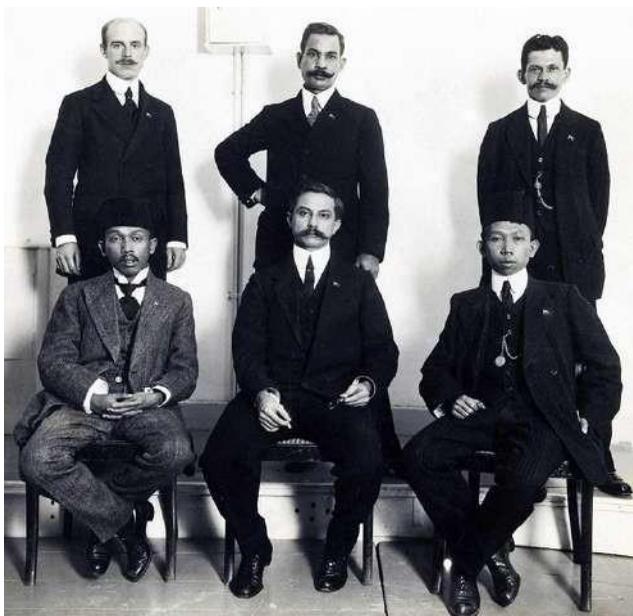
Sumber: *Tjipto Mangoenkoesomo*. Diakses dari https://alchetron.com/Tjipto-Mangoenkoesoemo-1270640-W#-. Tanggal 24 Maret 2017. Pukul 08.11 WIB

berasal dari suku bangsa di kepulauan Hindia saja, melainkan ada juga yang berasal dari keturunan Cina maupun Belanda (Bachtiar, 1976: 31).

Setelah kembali ke Indonesia, Soewardi tidak berhenti berjuang dan perhatiannya bertambah ke bidang pendidikan karena menurut Soewardi, bangsa Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabakan nilai-nilai kebudayaansetempat.Untukmewujudkangagasannya,pada3Juli 1922, Soewardi Soerjaningrat mendirikan sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Di tempat inilah, Soewardi menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak pribumi dengan tidak menanggalkan nilai-nilai budaya.[19] Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di Taman Siswa adalah ***Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*** **yang sampai saat ini** dijadikan motto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk penyelenggaraan pendidikan nasional.[20]

---

19. Soewardi pernah menulis bahwa .... "kepatuhan pada peradaban Barat telah mengurung negeri ini dalam kegelapan". Oleh karena itu, Soewardi bertekad akan menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan "individu-individu yang bebas dengan semangat merdeka" sehingga bisa membawa ketentraman dan keteraturan di masyarakat. Bagi Soewardi, kondisi ideal tersebut terdapat dalam tradisi Jawa yang kemudian diimplementasikan dengan mendirikan perguruan Taman Siswa (Abdullah dan Lapian [eds.]. 2012[5]: 89).
20. *Sejarah Singkat Taman Siswa*. Diakses dari http://www.ustjogja.ac.id/Profil-sejarah-singkat-tamansiswa-tamansiswa-history.html. Tanggal 21 Maret 2017. Pukul 9.54 WIB.

Foto 4: Ki Hajar Dewantara dengan Panji Taman Siswa

Sumber: "Sjarat Mutlak Bagi Pendidikan: Kemerdekaan Nasional" *Mimbar Umum*. 18 October 1949. Hlm. 2; *Sejarah Singkat Taman Siswa*. Diakses dari http://www.ustjogja.ac.id/ Profil-sejarah-singkat-tamansiswa-tamansiswa-history.html. Tanggal 21 Maret 2017. Pukul 9.54 WIB.

Menariknya, setelah Taman Siswa berkembang dan Soewardi dipandang sebagai tokoh sentral, pada 23 Februari 1928, nama Soewardi Soerjaningrat ditanggalkan dan diganti menjadi Ki Hadjar Dewantara (Soerjomihardjo, 1969: 396; Soewito, 1982: 52; Scherer, 1985: 113).[21] Perjuangannya di

21 Pergantian nama dari Soewardi Soerjaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara memang menarik perhatian karena dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan tepat pada usia 40 tahun. Bagi Harsya W. Bactiar, pergantian itu sebuah kejanggalan dalam budaya Jawa (Soewito, 1982: 52). Akan tetapi, dalam pandangan Savitri Prastiti Scherer (1985: 85), pergantian nama itu merupakan sebuah penegasan tentang status sosialnya. Soewardi merupakan priyayi aristokrat karena status sebagai cucu Paku Alam III. Namun, status sosialnya yang begitu tinggi, ia tanggalkan akibat intrik di dalam keraton. Melalui pendidikan, status sosialnya itu "dikembalikan" sebagaimana ia ungkapkan secara implisit

bidang pendidikan, menghantarkan Ki Hadjar Dewantara pada jabatan sebagai Menteri Pengajaran dan Pendidikan, setelah Indonesia merdeka. Pada 1957, Ki Hadjar Dewantara menerima anugerah Doktor (HC) dari Universitas Gadjah Mada dan dua tahun kemudian (1959), Ki Hadjar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta.

Berbeda dengan Ki Hadjar Dewantara, dua tokoh lainnya yakni Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetomo tidak berjuang di bidang pendidikan, melainkan secara konsisten di bidang politik. Ketika Boedi Oetomo (BO) berdiri pada 20 Mei 1928, Tjipto menyambut baik organisasi pertama pada masa pergerakan nasional tersebut. Dalam perkembangannya, Tjipto berkeinginan agar BO menjadi organisasi politik yang demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Keinginan Tjipto tersebut melahirkan penentangan dari para pengurus dan anggota yang menginginkan BO sebagai organisasi sosial budaya dan keanggotaan tertutup. Artinya, tidak setiap orang dapat menjadi anggota BO, melainkan mereka yang memiliki status sosial tertentu sesuai dengan tradisi Jawa. Perbedaan pandangan itu, yang mendorong Tjipto meninggalkan BO dan mendirikan *R.A. Kartini Club*.

Baru satu tahun menjalankan hukuman di Belanda, pada 1914, dengan alasan kesehatan, Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan Tjipto kembali ke Hindia Belanda.[22] Setibanya di

---

dari nama barunya Ki Hajar Dewantara yang memiliki makna “seorang terhormat (Ki) yang mengajar (Hajar) sebagai wakil/perantara dewa (Dewantara).

22. Keputusan hukuman buang atas Soewardi Soerjaningrat, Tjipto

Hindia Belanda, Tjipto bergabung dengan Insulinde yang pada 9 Juni 1919 berganti nama menjadi *Nationaal-Indische Partij* (NIP). Bergabungnya Tjipto di partai politik yang berhaluan nasionalis, tidak dapat dilepaskan dari pandangan atau sikapnya tentang nasionalisme.

Nasionalisme Tjipto terlihat jelas dalam perdebatannya dengan Soetatmo Soeriokoesoemo yang terjadi di Kongres Kebudayaan Jawa di Solo pada 5-7 Juli 1918. Dalam kongres itu, Tjipto menentang keras argumentasi Soetatmo mengenai konsep Nasionalisme Jawa. Tjipto berpandangan bahwa konsep tersebut sangat tidak tepat karena Jawa telah kehilangan kedaulatannya sehingga hanya bagian dari wilayah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda yang didominasi oleh Hindia. Akibat kondisi itu, tanah air orang Jawa tidak lagi Pulau Jawa, melainkan Hindia sehingga para pemimpin pergerakan menumbuhkan semangat nasionalisme Hindia kepada masyarakat Jawa dan seluruh penduduk Hindia (Shiraishi, 1981: 96-97). Pemikiran Tjipto tersebut menunjukkan bahwa meskipun dirinya masih termasuk ke dalam golongan priyayi rendah, tepatnya priyayi profesional, dengan latar belakang budaya Jawa, namun masa depan masyarakat pribumi tidak dilandaskan pada konsep nasionalisme Jawa, melainkan nasionalisme Hindia.

Mangoenkoesoemo, dan E.F.E. Douwes Dekker, baru dicabut secara resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 17 Agustus 1917. Akan tetapi, kepulangan Soewardi dan Douwes Dekker ke Hindia Belanda tertunda karena ketiadaan sarana transportasi yang bertujuan ke Hindia Belanda akibat meletusnya Perang Dunia I (1914-1918) (Soewito, 1982: 57).

Prinsip nasionalisme Hindia yang dipegang erat Tjipto mendorong Pemerintah Hinda Belanda menunjuk dirinya sebagai anggota *Volksraad* dengan harapan sikap tersebut berubah. Akan tetapi, harapan pemerintah itu tidak terwujud karena selama menjadi anggota *Volksraad*, Tjipto dengan teguh memegang dan menjalankan sikap politiknya tersebut. Melihat kenyataan itu, pada 1920, Pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Tjipto ke luar Pulau Jawa. Tidak lama kemudian, Tjipto dipindahkan ke Bandung dengan status sebagai tahanan kota. Selama di Bandung, Tjipto membuka praktik dokter dan bersepeda ke kampung-kampung untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat. Di sini pula, Tjipto berjumpa dengan para pemimpin pergerakan generas kedua, antara lain Sukarno yang pada 1923 mendirikan *Algemeene Studie Club* (ASC). Oleh karena status politiknya, Tjipto tidak menjadi anggota resmi ASC, tetapi pemikirannya tentang perjuangan dan nasionalisme Hindia diterima sebagai sumbangan sangat berharga bagi bangsa Hindia.

Pada 1927, Belanda menganggap Tjipto terlibat dalam upaya sabotase sehingga membuangnya ke Banda Neira, Maluku. Pada saat menjalani hukumannya, penyakit asma yang sudah lama diderita Tjipo kambuh kembali dan untuk keperluan pengobatan, Pemerintah Hindia Belanda menawarkan perjanjian bahwa pengobatan penyakitnya itu akan ditanggung oleh pemerintah dengan syarat tidak terlibat aktif di dunia politik. Akan tetapi, penawaran tersebut ditolak tegas oleh Tjipto. Akibatnya, Tjipto dipindahkan ke Makassar, kemudian ke Sukabumi (1940), dan akhirnya ke Batavia sampai meninggal dunia pada 8 Maret 1943.

Sementara itu, Soetomo tampil sebagai tokoh pergerakan nasional yang paling moderat dibandingan dengan Soewardi Soerjaningrat, terlebih dengan Tjipto Mangoenkoesoemo. Dalam pandangan Soetomo, kemerdekaan bisa diraih dengan memperhatikan tiga faktor. **Pertama**, setiap orang harus memiliki kesadaran bahwa mengabdi kepada negerinya merupakan bentuk kewajiban moral dalam konteks cinta tanah air. **Kedua**, pengabdian yang diberikan oleh setiap individu sangat berkaitan dengan jenis pekerjaannya. Artinya, setiap orang harus bekerja sesuai dengan keahliannya sebagai bentuk pengabdian dirinya kepada negera. **Ketiga**, dalam menjalankan pekerjaanya itu, setiap orang harus memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga bisa menjaga keselarasan di dalam masyarakat. Jika hal itu dapat dilakukan, maka perjuangan meraih kemerdekaan dapat berjalan secara harmonis, sebagaimana yang terjadi pada pagelaran gamelan (Scherer, 1985: 230).

Jelas sekali bahwa pemikiran Soetomo tersebut berlandaskan pada nilai-nilai tradisi Jawa sehingga status sosial di masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kondisi tersebut tidak akan mengganggu harmonisasi kehidupan, jika berjalan sesuai dengan kewajibannya yang ditandai dengan bahagia tidaknya suatu golongan. Pandangan inilah yang membedakan dirinya dengan Tjipto yang justru hendak melabrak perbedaan status sosial yang dipandang sebagai salah satu sumber ketidakadilan bagi masyarakat Hindia. Konsep perjuangannya tersebut, diterapkan oleh Soetomo sebagai "ideologi" Partai Indonesia Raya (Parindra). Soetomo

memaparkan bahwa Parindra harus bisa "menuntun para petani dalam berbagai bentuk upaya koperasi, supaya dengan melakukan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan di tengah-tengah rakyat jelata itu, mereka dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, yang berguna membuat Indonesia Mulia" (Scherer, 1985: 244).

D. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa ketiga tokoh pergerakan nasional tersebut memiliki hubungan erat dengan dunia priyayi, meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Ikatan budaya yang melatarbelakangi ketiganya telah memberikan warna terhadap corak perjuangannya. Tjipto, merupakan yang paling radikal dan Soewardi masih berusaha mengembalikan tatanan masyarakat sesuai tradisi Jawa, namun telah diidealkan oleh pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka. Sementara itu, Soetomo berdiri di tengah-tengah dengan sikap moderatnya untuk berperan sebagai penengah atau juru damai.

Meskipun ketiganya menunjukkan sikap dan corak yang berbeda, tetapi mereka memiliki pandangan yang relatif sama. Ketidakadilan karena kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat dalam menuntut haknya di negeri sendiri. Pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh ketiganya, merupakan sumbangan yang sangat berharga, tidak hanya bagi generasi kedua pemimpin pergerakan nasional, melainkan juga bagi bangsa Indonesia.

Ketiganya telah menyumbangkan pemikiran yang luar biasa sehingga Indonesia dapat menggapai cita-cita kemerdekaannya.

Daftar Sumber

Artikel, Buku, dan Media Massa

"Sjarat Mutlak Bagi Pendidikan: Kemerdekaan Nasional" *Mimbar Umum*. 18 October 1949. Hlm. 2.

Abdullah, Taufik dan A. B. Lapian [eds.]. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baroe van Hoeve.

Bachtiar, Harsja W. 1976. "The Development of a Common National Conciousness among Students from the Indonesians Archipelago in the Netherlands" dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*. Jilid IV. No. 2. Hlm. 31.

Balfas, M. 1952. *Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo; Demokrat Sejati*. Djakarta: Djambatan.

Dekker, E.F.E. Douwes. 1913. *Onze Verbanning.* Schiedam: De Toekomst.

Djojohadikusumo, Margono. 1973. *Dr. E.F.E. Douwes Dekker*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasselink, Liesbeth. 2011. *Healers on the Colonial Market. Native Doctor and Midwives in the Dutch East Indies*. Leiden: KITLV Press.

Indonesia. 1950. *20 Mei Pelopor 17 Agustus 1945*. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.

Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Terj. Jiman S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan.

Shiraishi, Takashi. 1981. “The Disputes between Tjipto Mangoenkoesoemo and Soetatmo Soeriokoesoemo: Satria vs Pandita” dalam *Indonesia*. Vol. 32. October 1981. Hlm. 93-108.

Soerjomihardjo, Abdurrachman. 1969. "Sejarah Pergerakan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di dalam Sumber-Sumber Hindia Belanda" dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*. No. 3. Hlm. 201 - 209.

Soetomo. 1934. *Kenang^{2}an*. Surabaya: t.p.

Soewito, Irna Hanny Hadi, 1982. *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. Makalah untuk Seminar Sejaran Nasional III. Seksi Pergerakan Nasional. Jakarta: Depdikbud.

Internet

Dokter Soetomo. Diakses dari http://www. imexbo.nl/dokter-soetomo. html. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.17 WIB.

Dr. Soetomo. Diakses dari http://kebudayaan-indonesia.net/figure/49/dr-soetomo. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 21.24 WIB.

Tiga Dokter Pelopor Pergerakan Nasional. Diakses dari http://sejarahri. com/ perjuangan-para-dokter-di-masa-revolusi/. Tanggal 23 Maret 2017. Pukul 19.44 WIB.

Tjipto Mangoenkoesomo. Diakses dari https://alchetron.com/Tjipto-Mangoen-koesoemo-1270640-W#. Tanggal 24 Maret 2017. Pukul 08.11 WIB.

BIOGRAFI :
DARI SUWARDI SURYANINGRAT
SAMPAI KI HADJAR DEWANTARA

Oleh :
R. Bambang Widodo, S.Pd, M.Pd
Ketua Badan Khusus Permuseuman, Perpustakaan, dan Kearsipan
Majelis Luhur Tamansiswa

Disampaikan pada :
Seminar
“Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dari Politik ke Pendidikan”
di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta
30 Maret 2017

5

BIOGRAFI : DARI SUWARDI SURYANINGRAT SAMPAI KI HADJAR DEWANTARA

A. Pendahuluan

Nama Suwardi Suryaningrat kurang dikenal oleh masyarakat, namun dengan nama Ki Hadjar Dewantara, beliau sangat dikenal, dihormati dan disanjung-sanjung sebagai Pendiri Perguruan Tamansiswa, Bapak Pendidikan Nasional, dan Pahlawan Nasional. Beliau dikenal dan diakui dunia karena kompetensi, keahlian, prestasi dan sumbangsihnya yang luar biasa dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Melalui studi kepustakaan baik berupa tulisan-tulisan maupun benda peninggalan Ki Hadjar Dewantara, serta buku-buku karya para tokoh Tamansiswa dan simpatisan Tamansiswa yang tersimpan di Museum Tamansiswa “Dewantara Kirti Griya”, kami sajikan biografi untuk menggambarkan sosok Ki Hadjar Dewantara sebagai seorang jurnalis, politikus, budayawan, pendidik, dan pemimpin rakyat.

Dari tiap tingkat dan lapangan perjuangan yang ditempuh Ki Hadjar Dewantara, terdapat tulisan-tulisan beliau di berbagai surat kabar, majalah, dan brosur. Dari perjuangan Ki Hadjar Dewantara di lapangan jurnalistik, ke lapangan politik, dan yang terakhir di lapangan pendidikan dan kebudayaan, ditemukan berbagai tulisan yang menggambarkan gagasan dan konsepsinya. Dengan berbagai ragam dan cara mengemukakan gagasan sesuai dengan masa, jaman, dan objek yang dihadapinya, maka seluruh kegiatan Ki Hadjar Dewantara mengandung semangat dan bernafaskan perjuangan menuju cita-cita Indonesia merdeka.

Dengan biografi ini diharapkan dapat menggugah semangat generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan wawasan kebangsaan dan kebudayaan sebagai sendi perjuangan dan pembangunan nasional. Suatu bangsa dan negara akan terasing bila dalam proses sejarahnya lepas dari sendi-sendi perjuangan para pendahulunya.

B. Masa Kanak-Kanak

Ki Hadjar Dewantara pada masa kanak-kanak dan masa muda bernama Raden Mas (R.M.) Suwardi Suryaningrat. Namun sesudah dalam pembuangan di Nederland, gelar kebangsaannya tidak dipakai lagi sebagai pernyataan bersatunya Suwardi Suryaningrat dengan rakyat yang diperjuangkannya. Suwardi Suryaningrat Lahir pada hari Kamis Legi, tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1309 H. Lahirnya pada bulan Ramadhan memunculkan harapan

agar Suwardi Suryaningrat memberi hikmah pendidikan dan peningkatan iman dan takwa.

Suwardi Suryaningrat adalah keturunan bangsawan. Ayahnya Kanjeng Pangeran Ario (K.P.A.) Suryaningrat dan Ibunya bernama Raden Ayu (R.A.) Sandiah. Keduanya adalah bangsawan Puro Pakualaman Yogyakarta. K.P.A. Suryaningrat adalah putera Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (K.G.P.A.A.) Paku Alam III. Dengan demikian Suwardi Suryaningrat adalah cucu K.G.P.A.A. Paku Alam III.

Betapapun kelahiran Suwardi Suryaningrat membahagiakan K.P.A. Suryaningrat yang mengharapkan anak laki-laki, akan tetapi berat badannya kurang dari 3 Kg, badannya kurus, perutnya buncit, suaranya terlalu lembut. K.P.A.Suryaningrat yang suka humor dan gemar berkelakar segera nama julukan **Jemblung** kepada puteranya. Seorang santri sahabat K.P.A. Suryaningrat yang mempunyai pesantren di daerah Prambanan, Kyai Soleman tidak mau menerima begitu saja kelakar K.P.A. Suryaningrat. Ia menuntut haknya sebagai sahabat untuk ikut memberikan nama julukan kepada bayi Suwardi Suryaningrat. K.P.A. Suryaningrat setuju, maka Kyai Soleman memberi nama tambahan **Trunogati.** Kyai Soleman merasa mendapat firasat, dari tangis bayi yang lembut itu, suaranya kelak akan didengar orang di seluruh negeri. Perutnya yang *jemblung* (buncit) itu memberi firasat bayi itu kelak akan menelan dan mencerna ilmu yang banyak, sesudah memasuki masa dewasa ia akan menjadi seorang pemuda yang penting (**Truno** = pemuda; **gati**, wigati = penting, berarti). Oleh

K.P.A. Suryaningrat kemudian disempurnakan nama julukan itu menjadi **Jemblung Joyo Trunogati**. Di kalangan keluarga terdekatnya (ayah, Ibu, kakak dan Pengasuhnya) memanggil Suwardi Suryaningrat dengan julukan **Denmas Jemblung.**

C. Masa Sekolah

Sebagai keluarga bangsawan Suwardi Suryaningrat mendapat kesempatan belajar di *Europeesche Lagere School* (ELS) atau Sekolah Dasar Belanda 7 tahun di kampung Bintaran Yogyakarta, yang tidak jauh dari tempat kediamannya. Sesudah tamat Sekolah Dasar (1904), Surwardi Suryaningrat masuk *Kweekschool* (Sekolah Guru) di Yogyakarta. Tidak lama kemudian datang dr. Wahidin Sudiro Husodo di Puro Pakualaman, beliau menanyakan siapa di antara putera-putera yang mau masuk STOVIA (*School Fit Opleiding Van Indische Artsen*) - Sekolah Dokter Jawa di Jakarta, mendapat bea siswa. Suwardi Suryaningrat menerima tawaran itu dan menjadi mahasiswa STOVIA (1905-1910). Namun karena sakit selama 4 bulan, Suwardi Suryaningrat tidak naik kelas dan beasiswanya dicabut. Namun ada sinyalemen, alasan sakit sesungguhnya bukan satu-satunya sebab dicabutnya beasiswa, tetapi ada alasan politis dibalik itu. Pencabutan beasiswa dilakukan beberapa hari setelah Suwardi Suryaningrat mendeklamasikan sebuah sajak dalam suatu pertemuan. Sajak itu menggambarkan keperwiraan Ali Basah Sentot Prawirodirdjo, seorang Panglima Perang P.Diponegoro. Sajak itu digubah oleh Multatuli dalam Bahasa Belanda yang sangat indah, dibawakan oleh Suwardi

Suryaningrat dengan penghayatan penuh penjiwaan. Pagi harinya, setelah pembacaan sajak itu, Suwardi Suryaningrat dipanggil Direktur STOVIA dan dimarahi habis-habisan. Beliau dituduh telah membangkitkan semangat memberontak terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Tidak ada penyesalan bagi Suwardi Suryaningrat karena gagal menjadi dokter. Lapangan berjuang untuk rakyat bukan hanya sebagai dokter. Bidang jurnalistik, politik, dan pendidikan memberi peluang pula untuk berjuang. Dari Direktur STOVIA, Suwardi Suryaningrat mendapat Surat Keterangan Istimewa atas kepandaiannya berbahasa Belanda. Oleh karena itu, meski dikeluarkan dari STOVIA bernuansa hukuman, dengan senang hati dan penuh kebanggaan Suwardi Suryaningrat menerimanya sebagai konsekuensi dari sebuah perjuangan. Dengan penuh haru tetapi membanggakan, teman-temannya seperti dr. Cipto Mangunkusumo, Sutomo, Suradji Tirtonegoro melepas Suwardi Suryaningrat meninggakan bangku STOVIA.

D. Sebagai Jurnalis dan Politikus

Walaupun tidak dapat menyelesaikan studinya di STOVIA, tetapi beliau memperoleh banyak pengalaman baru. Pada waktu persiapan mendirikan Budi Utomo, Suwardi Suryaningrat berkenalan dengan Dr. Ernest Francois Eugene (E.F.E.) Douwes Dekker. Setelah Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, beliau ikut aktif dalam organisasi tersebut dan mendapat tugas bagian propaganda.

Sesudah meninggalkan STOVIA, Suwardi Suryaningrat

belajar sebagai analis pada laboratorium Pabrik Gula Kalibagor, Banyumas. Setelah satu tahun beliau keluar karena dicabut kesempatan belajarnya secara cuma-cuma. Kemudan menjadi pembantu apotiker di Apotik Rathkamp, Malioboro Yogyakarta (1911), sambil menjadi jurnalis (wartawan) pada Surat Kabar"*Sedyotomo"*(Bahasa Jawa) dan "*Midden Java"* (Bahasa Belanda) di Yogyakarta dan "*De Express"* di Bandung.

Pada Th. 1912 Suwardi Suryaningrat dipanggil Dr. E.F.E. Douwes Dekker ke Bandung untuk bersama-sama mengasuh Suratkabar Harian "*De Express"*. Tulisan pertama beliau berjudul*"Kemerdekaan Indonesia*". Di samping itu Suwardi Suryaningrat menjadi Anggota Redaksi Harian *"Kaoem Muda*" Bandung, "*Oetoesan Hindia"* Surabaya, "*Tjahaja Timoer*" Malang. Suwardi Suryaningrat menerima tawaran dari HOS. Tjokroaminoto mendirikan Cabang "*Serikat Islam*" di Bandung dan sekaligus menjadi Ketuanya (1912).

Pada 6 September 1912 Suwardi Suryaningrat masuk menjadi Anggota *"Indische Partij"*bersama Dr. E.F.E. Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusumo. Indische "*Partij"* adalah Partai Politik pertama yang berani mencantumkan tujuan ke arah *"Indonesia Merdeka*". Selanjutnya pada Juli 1913 Suwardi Suryaningrat bersama dr. Cipto Mangunkusumo di Bandung mendirikan "*Comite Tot Herdenking van Nederlandsch Honderdjarige Vrijheid",* dalam bahasa Indonesia disingkat Komite Bumi Putera, yaitu Panitia untuk memperingati 100 tahun Kemerdekaan Nederland. Komite tsb. untuk memprotes akan adanya peringatan 100 tahun Kemerdekaan Nederland

dari penjajahan Perancis yang akan diadakan pada 15 Nopember 1913. Satu keganjilan dan satu penghinan yang tak ada taranya sikap Pemerintah Hindia Belanda itu, berpesta merayakan kemerdekaan bangsanya di tengah-tengah bangsa yang dijajahnya dan menyuruh rakyat jajahannya untuk membiayainya. Komite Bumi Putera juga menuntut agar Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan Parlemen (DPR) di Indonesia.

Protes tsb. diwujudkan oleh Suwardi Suryaningrat dengan menulis risalah berjudul "*Als ik eens Nederlander was*" (Andai aku seorang Belanda), dan dr. Cipto Mangunkusumo berjudul "*Kracht of Vrees?*" (Kekuatan atau Ketakutan?). Untuk kedua kalinya Suwardi Suryaningrat menulis *"Een voor Allen, maar ook Allen voor Een"* (Satu buat semua, tetapi juga semua buat satu). Kemudian Dr. E.F.E.Douwes Dekker yang baru pulang dari luar negeri memuji tindakan-tindakan Suwardi Suryaningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo dengan menulis "*Onze Helden, Tjipto Mangoenkoesoemo en R.M. Soewardi Soerjaningrat."*(Pahlawan-pahlawan kita, Tjipto Mangunkusumo dan R.M. Soewardi Soerjaningrat).

Puncak karir Suwardi Suryaningrat sebagai wartawan pejuang ialah tatkala beliau menulis "Als ik eens Nederlander was". Risalah yang diterbitkan pada Juli 1913 itu merupakan risalah yang terkenal, karena berisi sindiran yang tajam sekali bagi Pemerintah Hinda Belanda. Risalah yang dicetak 5.000 eksemplar itu untuk memprotes kebijakan Pemerintah Kolonial Hinda Belanda yang akan merayakan kemerdekaan negeri Belanda dari Penjajahan Perancis.

Karena tulis-tulisan yang sangat pedas itu, Tiga Serangkai : Suwardi Suryaningrat, dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. E.F.E. Douwes Dekker ditangkap dan ditahan dalam penjara. Pada 18 Agustus 1913 keluarlah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda N0. 2a, Suwardi Suryaningrat dibuang ke Bangka, dr. Cipto Mangunkusumo ke Banda Neira, dan Dr. E.F.E. Douwes Dekker ke Timor Kupang. Namun atas kesepakatan mereka bertiga meminta supaya dibuang ke Nederland, dan permitaan mereka dikabulkan. Suwardi Suryaningrat ditawari dan dinasehati oleh Mr. Van Deventer agar bersedia menjadi Guru Pemerintah Hindia Belanda di Bangka sehingga bebas dari hukuman pembuangan, tetapi ditolaknya, walaupun Dr. E.F.E. Douwes Dekker menyetujuinya.

Ada satu hal yang menarik, saat sidang pengadilan dan vonisdijatuhkan,K.P.A.Suryaningrathadir.Begitusidangditutup, Suwardi Suryaningrat langsung menghampiri ayahandanya. Sesaat kemudian K.P.A.. Suryaningrat mengulurkaan tangannya seraya berkata “Aku bangga atas perjuangannya. Terimalah doa dan restu Bapak. Ingat, seorang ksatria tidak akan menjilat ludahnya kembali”.

Pada malam perpisahan dengan keluarga K.P.A. Suryaningrat di Yogyakarta diadakan selamatan dengan menggelar pentas wayang kulit semalam suntuk dengan lakon “Dewa Mambang”, yang secara Implisit menggambarkan perjuangan Suwardi Suryaningrat mengangkat harkat dan martabat bangsanya.

R.M. Suwardi Suryaningrat dan R.Ay. Sutartinah Sasraningrat, pasangan temanten baru yang belum genap dua

mingggu dinikahkan, berangkat ke Belanda pada 6 September 1913. Bersamaan itu berangkat juga Dr. E.F.E. Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusoumo. Ketika singgah di Teluk Benggala pada 14 September 1913, di atas Kapal Bungalow, Suwardi Suryaningrat menulis surat kepada kawan-kawan seperjuangannya di Tanah Air yang isinya agar sekuat tenaga mencegah jangan sampai terjadi perayaan kemerdekaan Belanda terjadi di Indonesia.

Dalam pembuangan di negeri Belanda Suwardi Suryaningrat beserta keluarganya hidup serba kekurangan. Bantuan didapat dari dana yang dikumpulkan oleh para pengurus Indische Partij yaitu "TADO (*Tot Aan De Onafhankelijkheid*) Fonds". Penghasilannya dibantu profesi sebagai jurnalis dalam harian "*Het Volk"*, Redaktur *"Hindia Poetera*", majalah"*Indische Vereeniging*", mingguan *"De Indier",* majalah "*Indische Partij",* majalah "*Het Indonesisch Verbond van Studeerenden*". Atas anjuran perkumpulan " *Algemeen Nederlandsch Verbond", "Oost en West"* dan "*Sociaal Democraties Arbeiders Part*y", Suwardi Suryaningrat berkeliling memberi ceramah dan penerangan dengan film. Beliau menerangkan keadaan yang nyata mengenai Indonesia dan keinginan rakyat, melawan cerita-cerita bohong yang disebarkan oleh Pemerintah Belanda tentang keadaan Indonesia.

Selama dalam pembuangan Suwardi Suryaningrat memperdalam Ilmu Pendidikan dengan mengikuti kursus-kursus tertulis dan kursus-kursus malam hingga berhasil meraih Akte Guru Eropa dalam pendidikan Paedagogie pada 12 Juni 1915.

Sedangkan R.A. Sutartinah mengajar di *Frobel School* yaitu Taman Kakan-Kanak di Weimaar, Den Haag. Kegiatan di bidang seni budaya, Suwardi Suryaningrat menyalin gending “Kinanti Sandoeng” ciptaan Mangkunegara IV dalam notasi balok. Tembang itu dipergelarkan pertama kali di depan perkumpulan mahasiswa di Den Haag pada 30 Agustus 1916, dinyanyikan oleh N. Roelofswaard dengan iringan Piano C. Kleute. Keduanya adalah mahasiswi *Koninklyke Conservatorium*.

Sesuai dengan tujuan semula, Suwardi Suryaningrat, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. E.F.E. Douwes Dekker minta dibuang ke negeri Belanda karena ingin melanjutkan perjuangan di negeri Belanda. Surat-surat kabar Belanda yang bersikap sangat bersahabat dengan Tiga Serangkai yaitu “*Het Volk*” dan *“De Nieuwe Grone Amsterdamer*” memberi kesempatan kepada Tiga Serangkai untuk menulis dan menyalurkan pikiran-pikiran tentang cita-cita perjuangan kemerdekan bangsa Indonesia. Berkat pengaruh Tiga Serangkai, maka penghimpunan para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang tergabung dalam “*Indische Vereeniging”* semakin menonjolkan semangat kebangsaan dan semangat kemerdekaan, dan berani mengubah namanya menjadi “Perhimpunan Indonesia”.

Suwardi Suryaningrat berkecimpung dalam pers pergerakan yang menjadikan kesadaran berpolitiknya berkembang. Dunia jurnalistik yang ditekuni Suwardi Suryaningrat telah membawanya ke ranah pergaulan yang lebih luas dan progresif. Beliau mendapatkan kesempatan mengutarakan berbagai pemikiran dan persoalan yang dihadapi

bangsanya. Tulisan-tulisan di berbagai surat kabar, majalah, dan brosur menjadi suluh bagi bangsanya yang sedang dirundung kegelapan.

Dari Tiga Serangkai yang diasingkan di negeri Belanda tsb., dr. Cipto Mangunkusumo diizinkan pulang kembali ke Indonesia karena sakit pada tahun 1914 dan Dr. E.F.E. Douwes Dekker pada tahun 1918. Sedangkan Suwardi Suryaningrat baru pulang ke Indonesia pada tahun 1919. Sebenarnya Suwardi Suryaningrat sudah dibebaskan pada 17 Agustus 1917 oleh Pemerintah Hinda Belanda. Namun beliau belum bisa kembali ke tanah air, karena di Eropa sedang berkecamuk Perang Dunia I. Di samping itu, belum cukup dana untuk pulang ke tanah air. Para simpatisan kulit putih Mr. Van Deventer mengumpulkan dana kepulangan kel.Suwardi Suryaningrat, namun dengan sopan ditolak.

Hukuman pengasingan, bagi Suwardi Suwardi Suryaningrat dipergunakan untuk terus mengobarkan semangat perjuangan, yaitu :

Menulis "*Terug naar het front*" (Kembali ke medan perjuangan) dalam *"Het Volk*" dan *"De Groene Amsterdammer*"(15 September 1917).

Aktif memimpin pertunjukan kesenian dalam Peringatan HUT ke-10 Budi Utomo di Nederland pada 20 Mei 1918, dan istri beliau menari sebagai Pergiwa, serta menerbitkan buku kenang-kenangan "Sumbangsih" bersama Drs. Sosrokartono dan RM. Notosuroto.

Mendirikan Kantor Berita "*Indonesisch Persbureau*" (IPB) yang merupakan badan pemusatan penerangan dan propaganda pergerakan nasional Indonesia di Den Haag (September 1918). Hal tsb. baru untuk pertama kalinya nama "Indonesia" dipakai di suratkabar negeri Belanda. IPB digunakan Suwardi Suryaningkat untuk berkorespondesi dengan suratkabar di Indonesia. IPB melakukan perlawanan melalui berbagai tulisan terhadap rencana Pemerintah Kolonial Belanda membentuk "*Koloniale Raad".* Gerakaan IPB mencermikan keberanian Suwardi Suryaningrat di samping ketajaman pemikiran dan kejeliannya melihat kekuatan media massa sebagai pembentuk opini publik. Langkah-langkah yang digunakan IPB menunjukkan kemampuan dan kepandaian Suwardi Suryaningrat menggunakan tidak hanya satu alat perjuangan, media massa merupakan alat perjuangan di bidang politik.

Belajar seni drama dari Herman Kloppers sekaligus memperdalam kepiawaiannya dalam seni budaya.

Pada 26 Juli 1919 Suwardi Suryaningrat bersama isteri dan kedua puteranya yang lahir di negeri Belanda, yaitu: Niken Pandasari Sutapi Asti (29 Agustus 1915) dan Subroto Aryo Mataram (5 Juni 1917), kembali ke tanah air dan sampai di Jakarta 6 September 1919. Kemudian beliau ke Bandung menghadap Pengurus Besar "*Nationaal Indische Partij"* (NIP). Suwardi Suryaningrat kembali menjabat Sekjen Pengurus Besar NIP, sambil memimpin majalah "*De Beweging", "Persatuan Hindia", " De Express" dan "Panggugah".*

Suwardi Suryaningrat menjadi jurnalis pertama Indonesia yang terkena ranjau *"delict pers"* atas pidato dan tulisannya yang pedas dengan hukuman penjara di Semarang pada 5 Agustus 1920. Suwardi Suryaningrat terkena delik pers yang kedua kalinya pada November 1920. Ia dituduh menghina Sri Baginda Ratu Wilhelmina, Badan Pengadilan, dan Pangreh Praja, dan menghasut untuk meroobohkan Pemerintah Hindia Belanda. Sesudah keluar dari penjara, tidak lama kemudian beliau masuk penjara lagi terkena "*delict pidato",* dijatuhi hukuman 3 bulan dipenjara di Mlaten Semarang, kemudian dipindahkan ke Pekalongan. Walaupun menurut peraturan Pemerintah Hindia Belanda seseorang keturunan bangsawan seharusnya dibedakan penjaranya dengan hukuman biasa, namun Suwardi Suryaningrat disatukan dengan narapidana lainnya. Setelah dibebaskan, Suwardi Suryaningrat kembali menetap di Yogyakarta.

Pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan yang memberi pencerahan dan pemikiran Suwardi Suryaningrat, jusru ketika beliau menjalani masa pembuangan di negeri Belanda. Di sanalah beliau banyak mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran dari Montessori, Dalton, Frobel, pesantren, asrama dll. Pergulatan pemikirannya tentang pendidikan di negeri Belanda, membuat Suwardi Suryaningrat pada serangkaian realitas tentang sistem pendidikan yang masih dipertahankan para kyai dengan pondok pesantrennya.

E. Mendirikan Perguruan Tamansiswa

Awal berdirinya Perguruan Tamansiswa tidak lepas dari peran R.Ay. Sutartinah. Pada Agustus 1920 Suwardi Suryaningrat yang sedang menjalani hukuman penjara di Pekalongan diizinkan menjenguk isterinya yang sakit pendarahan berat karena melahirkan putera ketiga. R.Ay. Sutartinah mengingatkan atas gagasan Suwardi Suryaningrat yang pernah disampaikan kepada K.H. Ahmad Dahlan di Semarang (1919), bahwa harus ada suatu Perguruan Nasional yang mendidik kader-kader perjuangan untuk menentang penjajah. Ketika mendengar kata-kata isteri beliau, seolah-olah Suwardi Suryaningrat mendapat ilham ("wisik") kemudian dengan penuh semangat teringat gagasannya dan mulai detik itu beliau berniat sungguh-sungguh akan mendirikan Perguruan Nasional, jika telah bebas dari hukuman penjara. Ayah Suwardi Suryaningrat menyetujui dan sebagai saksi atas ikrar tsb., K.P.A. Suryaningrat memberikan tambahan nama "Tarbiah" kepada putera ketiga Suwardi Suryaningrat sehingga bernama Ratih Tarbiah yang lahir pada 22 Agustus 1920.

Pengalaman Suwardi Suryaningrat di lapangan perjuangan politik, dengan melalui berbagai rintangan, pembuangan, dan penjara dengan segala hasilnya, menimbulkan pemikiran baru untuk mencari cara dan jalan menuju Kemerdekaan Indonesia. Suwardi Suryaningrat menginsyafi bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa harus didasari jiwa merdeka dan jiwa nasional dari bangsanya, maka diperlukan penanaman jiwa merdeka dimulai sejak anak-anak.

Selanjutnya pada tahun 1921 – 1922 Suwardi Suryaningrat aktif dalam perkumpulan "*Selasa Kliwonan*" yang beranggotakan tokoh-tokoh politik, kebudayaan, dan kebatinan, yaitu : R.M. Sutatmo Suryokusumo (seorang tokoh Budi Utomo yang progresif), Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Pronowidigdo, Ki Prawirowiworo, RM. Gondoatmojo, B.R.M. Subono, R.M.H. Suryo Putro (paman Suwardi Suryaningrat), dan Ki Ageng Suryomataram.

Sarasehan tsb. membahas kehidupan dan nasib bangsa Indonesia yang sengsara dan penuh penderitaan, dengan mencari jalan untuk menegakkan dan membina kepribadian bangsanya. Hasil analisisnya bercita-cita : "*Memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa", dan "memayu hayuning bawono*"(membahagiakan diri, bangsa, dan dunia). Cita-cita tsb. tidak cukup hanya dicapai melalui pergerakan politik saja, tetapi harus dicapai dengan pendidikan rakyat serta memperbaiki jiwa dan mental bangsa. Akhirnya Sarasehan Slasa Kliwonan memutuskan: Ki Ageng Suryomataram bertugas menangani mendidik orangtua, dengan Ilmu Jiwa *"Kawruh Begja"* yang kemudian berkembang menjadi *"Kawruh Jiwa*". Sedangkan Suwardi Suryaningrat dengan beberapa kawannya : R.M. Sutatmo Suryokusumo, Ki Pronowidigdo, R.M.H. Suryo Putro, Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Cokrodirjo, dan BRM. Subono serta R.Ay. Sutartinah diserahi tugas menangani pendidikan anak-anak.

Dengan pengalamannya bekerja sebagai guru di Perguruan *"Adhidarma"* milik kakanya RM. Suryapranoto, akhirnya pada

Senin Kliwon, 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat dkk mendirikan *"Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa"* di jl. Tanjung, Pakualaman, Yogyakarta, membuka bagian Taman Anak atau Taman Lare, yaitu satuan pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak (Taman Indria). Kemudian pada 7 Juli 1924 mendirikan "Mulo Kweekshool" setingkat SMP dengan pendidikan guru (4 tahun sesudah pendidikan dasar). Pada tahun 1928 tamatan Mulo Kweekshool dapat masuk AMS (Algemene Middelbare School) setingkat SMA Negeri hampir 70%. Dengan kesuksesannya itu bangsa Indonesia tergugah semangat dan makin tebal rasa harga dirinya.

Lahirnya Perguruan Nasional Tamansiswa mendapat sambutan luar biasa dari segala lapisan masyarakat. Setelah ditangani oleh pengurus yang bersifat kolektif kolegial yang disebut *"Instituutraad"* diperluas menjadi *"Hoofdraad"* (nama sekarang Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa), dan ditegaskan bahwa Perguruan Nasional Tamansiswa merupakan "badan wakaf merdeka". Ratusan Perguruan Tamansiswa tumbuh di mana-mana dijiwai oleh semangat cinta tanah air. Suwardi Suryaningrat dengan Tamansiswanya terkenal di mana-mana. Sang Pujangga Rabindranath Tagore dari Shanti Niketan, Bolpur India, dengan rombongan yang dipimpin Prof. Dr. Chatterjee dalam kunjungan ke Indonesia memerlukan datang di Yogyakarta untuk mengunjungi Perguruan Tamansiswa (Agustus 1927). Demikian pula Prof. Dr. R. Bunche (USA), seorang pelopor dalam memperjuangkan persamaan hak menikmati pendidikan bagi orang-orang Negro, tertarik untuk mempelajari gerakan

Tamansiswa dalam memperjuangkan hak rakyat Indonesia untuk menikmati pendidikan bagi rakyat Indonesia (Tahun 1939).

Pada 3 Februari 1928 Suwardi Suryaningrat genap berusia 40 tahun menurut tarikh Jawa (5 windu) dan berganti nama Ki Hadjar Dewantara. Menurut Ki Utomo Darmadi, *Hadjar* : pendidik; *Dewan* : Utusan; *tara* : tak tertandingi. Jadi maknanya: Ki Hadjar Dewantara adalah Bapak Pendidik utusan rakyat yang tak tertandingi menghadapi kolonialisme. Pergantian nama tsb. merupakan sublimasi misi hidup dari "Satriyo Pinandhito" menjadi "Pandhito Sinatriyo" (Satriyo yang sekaligus bersikap laku Pandhito–Pendidik, kemudian meningkat menjadi Pandhito-Pendidik yang secara simultan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran= misi utama Satriyo).

Tamansiswa sebagai salah satu lembaga pendidikan yang didirikan Ki Hadjar Dewantara telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan yang memerdekakan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi sistem pendidikan nasional. Kehadiran Ki Hadjar Dewantara dalam membangun Tamansiswa memiliki spektrum sejarah nasional, yang takluput dari stretegi kebudayaan yang digelutinya. Beliau menjadikan **Trikon** (Kontinyu, konvergen, konsentris) dalam proses kebudayaannya. **Kontinyu** : berkesinambungan dengan masa lalu, **Konvengen** : bertemu secara terbuka dengan perkembangan alam dan zaman. Dan **Konsentris** : menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan, dunia.

Ki Hadjar Dewantara memang tidak pernah ragu menetapkan sistem dan model pendididkannya berbasis pada

kebudayaan lokal-nasional. Beliau hendak mengangkat model pendidikan pribumi untuk menghadapi sistem pendidikan kolonial, selanjutnya digerakkan secara serentak untuk mencapai kemerdekaan nasional.

Ada empat strategi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, *Pertama*: pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri; *kedua* : membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional; *ketiga* : membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir- pelopor; dan *keempat* : mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi Korat Alamnya masing-masing siswa.

Selama 37 tahun Ki Hadjar Dewantara memimpin dan mengasuh Perguruan Tamansiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Ki Hadjar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Padepokan Ki Hadjar Dewantara dan disemayamkan di Pendapa Agung Tamansiswa Yogyakarta. Jenazah Ki Hadjar Dewantara dimakamkan pada tanggal 29 April 1959 secara militer dengan Inspektur Upacara Kolonel Soeharto di makam Taman Wijaya Brata, Celeban, Yogyakarta.

Ki Hadjar Dewantara meninggalkan seorang isteri Nyi Hadjar Dewantara dan 6 orang anak: Ni Niken Wandansari Sutapi Asti, Ki Subroto Aryo Mataram (Brigjend. TNI), Nyi Ratih Tarbiyah, Ki Sudiro Ali Murtolo (lahir 9 Agustus 1925), Ki Bambang Sokawati (lahir 9 Maret 1930) dan Ki Syailendra Wijaya (lahir 28 September 1932).

Semua benda bersejarah, buku, surat, penghargaan, dan barang-barang perabot rumah tangga peninggalan Ki Hadjar Dewantara kini tersimpan di Museum “Dewantara Kirti Griya” Jl. Tamansiswa No. 25 Yogyakarta.

F. Perjuangan, Jasa, dan Penghargaan

Di bidang pendidikan, prasaran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan Nasional dan penyelenggaraan/pembinaan perguruan nasional diterima oleh Kongres Perkumpulan Partai-partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) di Surabaya. Dalam kongres yang berlangsung 31 Agustus 1928 tsb., beliau mengemukakan perlunya pengajaran nasional sebelum bangsa Indonesia mempunyai Pemerintahan Nasional sendiri.

Di bidang pers, bagi Ki Hadjar Dewantara majalah atau surat kabar merupakan wahana yang sangat penting bagi suatu lembaga untuk menyebarkan cita-citanya kepada masyarakat. Oleh karena itu, beliau menerbitkan brosur dan majalah. Majalah *“Wasita*” (tahun 1928-1931),selanjutnya menerbitkan majalah *“Pusara”* (1931*)*. Di samping kedua majalah tsb., Ki Hadjar Dewantara juga menerbitkan Majalah “*Keluarga*” dan *“Keluarga Putera”* (1936).

Sedangkan di bidang kesenian, Ki Hadjar Dewantara mengarang buku methode/notasi nyanyian daerah Jawa “*Sari Swara”,* diterbitkan tahun 1930 oleh JB. Wolters. Dari buku tsb. Ki Hadjar Dewantara menerima royalty, untuk membeli mobil Sedan Chevrolet. Sebelumnya, beliau pada tahun 1926 menciptakan lagu/gendhing Asmaradana “Wasita Rini”

diperuntukan bagi para anggota Wanita Tamansiswa.

Ketika seluruh pergerakan nasional makin hidup dan kuat, maka Pemerintah Hindia Belanda bertindak waspada. Tindakan itu diarahkan kepada pergerakan sosial, terutama bidang pendidikan, maka dibuatlah Undang-Undang "Ordonansi Sekolah Liar" atau *"Onderwijs Ordonantie*" disingkat OO 1932, dimuat dalam Staatblad 1932 No. 494 yang diumumkan berlaku pada 1 Oktober 1932.

Sikap Ki Hadjar Dewantara terhadap diberlakukannya OO 1932 tsb, beliau langsung mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal di Bogor yang isinya menentang OO 1932. Ki Hadjar Dewantara menyatakan akan melawan terus dengan *"lijdelijk verzet*", *"passive resistance", "non-violence", dan "ahimsa".*

Perlawanan Ki Hadjar Dewantara bersama Tamansiswa menghadapi OO 1932 mendapat sambutan yang amat besar dari kalangan masyarakat luas. Seluruh pergerakan rakyat baik yang bersifat politik, agama, maupun sosial serta media massa: *"Perwata Deli", "Suara Umum", "Aksi", "Suara Surabaia", "Sedyatama", "Darmokondo", "Bintang Timur", "Timbul"* dan Koran-koran di Sumatera, semuanya secara serentak mendukung perlawanan Ki Hadjar Dewantara, sehingga perlawanan tsb. menjadi aksi massa. Akhirnya OO 1932 ditunda untuk satu tahun lamanya dan menghidupkan lagi Ordonansi lama Tahun 1923/1925. Penetapan penundaan OO 1932 itu telah disahkan dalam *Staatsblad* No.66 tanggal 21 Februari 1933.

Usaha Pemerintah Hindia Belanda menindas Tamansiswa berjalan terus. Pada tahun 1935 pegawai negeri ditakut-takuti

jika memasukkan anaknya sekolah di Tamansiswa. *"Vrijbijljet*" (Kartu Percuma) anak pegawai Kereta Api yang menjadi murid Tamansiswa dicabut. *"Kindertoelage*" (Tunjangan anak) pegawai negeri dicabut jika terus menyekolahkan anaknya di Tamansiswa, disusul "*Loon Belasting*" (pajak upah). Namun Tamansiswa menolak dan tidak mau membayar, karena sistem hidup keluarga Tamansiswa tidak mengenal hubungan majikan dan buruh, Tidak mengenal upah tetapi "nafkah". Setelah lima tahun terus-menerus Tamansiswa di bawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara melawannya, akhirnya pajak upah dibebaskan pada 15 JUli 1940, Pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengakui aturan hidup kekeluargaan Tamansiswa.

Perjuangan dan peran Ki Hadjar Dewantara pada masa Pemerintahan Balatentara Jepang sampai dengan Pemerintah RI, berturut-turut sebagai :

. Anggota "*Empat Serangkai"* bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan K.H. Mas Mansyoer, mendirikan dan memimpin "*Pusat Tenaga Rakyat*" (Oktober 1942).

. Anggota "*Tjuo Sangiin"* yaitu Badan Pertimbangan Dai Nippon (Oktober 1943) dan sebagai "*Kenkoku Gakuin Kyozu"* (22 April 1944).

. "Naimubu Bunkyo Kyoku Sanyo (Penasehat Departemen Pendidikan Pemerintah Balatentara Jepang)- 1 Desember 1944.

. Anggota "Dokuritzu Jumbi Chosakai" atau "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" disingkat BPUPKI, kemudian menjelma menjadi ""'Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia" disingkat PPKI (29 April 1945) dan "Naimubu Bunkyu Kyokucho (15 Juli 1945).

. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada Kabinet RI yang pertama (19 Agustus – 15 November 1945).

. Ketua Panitia Penyelidikan Pendidikan dan Pengajaran RI (15 Februari 1946)

. Ketua Panitia Pembantu Pembentukan Undang-Undang Pokok Pendidikan (1946)

. Mahaguru Sekolah Polisi RI, Mertoyudan, Magelang (1 Agustus 1946)

. Dosen Akademi Pertanian Yogyakarta (1 Februari 1947)

. Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI (23 Maret 1947)

. Anggota Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam di Sekolah Rakyat Negeri Yogyakarta (10 April 1947)

. Anggota Dewan Kurator Akademi Pertanaian/Kehutanan RI (27 Maret 1948)

. Pencetus dan Ketua Panitia Pusat Peringatan 40 Tahun Hari Kebangunan Nasional di Yogyakarta (20 Mei 1948).

. Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (6 Juni 1949)

. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (1 Juli 1949)

. Ketua Panitia Asahan – Selatan dan labuhan Ratu (21 November 1949)

. Anggota Panitia Perencana Lambang Negara RIS (16 Januari 1950).

. Anggota Badan Pertimbangan RI (6 November 1951)

. Anggota DPR RIS – DPRS RI (17 Agustus 1950 – 1 April 1954).

. Anggota Kehormatan Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (6 Februari 1957).

. Ketua Panitia Pusat Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta (20 Mei 1952).

Menurut Ki Nayono (Ketua Bagian Kekeluargaan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa), dalam buku “Mengenal Taman Wijaya Brata, Makam Pahlawan Perjuang Bangsa”, ada tiga catatan penting dari beliau, yaitu : *Pertama* : Atas inisiatif Ki Hadjar Dewantara pada 20 Mei 1948 diperingati tanggal lahir Boedi Oetomo yang ke-40 untuk pertama kalinya di Ibukota Negara Yogyakarta. Selaku Ketua Panitia, Ki Hadjar Dewantara menyatakan lahirnya Boedi Oetomo dijadikan Hari Kebangunan Nasional, yang oleh Presiden Soekarno istilah Kebangunan Nasional diganti menjadi **Hari Kebangkitan Nasional**. Peringatan itu untuk mengingatkan bangsa Indonesia yang mulai terpecah belah akibat pertarungan ideologi dan kepentingan pribadi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa agar bersatu kembali. Pada peringatan tsb. ribuan rakyat Yogyakarta digerakkan oleh Ki Hadjar Dewantara dengan secara simbolik “menggempur” Benteng Vredenburg Yogyakarta, kemudian dinyatakan Benteng Kolonial Belanda yang telah dihancurkan secara simbolik itu akan dijadikan “*Cultuur Centrum*” (pusat kegiatan budaya).

Sedangkan yang *kedua*: Pada masa pendudukan tentara Belanda Desember 1948, Ki Hadjar Dewantara menerima penyerahan kain Putih sebagian dari lembar Bendera Pusaka

dari Ibu Fatmawati, isteri Presiden Soekarno, dengan maksud agar jangan sampai Bendera Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan 17 Agustus 1945 itu dirampas Belanda. Lembar kain Merah terpisah disimpan M. Tahar (Pejabat Istana Presiden di Gedung Agung Yogyakarta). Akhirnya sesudah Belanda ditarik dari Yogyakarta, Bendera Merah Putih disatukan kembali dan dikibarkan pada 17 Agustus 1949. *Ketiga* : Sehabis menutup seminar Pancasila di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Februari 1959) , Presiden Soekarno menjenguk Ki Hadjar Dewantara yang sedang sakit. Presiden Soekarno menginformasikan kesimpulan seminar Pancasila sangat tepat dijadikan Dasar Negara RI dan UUD 1945 perlu kembali dijadikan UUD NKRI. Ki Hadjar Dewantara menyatakan membenarkan dan sangat mendukungnya. Tanggapan Ki Hadjar Dewantara tsb. menjadi pendorong bagi Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden RI untuk kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959.

Atas jasa-jasa dan perjuangannya, Ki Hadjar Dewantara mendapat penghormatan dan berbagai tanda penghargaan, yaitu:

1. Tanggal 8 Maret 1955 ditetapkan Pemerintah RI sebagai Perintis Kemerdekaan RI
2. Tanggal 19 Desember 1956 menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Kebudayaan dari Rektor (Presiden Universitet) UGM Prof. Dr. Sardjito.
3. Tanggal 26 April 1959Ki Hadjar Dewantara wafat dalam usia 70 tahun, dimakamkan di makam Wijayabrata Tamansiswa Yogyakarta dengan upacara kenegaraan sebagai Perwira

Tinggi secara Anumerta.

4. Tanggal 18 Mei 1959 diangkat sebagai Anggota Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat) secara *Posthum*, atas jasanya di bidang jurnalistik.
5. Tanggal 28 Nopember 1959 diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah RI.
6. Tanggal 16 Desember 1959 dengan Kepres No.316/1959, Hari lahir Ki Hadjar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.
7. Tanggal 17 Agustus 1960 dianugerahi Bintang Mahaputera Kelas I oleh Presiden RI.
8. Tanggal 20 Mei 1961 menerima tanda kehormatan Satya Lencana Kemerdekaan RI.
9. Tanggal 27 November 1961 mendapat anugerah Rumah Pahlawan dari Pemerintah RI di kompleks Padepokan Ki Hadjar Dewantara, Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta.
10. Tanggal 20 Mei 1976 dianugerahi gelar Perintis Pers Nasional oleh Dewan Pers
11. Tanggal 6 September 1977 dengan Keputusan Menteri P dan K RI No.0398/M/1977, ditetapkan lambang Departeman P dan K di dalamnya terdapat adagium "**Tutwuri Handayani**".
12. Hari wafat Ki Hadjar Dewantara tanggal 26 April ditetapkan menjadi Hari Bakti Tamansiswa, dan Ki Hadjar Dewantara mendapat tanda penghargaan Purnasetiawan Tamansiswa dari Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
13. Tanggal 9 Desember 1981 Pinisepuh Persatuan Tamansiswa Ki Suryobroto mengukuhkan nama Kapal Latih K.R.I."Ki

Hadjar Dewantara" No. Lambung 364 di dermaga Cilacap.

14. Sistem Paguron, wawasan kebangsaan dan kebudayaan Ki Hadjar Dewantara menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Taman Taruna Magelang, yang didirikan atas kerjasama ABRI dengan Tamansiswa (14 Juli 1990)

G. Ajaran:

Ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara meliputi bermacam ragam, ada yang sifatnya konsepsional, petunjuk operasional-praktis, dan fatwa atau nasehat.

A. Konsepsi tentang Kepemimpinan:

1. **Demokrasi dan Kepemimpinan** (*Democratie en Leinderschap*) : merupakan wujud demokrasi yang dilandasi oleh jiwa kekeluargaan, dan sejiwa dengan Demokrasi Pancasila. Demokrasi tsb. memperhatikan unsur kemerdekaan yang mengenal batas, yaitu tertib damainya kehidupan bersama, dan juga menolak unsur kekuasaan mutlak (otoriter). Setiap permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama/mufakat.
2. **Trilogi Kepemimpinan** : Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani. Trilogi ini semula hanya diperuntukkan di kalangan pendidikan, dan merupakan perangkat pendidikan dalam melaksanakan tugas pendidikan yang berjiwa kekeluargaan. Namun dalam perkembangannya, Trilogi Kepemimpinan telah

menjadi salah satu model kepemimpinan nasional, sebagai sarana mengatur tata kehidupan bersama, baik di kalangan Pemerintah, TNI/Plori, maupun sipil.

B. Konsepsi tentang Pendidikan:

1. **Tripusat Pendidikan**: menegaskan bahwa pendidikan yang diterima peserta didik terjadi di tiga lingkungan, yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan kemasyarakatan. Ketiga lingkungan hidup tsb. mempunyai pengaruh edukatif dalam pembentukan kepribadian Sang Anak.
2. **Sistem Among**: suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan Kodrat Alam dan Kemerdekaan. Sistem Among menurut cara berlakunya disebut sistem "Tutwuri Handayani".

C. Konsepsi tentang Kebudayaan:

1. Pembinaan Kebudayaan Nasional, yang dikenal dengan **Trikon** (kontinuitas, kosentrisitas, dan konvergensi).
2. Perwujudan Kebudayaan Nasional, yang dikenal sebagai teori tentang "**Sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan ndaerah sebagai modal utama bagi terwujudnya kebudayaan nasional".**

D. Pedoman operasional - praktis:

1. **Tri Pantangan**: pantang menyalahgunakan kekuasan/

wewenang, pantang menyalah-gunakan keuangan, pantang melanggar kesusilaan.

2. **Trihayu** : memayu hayuning sarira, bangsa, manungsa
3. **Trisaksi jiwa** : cipta, rasa, karsa
4. **Tringa** : ngerti, ngrasa, nglakoni
5. **Triko** : kooperatif, konsultatif, korektif
6. **Trijuang** : berjuang memberantas kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan
7. **Tri-N**: niteni, niroke, nambahi.

E. Fatwa dan Semboyan:

Beberapa semboyan, perlambang, dan fatwa yang disampaikan Ki Hadjar Dewantara di antaranya berasal dari para Pinisepuh Tamansiswa dan peninggalan para leluhur/ nenek moyang kita, yaitu:

1. **Lawan Sastra Ngesti Mulya** (1852 Qaka/1922 Masehi): Dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan. Inilah yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara dengan Tamansiswanya, untuk kemuliaan bangsa dan rakyat. Semboyan ini menjelaskan maksud tahun berdirinya Perguruan Tamansiswa.
2. **Suci Tata Ngesti Tunggal** (1854 Qaka/1923 Masehi): Dengan kesucian batin dan teraturnya hidup lahir kita mengejar kesempurnaan atau Kesucian dan ketertiban menuju kesatuan. Ini sebagai janji yang harus dilaksanakan oleh setiap pejuang Tamansiswa. Semboyan ini untuk mengenang tahun berdirinya Persatuan Tamansiswa.

3. **Hak diri untuk menuntut Salam dan Bahagia**:
   Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin.
4. **Salam bahagia diri tidak boleh menyalahi damainya masyarakat:**
   Segala kepentingan bersama harus diletakkan diletakkan di atas kepentingan pribadi masing-masing. Oleh karena itu tak mungkin kita masing-masing akan hidup selamat dan bahagia, apabila masyarakat terganggu, tidak tertib dan damai.
5. **Kodrat Alam itulah Penunjuk Untuk Hidup Sempurna:**
   Jangalah hidup kita bertentangan dengan Kodrat Alam. Petunjuk dalam Kodrat Alam kita jadikan pedoman hidup, baik sebagai individu, sebagai bangsa maupun anggota dari alam kemanusiaan.
6. **Alam hidup manusia adalah alam hidup perbulatan:**
   Hidup kita masing-masing ada dalam lingkungan berbagai alam khusus, yang saling berhubungan dan berpengaruh. Alam khusus : alam diri, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan. Rasa diri, rasa bangga, dan rasa kemanusiaan senantiasa hidup dalam sanubari kita masing-masing.
7. **Kita berhamba kepada Sang Anak:**
   Kita dengan ikhlas hati dan dan bebas dari ikatan apapun, mendekati Sang Anak dan mengorbankan diri kepadanya.

Jangan si murid untuk si guru tetapi si guru untuk si murid.

8. **Tetep - Antep - Mantep:**

   Tetep: ketetapan hati, tetap pada pendiriannya tidak tergoyahkan oleh pengaruh negatif; **Antep** : berat, berbobot, bermutu; **Mantep** : mantap, tetap pada pilihannya.

9. **Ngandel – Kendel - Bandel – Kandel :**

   Ngandel: percaya, yakin kepada penguasa Tuhan dan kekuatan diri; **Kendel:** berani, menghindarkan rasa takut atau wasangka; **Bandel**: tahan, tawakal, hatinya kuat menderita; **Kandel** atau tebal, meskipun menderita namun kuat badan tubuhnya. Empat tabiat ini saling berhubungan, barang siapa dapat percaya tentu ia akan berani, lalu mudahlah ia akan tawakal dan dengan sendirinya ia akan tebal tubuhnya.

10. **Neng - Ning - Nung - Nang** :

    Neng: berarti "meneng", yakni tenteram batinnya; **Ning**: dari kata "wening" dan "bening",berarti jernih fikirannya, yaitu mudah dapat membedakan barang yang "khak" dan yang "batal", yang "benar" dan yang "salah"; **Nung:** dari kata "hanung",berarti kuat, sentosa dalam kemauannya, yaitu kokoh dalam segala kekuatannya, lahir dan batin, untuk mencapai apa yang dikehendaki; **Nang:** dari kata "menang" atau dapat "wewenang" atau berhak atas buah usahanya. wewenang. Empat tabiat ini saling berhubungan, yaitu barang siapa dapat "neng" tentu

mudahlah ia apat dapat berfikir yang "ning", lalu menjadi kuat atau "nung" kemauannya, dan dengan sendirinya ia akan mendapat "menang".

11. **Tutwuri Handayani**:
    Mengikuti di belakang sambil memberi pengaruh. Jangan menarik-narik anak dari depan, biarkanlah mereka mencari jalan sendiri. Jika anak-anak salah jalan, barulah pamong memberi pengaruh menuju jalan yang benar. Inilah semboyan **Sistem Among**.
12. **Bibit, Bebet, Bobot** :
    Dalam mebentuk keluarga yang baik, sejahtera, perlu memperhatikan **Bibit** : benih yang sehat dan baik; **Bebet** : yang menurunkan asal usul keturunan/ orangtuanya; dan **Bobot** : berat yang dimaksud mutu/kualitas.
13. **Senyari Bumi Sedumuk Batuk den Lakoni Taker Pati:**
    Dalam perebutan isteri dan tanah orang biasanya menyabungkan nyawanya. Maksudnya perebutan "isteri" ialah perebutan "keturunan" sedangkan perebutan "senyari tanah" ialah perebutan "negara".
14. **Lebih Baik Mati Terhormat Daripada Hidup Nista**:
    Semboyan pada waktu menentang Undang-Undang Sekolah Liar tahun 1932.
15. **Syari'at tidak dengan Hakikat adalah Kosong; Hakikat tidak dengan Syari'at pasti Batal**:
    Untuk berhasil tidak cukup memakai laku batin, namun harus juga mementingkan laku lahir. Suci batin dan tertibnya lahirnya harus berbarengan.

16. Rawe-rawe Rantas Malang-malang Putung:
Memperteguh kemauan dan tenaga.

17. Dari Natur kearah Kultur :
Dari kodrat ke arab adab. Itulah asas pendidikan Tamansiswa yang bersifat kultural.

H. Penutup

□. Setiap orangtua pasti mendambakan anak keturunannya serba sempurna. Namun hal tsb. tidak seluruhnya menjadi kenyataan. Meskipun bentuk tubuh Ki Hadjar Dewantara kecil dan lemah, ayah beliau menerima keadaan itu dengan penuh rasa syukur. Kiranya apa yang diprediksi oleh Kyai Soleman menjadi kenyataan, Ki Hadjar Dewantara menjadi seorang pemberani, penggembleng jiwa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa melalui penididikan.

□. Di bidang politik, Ki Hadjar Dewantara telah mengembangkan visi nasionalisme kerakyatan melalui "*Nationaal Indische Partij*" (NIP). Penjara umumnya adalah tempat membuat orang menjadi jera. Demikian pula dengan pembuangan/pengasingan dilakukan agar pelaku tidak dapat berhubungan dengan komunitasnya, sehingga apa yang menjadi tujuannya tidak tercapai. Ternyata asumsi penjara dan pembuangan tsb., bagi Ki Hadjar Dewantatara sebagai seorang patriot sejati tidak berlaku. Di balik penjara dan dari pembuangan/ pengasingan, Ki Hadjar Dewantara tetap

berjuang untuk bangsanya. Dengan melalui sarana pers dan politik Ki Hadjar Dewantara telah membuktikan kualitas dan jasanya sebagai perintis perjuangan Kemerdekaan Nasional. Itulah yang menjadikannya Ki Hadjar Dewantara ditetapkan oleh Pemerintah sebagai **Perintis Kemerdekaan RI** dan **Pahlawan Nasional.**

□. Ketika Suwardi Suryaningrat dibuang ke negeri Belanda maupun dipenjara di Semarang dan Pekalongan, beliau adalah wartawan pejuang dan politisi yang berwatak pemberani. Sebagai wartawan Suwardi Suryaningrat bukan saja pandai dan mahir menggerakkan pena, tetapi beliau telah memanfaatkan secara optimal media pers sebagai alat perjuangan untuk membentuk opini publik guna melawan Pemerintah Kolonial Belanda. Gagasan dan pokok pikiran mengenai kemerdekaan bangsa, dan kecaman terhadap setiap penindasan dan perkosaan terhadap kemanusiaan, bukan hanya dilontarkan lewat pidato-pidato saja, akan tetapi diimplementasikan melalui ujung pena. Kalaupun pers nasional dewasa ini mengokohkan diri sebagai pers perjuangan, maka landasan yang dijadikan pangkal tolak itu telah diletakan dasar-dasarnya oleh Ki Hadjar Dewantara. Itulah kemudian Ki Hadjar Dewantara karena jasanya di bidang jurnalistik oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat) diangkat secara "Anumerta" sebagai **Anggota Kehormatan PWI** dan dianugerahi gelar **Perintis Pers Nasional** oleh Dewan Pers.

- . Di bidang pendidikan, Ki Hadjar Dewantara memberikan tawaran alternatif mengenai sistem pendidikan nasional yang egaliter dan partisipatoris melalui teknik kepemimpinan dan Sistem Among dengan model Pawiyatan atau pondok asrama dengan corak nasional, yaitu : Perguruan Tamansiswa. Konsepsi Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang dilatarbelakangi jiwa kebangsaannya yang sangat kuat, dinamis, dan prosepektif serta berakar dari budaya sendiri merupakan konsepsi yang tepat bagi bangsa Indonesia. Itulah yang kemudian menjadikan Ki Hadjar Dewantara sebagai Pelopor Pendidikan Nasional dan **hari lahirnya 2 Mei ditetapakan oleh Pemerintah sebagai Hari Pendidikan Nasional** dan **"Tutwuri Handayani"** dijadikan semboyan oleh Departemen/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Demikian pula, atas jasanya yang sangat besar di bidang kebudayaan, Ki Hadjar Dewantara mendapat gelar **Doktor Honoris Causa** dalam Ilmu Kebudayaan dari UGM.
- . Bagi Ki Hadjar Dewantara perjuangan melalui bidang politik dinilainya sebagai perjuangan yang belum menyentuh jiwa manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu Ki Hadjar Dewantara melakukan re-orientasi atas perjuangannya. Jiwa merdeka tidak mugkin dapat masuk ke hati seseorang apabila hanya pidato-pidato politik, akhirnya Ki Hadjar Dewantara memilih jalan pendidikan sebagai sarana perjuangan untuk menghasilkan manusia baru Indonesia yang sadar akan rasa kebangsaan dan mempunyai jiwa merdeka. Benih-benih hidup merdeka akan tumbuh subur apabila ditaburkan

melalui jalan pendidikan. Penanaman jiwa merdeka melalui pendidikan, berarti mempersenjatai rakyat melawan kolonilisme. Hanya manusia yang berjiwa merdeka lah yang sanggup memperjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah yang mendasari Ki Hadjar Dewantara mendirikan **Perguruan Tamansiswa,** sebagai tempat memelihara, melaksanakan dan mengembangkan konsepsi-konsepsi beliau.

Demikian catatan dan pandangan kami tentang sejarah, perjuangan, dan pengabdian Ki Hadjar Dewantara. Beliau dimuliakan, dihormati, dan dijunjung tinggi, bukan karena keturunan bangsawan dan bukan karena banyak hartanya, tetapi karena amal dan jasanya yang luar biasa bagi sesama, bangsa, dan negara.

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Daftar Kepustakaan :

□. Bambang Sokawati Dewantara: *Ki Hadjar Dewantara Bapakku*, Pustaka Sinar Harapan, 1988

□. Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.

□. Giat Wahyudi, *Sketsa Pemikiran Ki Hajar Dewantara (Membangun Kembali Pendidikan Nasional),* Sanggara Filsafat Indonesia Muda, LKKM Fisip Untag 45 Jakarta, 2007.
□. H.A Harahap & B. Dewantara, *Ki Hadjar Dewantara DKK,* PT. Gunung Agung Jakarta 1980
□. Irna H.N. Hadi Soewito, Dra., *Soewardi Soerjaningrat Dalam Pengasingan*, PN Balai Pustaka, 1985.
□. Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2004.
□. Ki Nayono, *Damar,* Riana Dewi Off*set*, 1998.
□. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, *Ki Hadjar Dewantara, Dalam Pandangan Para Cantrik dan Mentriknya*, Percetakan Tamansiswa, 1989.
□. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, *Mengenal Taman Wijaya Brata, Makam Pahlawan Pejuang Bangsa*, PT. BP Kedaulatan Rakyat, 1996.
□. Muhammad Tauchid, *Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*, Majelis Luhur Tamansiswa Yogyakarta, 1963.
□. Moch. Tauchid, *Ki Hadjar Dewantara Pehlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional*, Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa Yogyakarta, 1968.
□. Sugeng Subagya, *Ki Hadjar Dewantara Menawarkan Masa Depan*, Penerbit Pohon Cemara, 2016

6

DARI POLITIK KE PENDIDIKAN:[1] SEKILAS TENTANG LANGKAH PERJUANGAN SOEWARDI SOERJANINGRAT DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN DAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Oleh: Dr. Yuda B Tangkilisan
Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia, Depok

Abstrak

Perjuangan pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peranan dan kiprah dari Suwardi Surjaningrat atau juga lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara yang berasal dari lingkungan ningrat Puri Pakualaman, Yogyakarta. Perjuangan politiknya mewarnai dan menggemparkan perkembangan politik kolonial Hindia Belanda dan dianggap berbahaya untuk kelangsungan tatanan kolonial sehingga ia bersama kedua teman seperjuangannya diasingkan ke Negeri Belanda. Sekembalinya dari pengasingan, sikap dan langkah drastis perjuangannya adalah ketika beralih ke perjuangan di lapangan pendidikan dengan mendirikan perkumpulan dan sekolah Taman Siswa. Berbagai faktor dan

1. Pengantar diskusi untuk Seminar Ki Hadjar Dewantara di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, 30 Maret 2017.

penyebab berada di balik perubahan ranah perjuangan itu. Walau beralih ranah, ia tetap memegang erat visi dan tujuan yang tidak berubah dari sikap dan kiprah perjuangannya semula, yakni menggapai kemerdekaan Indonesia, melalui pembangunan dan pengembangan pendidikan untuk putera-putera bangsa. Melalui gerakan Taman Siswa, sumbangsih perjuangannya tidak hanya ikut membentuk corak perjuangan pergerakan kebangsaan dan membuka gerbang kemerdekaan Indonesia, melainkan juga hingga mewujudkan dan mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Kata kunci: Suwardi Suryaningrat, pergerakan kebangsaan, kemerdekaan, politik, pendidikan).

A. Pendahuluan

Kemunculan kesadaran sosial budaya dan emansipasi membawa para elite baru terdidik dalam sistem modernisasi kolonial Hindia Belanda sejak awal abad ke-20 ke dalam kancah pergerakan dan perjuangan mulai dari ranah politik hingga ke pendidikan. Perubahan zaman yang melanda dalam pusaran kebijakan kolonial menimbulkan ketidakseimbangan, keguncangan dan peralihan di kalangan elite baru yang berasal dari lingkungan pemuka dan petinggi tradisional, yakni lapisan priyayi. Di satu sisi, mereka mulai tercerabut dari akar identitas dan budaya primordial, sedangkan di sisi lain, mereka tidak dapat melangkah ke gerbang identitas dan budaya modern kolonial. Kelompok elite teratas kolonial, seperti kelompok Eropa dan Eurasian, tidak menyambut mereka untuk menjadi bagian dalam kehidupan sosial budaya yang eksklusif dan penuh keistimewaan (*priviledges*). Sebagian besar mereka, yang tidak memiliki

kesempatan untuk menjadi bagian dalam jenjang birokrasi dan pemerintahan yang masih bersifat turun temurun, menghadapi pilihan yang tidak banyak kecuali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat biasa (wong cilik) dalam alam penjajahan. Kesadaran yang timbul itu menciptakan solidaritas, keprihatinan, perhatian dan rasa kebersamaan dengan masyarakat kaula yang kemudian menjadi semangat dan tema perjuangan mereka dalam upaya menumbangkan sendi-sendi kolonialisme Belanda.

Kebangkitan kesadaran dan emansipasi masyarakat jajahan Hindia Belanda tidak terlepas dari geliat dan dinamika suatu kelompok lapisan elite yang berusaha memaknai dan mengidentifikasi kedudukan dan peranan mereka dalam perubahan-perubahan yang sedang berlangsung, baik di lingkungan sekitar yang kolonialistik maupun pada tataran internasional yang dikenal dan dicerna melalui media-media yang dapat direngkuh. Gagasan dan ajaran modern globalisme yang menggerakkan dan menjadi pendorong untuk berubah, tidak hanya datang dari dunia Eropa, melainkan juga dari kawasan Asia. Segera, para elite modern itu, priyayi baru (neopriyayi), menjadi pembawa perubahan *(agent of change)* yang membawa semangat, cita-cita, tujuan dan cara pergerakan yang radikal, menantang tatanan dan kebijakan kolonialisme.

Perjuangan politik merupakan ranah pilihan untuk mengubah tatanan yang tidak adil tersebut. Perlawanan tidak lagi melalui senjata, melainkan memakai kata dan pena. Dalam tahapan perjuangan dan pergerakan itu, identitas dan

tujuan baru dicapai yaitu, kebangsaan, bangsa, Indonesia dan kemerdekaan. Namun, pencapaian itu tidak hanya diperoleh melalui perjuangan politik. Sumbangsih yang signifikan dan relevan juga diberikan oleh perjuangan di bidang pendidikan. Kesadaran dan pilihan jalur perjuangan ini tidak terlepas dari dinamika dan perkembangan pergerakan nasional dalam konteks perubahan global.

Pendidikanmerupakanbagianyangtidakdapatterpisahkan dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia. Kesadaran dan kemampuan seseorang untuk mampu melangsungkan kehidupannya dan bertahan hidup diperoleh melalui proses pendidikan, mulai dari pengetahuan, keterampilan, kepandaian hingga kearifan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran, akibat dan penyebab dalam perubahan sosial. Pengembangan sektor pendidikan merupakan salah satu strategi, cara dan teori dalam pembangunan ekonomi yang bertalian dengan faktor keunggulan bersaing (*competitive advantaves*).

Dalam perspektif dan pengalaman sejarah Indonesia, pendirian dan perkembangan kolonialisme Hindia Belanda tidak mengesampingkan ranah pendidikan. Setelah pembentukan jenjang, jaringan dan jangkauan kekuasaan pemerintahan atau birokratisasi, penyediaan sumber daya manusianya setelah jajaran pemerintahan modern Barat *(Europeesche Besturen)* diambil dari masyarakat setempat melalui penerapan dan pelaksanaan pendidikan selaras dengan tuntutan dan kebutuhan kolonialisme ketika itu. Kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya itu tidak

hanya mempersiapkan tenaga kerja untuk roda pemerintahan (*Inlandsche Besturen*), melainkan juga bidang profesi lainnya seperti guru, tenaga medis, kerani, pertukangan dan lainnya. Bahkan, kebijakan itu menyentuh pula ke ranah pertahanan dan keamanan, berupa pendidikan polisi dan tentara. Tampak jelas bahwa persoalan pendidikan merupakan bagian dari modernisasi dan perubahan yang ditimbulkannya.

Konsepsi dan cakupan pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah, terutama dalam artian bangunannya. Pada hakekatnya, konsep pendidikan adalah perubahan, yakni bagaimana seseorang menjadi berbeda ketika sebelum dan setelah mengikuti dan mengalami pendidikan, yang tentunya dalam aura positif menuju ke keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Pendekatan, metode dan metodologi pendidikan saat ini telah menjadi sedemikian luas dan juga tidak jarang menjadi rumit (*complicated*). Oleh karena itu, sejumlah pendapat yang menyoroti masalah-masalah dalam perkembangan dan pembangunan nasional menoleh pada dan menilik ranah pendidikan. Kesemua itu menyiratkan dan memperlihatkan betapa penting pendidikan dalam kehidupan perseorangan, kelompok (kolektivitas) serta terutama berbangsa dan bernegara.

Kebijakan dan pelaksanaan pendidikan kolonial memiliki suatu dampak samping (*side effects*) yang tampaknya tidak begitu banyak diduga sebelumnya, berupa persemaian benih kesadaran, rasa emansipasi dan kebangsaan. Pendidikan sekolah pemerintahan, seperti MOSVIA dan kemudian OSVIA,

dan kedokteran seperti Sekolah Dokter Jawa dan STOVIA, menghasilkan banyak lulusan yang kemudian menjadi sosok pembaharu, penggerak dan pendorong ke arah emansipasi dan pergerakan nasional. Kesempatan dan peluang itu muncul ketika pencanangan Politik Etis di Hindia Belanda yang berlandaskan pada suatu Hutang Budi *(Eereschuld)* pada awal abad ke-20 sebagai manifestasi dari perkembangan dan tuntutan zaman terhadap pengelolaan wilayah koloni dan kolonialisme.

Berawal dari pembentukan suatu organisasi sukarela yang modern, yaitu Boedi Oetomo, para elite baru berpendidikan Barat itu memulai suatu lembaran sejarah yang berbeda dengan masa sebelumnya. Perjuangan untuk melawan belenggu penjajahan, ketidakadilan dan eksploitasi tidak lagi melalui perlawanan bersenjata, melainkan dengan cara tanpa kekerasan *(non violence)* melalui gerakan sosial modern seperti rapat umum penyampaian pendapat, pengerahan massa unjuk rasa, pemogokan, surat menyurat, memakai sarana pers walau masih muncul pemberontakan seperti pada tahun 1926. Cakrawala politik kolonial diwarnai oleh gegap gempita pergerakan nasional yang dapat dipilah menjadi gerakan bekerjasama (koperatif) dan tidak bekerjasama (non koperatif) dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

B. Suwardi Suryaningrat

Perjuangan Suwardi kerap dibatasi dan hanya merujuk pada gerakan pendidikan melalui organisasi dan sekolah Taman

Siswa. Pendapat ini tidaklah keliru. Taman Siswa menorehkan goresan jejak-jejak perjuangan yang penting pada masa pergerakan nasional dan di masa selanjutnya. Kenji Tsuchiya (1987: xi) menggambarkannya sebagai berikut: *"The leader of Taman Siswa was Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, the principal founder of the original school, who in 1928 took the name Ki Hadjar Dewantara. During the 1930s his reputation grew, and during the Japanese military administration he was recognized, along with Sukarno, Hatta, and the Muslim leader Kyai Haji Mansur, as one of the four outstanding leaders of the Indonesian people. With the establishmen of the independent Republic of Indonesia, Dewantara, became minister of education in the first cabinet, and to later governments he served as chief adviser on educational matters. He died at age seventy on 26 April 1959; in November of the same year he was proclaimed a national hero, anda month later his birthday, may 2, was declared National Education Day (Hari Pendidikan).*" Memang, sosok pahlawan nasional itu lebih dikenal sebagai tokoh pendidikan, yang kerap menyaput perjuangan, kiprah dan sumbangsihnya dalam perkembangan politik nasional.

Ketika Boedi Oetomo dibentuk, sebagai perkumpulan sukarela modern awal di Hindia Belanda, ia pun menjadi anggotanya walau tidak berlangsung lama dan tidak memperlihatkan jejak dan sentuhan yang membawa perubahan signifikan. Juga, sebagai anggota dan pengurus Sarekat Islam, rekam jejak kiprahnya tidak memperlihatkan sumbangsih

yang signifikan. Peran dan sumbangsihnya untuk landasan politik untuk Indonesia muncul dan membentuk pada saat ia mendirikan dan bergerak dalam partai politik awal di Hindia Belanda, bersama rekan seperjuangannya yakni RM Tjipto Mangunkusumo dan EFE Douwes Dekker. Ketiga sosok itu dikenal sebagai Tiga Serangkai yang mendirikan Partai Hindia (Indische Partij) yang jelas-jelas berhaluan politik dan memperjuangkan melepaskan diri dari belenggu kolonial Belanda (*los van Nederland*). Bersama-sama dengan Boedi Oetomo yang semula juga memperjuangkan peningkatan derajad Hindia dan kemudian memusatkan perjuangannya pada gerakan memuliakan kebudayaan Jawa, dan Sarekat Islam, yang semula bernama Sarekat Dagang Islam yang hendak meningkatkan kemampuan dalam persaingan dagang dan kemudian berubah menjadi gerakan politik bertujuan dan bercorak agama, Partai Hindia menawarkan dan memperjuangkan pembentukan suatu masyarakat politik supra primordialisme yang bersatu, dan dibayangkan sebagai bangsa Hindia (*de Indiers*).

GagasanbangsaHindiaberlandaskanpadasuatukenyataan sosial budaya masyarakat kolonial yang memperlihatkan ambiguitas, eksklusivitas, separatis, hirarkis dan diskriminatif. Di bawah pengaruh idealisme dan kecenderungan perkembangan politik global yang memperlihatkan pasang naik gerakan antikolonialisme dan imperalisme, pembentukan identitas politik yang emansipatoris, setara dan seimbang diperjuangkan dalam tatanan, kebijakan dan kepentingan kolonialisme Hindia

Belanda yang hendak berkuasa selama mungkin. Persaingan kapitalisme modern sejak Revolusi Industri menjadikan daerah dan kekuasaan penjajahan menjadi penting, sebagai pemasok bahan baku dan pasar hasil produksi negeri induk. Seraya itu pula, gagasan tentang pembaharuan ikatan dan hubungan kolonial pun muncul dan berkembang di lingkungan negeri induk.

Gagasan bangsa Hindia, yang dicetuskan oleh Ernst Douwes Dekker seorang cucu keponakan Eduard Douwes Dekker yang menulis karya Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli yang sempat menggemparkan dunia Eropa karena mengungkapkan skandal eksploitasi kolonial Hindia Belanda, dari keturunan campuran Eurasian atau Indo, berkembang di tengah-tengah masyarakat kolonial yang terfragmentaris berdasarkan kedudukan dan kepentingan yang tidak hanya saling berbeda, bahkan pula bertentangan dalam lingkup hegemoni dan keistimewaan *(privileges)*. Awalnya, gagasan persatuan politik itu mendapat sambutan di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat kolonial, termasuk dari sebagian kelompok Eropa dan Indo (Eurasia), dan juga dari kelompok Cina dan Bumiputra. Namun, gagasan untuk menarik kalangan elite Eropa, sebagaimana sempat mencuat di balik gagasan mempersatukan dari gerakan Boedi Oetomo, cenderung memperlihatkan kegagalan dan penolakan. Alasan utamanya adalah mereka tidak merasa nyaman dan tidak siap untuk hidup

berdampingan serta berbagi bersama, terutama dengan kalangan Bumiputera.

Abdurrachman Surjomihardjo (1986: 21) menggambarkan gagasan dan perjuangan kebangsaan Hindia: "Kembali kepada nasionalisme revolusioner: benih-benihnya pernah dirumuskan oleh Indische Partij, dengan tiga serangkai pemimpinnya Douwes Dekker—Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat. Tujuan Indische Partij ialah untuk 'membangunkan patriotisme semua 'Kaum Hindia' kepada tanah air, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan Tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.' Dari pasal-pasal dalam anggaran dasarnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa Indische Partij berpijak atas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah 'wisma nasional' semua mengakui 'Hindia' sebagai tanah air, negara dan kebangsaannya. Paham itu pada masanya dikenal sebagai Indisch Nationalism, yang di kemudian hari melalui Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasionalisme Indonesia menjadi Nasionalisme Indonesia. Semboyannya 'Lepas dari Nederland' mendorong corak radikal organisasi mahasiswa di Nederland maupun Indonesia, antara lain karena pengaruh para pemimpin Indische Partij yang dibuang ke Nederland."

Ciri kesetaraan dalam perjuangan pembentukan bangsa Hindia ditampilkan oleh Suwardi Surjaningrat dengan

menanggalkan pemakaian gelar askriptifnya yang menandai lingkungan bangsawan sebagai asal usulnya berupa Raden Mas. Suatu kontribusi penting lainnya adalah pemakaian dan pengenalan istilah Indonesia. R.E. Elson (2008: 35) mencatat:“Tidak jelas siapa dalam IV (Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia, pen) yang pertama kali mengambil istilah ‘Indonesia’ dari etnografi colonial dan ruang kuliah Leiden serta menerapkannya kepada ‘calon negara’ dalam arti murni politis, namun halaman-halaman Hindia Potera (jurnal bulanan IV, pen.) Soewardilah yang pertama kali mencatat penggunaan kata ‘Indonesia’ oleh seorang Indonesia: amanat penutup acara penyambutan kunjungan delegasi Indie Weerbaar di Den Haag oleh ahli musikologi R.M.A. Soeryo Poetro,April 1917.” Semasa pengasingan di negeri penjajah itu, Ia mendirikan Indonesische Pers Bureau, Biro Pers Indonesia, yang menyebarkan istilah Indonesia untuk masyarakat terjajah Hindia Belanda.

Peranan dan sumbangsih Taman Siswa dalam pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia tampak pada penjelasan berikut: “*Taman Siswa, with its emphasis on a national education to unite the various cultural and ideological segments in Indonesia, has always been identified with the prewar nationalist movement. Established in 1922 by Ki Hadjar Dewantoro as the Nationaal Onderwijs Instituut "Taman Siswa," the movement was to some extent a reaction to the "deracinating" effects of Western education...Taman Siswa attracted the support of many who regarded the organization*

as working towards the political objectives of national unity and independence. Some associated themselves with Taman Siswa because they believed this affiliation gave them scope to contribute to the cause of nationalism, particularly at a time when the Dutch were taking tough repressive measures against overt political activities. Consequently, despite its leaders' frowning on politics in the schools, Taman Siswa tended to encourage the growth of anticolonial sentiments among its members. Such factors as the socioeconomic background of its pupils, the presence of radical nationalists on its teaching staff, Ki Hadjar Dewantoro's pedagogical approach, and its atmosphere of cultural nationalism--all contributed to a heightened political consciousness. By the time the 1932 Taman Siswa congress was held, there was already a large group of political activists within the organization, many of whom were also members of the Partai Indonesia (Partindo) and the Pendidikan Nasional Indonesia (residues of Sukarno's banned PNI)" (Lee 1978: 41.42). Sejak berjuang di ranah politik hingga memasuki lapangan pendidikan, garis perjuangan dan pergerakannya sangat jelas berhaluan tidak bekerja sama dengan pemerintah dan kebijakan kolonial. Suwardi termasuk perintis pergerakan nasional berhaluan non koperatif yang tergolong radikal dan agitatif terhadap ketidakadilan dan eksploitasi penjajahan.

C. Terjun ke Perjuangan Pendidikan

Ketika Taman siswa berdiri, Suwardi Surjaningrat tidak langsung mengubah namanya menjadi Ki Hajar SeDewantara. Perubahan itu terjadi dua tahun setelah pendirian lembaga pendidikan tersebut. Sejak itu, corak perjuangannya berubah total,dari ranah politik menjadi dunia pendidikan. Peralihan itu memiliki sejumlah latar belakang dan faktor pendorong, yang tidak hanya berkaitan dengan keadaan dan perkembangan pergerakan kebangsaan dalam pengawasan serta kebijakan kolonial yang kian menekan dan membatasi, namun juga tidak lepas dari wawasan, visi dan kearifan dalam menilik permasalahan utama masyarakat jajahan yang sedang berjuang untuk mencapai kesadaran, semangat emansipasi, tekad persatuan, kesejahteraan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, bekal kesadaran kritis dari masa sekolah, lapangan perjuangan politik, pengalaman pengasingan, kiprah dalam kancah pers, pematangan intelektual dan penemuan kearifan menjadi proses dan faktor yang jalin menjalin dalam perjalanan hidupnya dan memainkan peranan ketika pengambilan keputusan untuk terjun ke dunia pendidikan.

Tujuan emansipasi yang menjadi haluan dan latar belakang pembentukan serta perjuangan Boedi Oetomo dan Sarekat Islam dalam proses penempaan wawasan intelektual melalui proses pendidikan yang ditempuh membawanya pada suatu kesadaran dan wawasan betapa pentingnya membangkitkan semangat dan tekad untuk mengubah tatanan kehidupan

kolonial. Melalui goresan pena dan pidato-pidato politik yang kritis dan relevan, dalam wadah Indische Partij, pemikiran dan seruannya mengajak masyarakat terjajah, terutama kalangan elite dan pergerakan kebangsaan, untuk senantiasa berjuang dalam menghadapi penindasan kolonialisme, dalam kemasan serta pesan yang mengajar dan mendidik. Di balik, tulisan yang tajam dan radikal berjudul "Als ik eens Nederlander was", menyerukan sasaran kritiknya untuk belajar agar memahami rasa dan empati terhadap nuansa kalbu masyarakat terjajah. Gagasan dan kiprah perjuangan kebangsaan dan kemerdekaan dalam dinamika kolektif melalui organisasi Partai Hindia merupakan suatu pembelajaran politik bagi suatu masyarakat terjajah yang tengah bangkit, mencari identitas, bergerak dan membayangkan menjadi bangsa yang merdeka, yaitu Indonesia.

Pembelajaranituberlanjutketikaiadihukumolehperadilan kolonial akibat kegiatan politik yang dianggap membahayakan tatanan kolonial dan dibuang ke Negeri Belanda,bersama dua rekan seperjuangannya dalam pergerakan Partai Hindia. Di negeri penjajah itu, ia tetap memberikan tanda-tanda suri tauladan, baik dalam pemikiran maupun sikap dan tindakan, di samping tetap membangun karsa. Hidup sederhana dan mandiri, tetap memelihara semangat perjuangan dan menyumbangkan gagasan-gagasan yang mencerahkan melalui tulisan dijalaninya semasa hidup di pengasingan itu. Di Negeri Belanda, ia terlibat dalam kegiatan dan pergerakan Perhimpunan Hindia, yang kelak menghasilkan tokoh-tokoh yang berperanan penting dalam

pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Dokter Soetomo pernah juga terjun dalam perkumpulan ini ketika melanjutkan pendidikannya di Negeri Belanda. Suwardi menjadi penulis yang banyak menyumbangkan gagasan cemerlang dalam pembangunan budaya Indonesia.

Selanjutnya, ia tetap menempa diri dan menimba ilmu pengetahuan melalui ikut serta dalam kursus-kursus dalam praktik pendidikan. Ia tertarik untuk mempelajari lebih,memdalami metode pendidikan model Frobel, Tagore dan Montessori, yang sedang berkembang dan melanda dunia pendidikan di Eropa ketika itu. Pengetahuan yang diperoleh kelak menemukan kancah pengamalan setelah ia kembali ke Tanah Air dan mendirikan suatu perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan anak bangsa. Kenji Tsuchiya (1975:168) melukiskan keadaan itu sebagai berikut, "*Dewantara's interest in the problem of education, however, goes back to his days in the Netherlands. During the period of the purge, he was exposed to some new pedagogical education ideas like those of Montessori, Frobel and Tagore which were very popular in Europe at that time. These theories laid stress on the individual personalities of children and their potentialities.*"

Ia juga sempat menghadiri suatu Kongres Pertama Pendidikan Kolonial dan memperoleh sertifikat sebagai pendidik. Dalam forum itu, ia terlibat aktif dalam pembahasan tentang pendidikan sesuai dengan tema acara tersebut. Ruth McVey (1967: 130) mengkaitkan peristiwa dan pengalaman itu

dalam awal mula dan pembentukan perhatiannya pada masalah dan signifikansi peranan pendidikan. Ia menuliskannya, *"We can trace the Taman Siswa idea, if we wish, from Suwardi Surjaningrat's Netherlands exile of 1913-17, when he obtained a teaching certificate, attended the First Colonial Education Congress in The Hague, and participated in discussions regarding a "national" modification of the Indies school system, a subject of some debate among Dutch educators at the time.*

Motif untuk bergerak di lapangan pendidikan tampaknya diperkuat oleh pertimbangan pribadi yang berlandaskan pada tanggung jawab dan perannya dalam membina keluarga, terutama putera dan puterinya, sebagaimana penggmbaran berikut, "Rencana Soewardi mengenai pendidikan yang akan diterapkan di tanah air tersebut bertambah matang, setelah kelahiran Asti. Anak pertama yang dilahirkan pada hari Selasa Kliwon, 24 Agustus 1915 di Regentenslaan No. 166 di 's-Gravenhage itu, kemudian diketahui bahwa pertumbuhannya tidak normal. Asti berpikiran lemah. Mungkin ini disebabkan oleh hubungan darah, yang terlalu dekat antara bapak dan ibunya (saudara sepupu) tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu merupakan suatu akibat sakit thypus yang pernah dideritanya pada tanggal 9 Mei 1919, sehingga mendapat perawatan di Gemeentelijk Ziekenhuis (Rumah Sakit Umum) Den Haag, selama 42 hari; yakni dari tanggal 24 mei hingga 6 juli 1919. Ketetapan Soewardi tersebut, sama dengan langkah pertama dari Montessori, ia juga memulai

kariernya dengan mendidik anak-anak yang lemah pikiran.” (Soewito1985: 101).

Perhatian Suwardi yang menyemai semasa hidup di negeri pengasingan dikemukakan juga oleh isterinya, Sutartinah yang kelak dikenal sebagai Nyi Hajar Dewantara. Namun, gejolak dan gairah perjuangan politik sempat menyaput perhatian itu. Ia menggambarkannya sebagai “Semenjak kelahiran anaknya yang pertama, sebenarnya Suwardi sudah meanruh perhatian kepada bidang pendidikan. Sewaktu masih di negeri Belanda Suwardi sudah pernah mengatakan bahwa dunia pendidikan di Hindia belanda perlu sentuhan tangan para pejuang kebangsaan dan kemerdekaan. Dan berdasarkan pendapat ini pulalah, maka Sutartinah selain mengajar di Frobel School di Weimaar, iapun mengikuti Kursus Pendidikan Guru Frobel. Dan Suwardi sendiri pun pernah mengikuti kursus dan kemudian menggondol Akte Guru Eropa. Akan tetapi sesudah Suwardi melaksanakan slogannya ‘Kembali ke medan juang’ rupanya gagasan itu tidak pernah timbul lagi dalam pikiran Suwardi yang mulai ditimbuni oleh kegiatan-kegiatan politik dan jurnalistik.” (Dewantara 1984: 102).

Pendidikan politik dilanjutkannya dalam pertarungan dan agitasi langsung terhadap tatanan politik jajahan ketika masa pengasingannya selesai. Setiba di Tanah Air, segera ia memasuki kembali ranah perjuangan politik melalui partai politik, Nationale Indische Partij (NIP). Gagasan dan kiprahnya memanaskan kancah politik jajahan yang tampaknya mulai

mengubah haluan kebijakan politiknya dari semangat politik Etis dan di bawah pengaruh Perang Dunia Pertama yang membawa berbagai akibat terutama keadaan perekonomian tidak hanya di lingkungan Eropa dimana perang itu berlangsung melainkan juga di kawasan koloni. Kancah kebangkitan politik kebangsaan disemaraki oleh pergerakan partai politik lainnya yang radikal terutama Sarekat Islam dan ISDV, cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia, selain kehadiran Serikat-serikat Pekerja. Di bidang pendidikan, pendirian Muhammadiyah menandai dan mewarnai ranah perjuangan yang kian meluas ke berbagai kalangan dan lapisan elite terjajah.

Perkembangan politik kolonial dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda ikut membentuk alasan Suwardi untuk terjun dalam perjuangan di lapangan pendidikan. Penggantian jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dari van Limburg Stirrum ke de Fock, pada tahun 1921 membawa sikap dan tindakan politik yang lebih represif terhadap pergerakan kebangsaan. Penjelasan berikut memaparkan bagaimana keadaan dan perkembangan politik itu mempengaruhi sikap dan cara perjuangannya, yaitu: "Ketika di dalam partai N.I.P timbul ketidak-sesuaian paham di antara pemimpin-pemimpinnya mengenai sikap terhadap pemerintah, lagi pula perkembangan nasionalisme di kalangan anggota-anggotanya sudah sangat merosot, maka sejak 1921 Suwardi Suryaningrat memilih jalan baru untuk melanjutkan perjuangannya. Bidang yang dipilihnya sama dengan Douwes Dekker. Pada saat itu lahirlah putera yang ketiga, seorang puteri

nama Ratih Tarbiah. Nama ini dimaksudkan untuk mengenangkan peristiwa saat permulaan ia terjun ke lapangan baru, lapangan pendidikan. Tarbiah berarti pendidikan. Dengan demikian maka dari Tiga Serangkai atau Janget Kinatelon Indische Partij yang pernah menjalani hukuman pengasingan di Negeri Belanda, hanya dr. Cipto Mangunkusumo saja yang masih meneruskan kegiatannya dalam bidang politik." (Soeratman 1983/1984: 81). Suatu catatan yang menarik, perubahan perhatian perjuangan itu ditandai oleh kelahiran puterinya, yang dikukuhkan pada tahun-tahun berikutnya ketika menggunakan nama Ki Hajar Dewantara.

Berkenan dengan politik, M. Yamin memberikan catatannya bahwa "Dalam pandangan Ki Hadjar, politik tidak mampu mengubah keadaan bangsa Indonesia. Politik justru semakin melahirkan kekisruhan yang semakin besar bagi dinamika kehidupan bangsa sebelum ada penguatan pendidikan dalam tubuh bangsa ini…" Pertimbangan itu timbul setelah Suwardi kembali dari pengasingan (Tri H 2014: 59). Dalam menghadapi tantangan kebijakan pemerintah kolonial itu sempat terjadi dialog antara Suwardi dan isterinya, yang peran dan kiprah dalam perjuangannya tidak dapat dikesampingkan karena bukan hanya setia mendampingi melainkan selalu menjadi mitra dan tumpuan perjuangannya, terutama ketika ia harus hidup dalam penjara. Isterinya pernah menyampaikan bahwa Suwardi tidak cocok untuk berjuang di garis politik karena sifat emosional yang tidak mampu dikendalikannya

sehingga mudah jatuh ke dalam perangkap dan jebakan lawan-lawannya, terutama pemerintah kolonial. Dalam saat-saat seperti itu, percakapan tentang perjuangan pendidikan kerap muncul dan mendapat perhatian yang seksama dari Suwardi. Bertalian dengan pertimbangan itu, peristiwa pertemuan Suwardi dengan dua tokoh pendidikan modern Islam menjadi signifikan dan relevan. Pada pertengahan tahun 1920, Suwardi dan sang isteri terlibat pembicaraan mendalam dengan dua tokoh penting Muhammadyah yang memaparkan rencana dan strategi perjuangan perkumpulan mereka dalam menghadapi rintangan dan hambatan colonial. Dalam perbincangan itu, Suwardi sempat mengungkapkan gagasan hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan nasional yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan walau tidak menentukan waktu yang pasti untuk mewujudkannya (Dewantara 1984: 104).

Berikutnya, dua peristiwa perlu dicermati untuk memperoleh alasan peralihan lapangan perjuangan itu. Peristiwa pertama adalah pengalamannya dalam perkumpulan budaya di lingkungan Puri Pakualaman, Yogyakarta, Sarasehan (Perkumpulan atau Gerombolan) Slasa (Selasa) Kliwonan. Peristiwa berikutnya adalah pengalamannya mengajar di sekolah Adi Darma di kota yang sama. Dalam perkumpulan budaya, yang mendekati penempaan kebatinan dan pencarian kebijaksanaan, pokok bahasan hingga meliputi konsepsi pendidikan tradisional Jawa untuk kepentingan nasional dalam lingkup keprihatinan terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh

penerapan prinsip pendidikan modern Barat, di bawah pimpinan Pangeran Suryomataram.

David Radcliffe.(1971: 221) menggambarkan faktor keterlibatannya dengan perkumpulan budaya itu sebagai berikut: *"In September 1919 he was finally able to return to Indonesia, and immediately his services were sought as editor and leader writer for various nationalist news- papers. He first settled in Semarang, but in 1921 he returned to Jogjakarta, and it was here that he became a member of a cultural discussion group, the Sarasehan Slasa Kliwonan, which seems to have given the final impetus to the fruition of his decision to found a National School System. It was during the group's discussions on the colonial predicament that he evolved a truly indigenous education which would implant the values of independence and nationalism in youth as a foundation for the political struggle for freedom."* Pemaparan Kenji Tsuchiya (1975: 168) memperlihatkan pengalaman mengajar di sekolah itu, yakni: *"Teaching at the Adi Darma school for one year must have induced him to establish a new type of school based on his own ideas somewhat influenced by those he learnt from Europe. For this purpose, however, he paradoxically joined the most traditional Javanese group for meditation (kebatinan) Selasa Kliwon and thereby succeeded in starting a new school Taman Siswa on July 3,1922 at the heart of Javanese Island, Yogyakarta,"*

Melengkapi penjelasan-penjelasan tersebut, adalah penjelasan berikut: "*We can find its origins equally well in a*

culturally traditional group, the Pagujuban Selasa-Kliwon, which met under the well-known Jogjakarta mystic Pangeran Surjamataram to discuss questions of Javanese mysticism (kebatinan). It decided that what Indonesia needed most was a good national education, and when one of its members, Suwardi, succeeded in founding the first Taman Siswa school, the group disbanded on the grounds that its ideal had been realized, various of its members thereupon forming the institute's first board of governors (Mc Vey 1967:130, 131).

Faktor penjelasan dan alasan utama perubahan lapangan perjuangan itu tentunya berkaitan erat dengan pertimbangan, analisis, pemikiran dan kearifannya dalam memandang dan memilih ranah pendidikan untuk menjadi kiprah dan sumbangsihnya untuk pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam tulisan-tulisan kritisnya yang tersebar di berbagai media, ketika masih menggeluti dunia pers, aspek pendidikan terselip dan tersebar pada berbagai gagasan dan pemikiran politiknya, yang kian mendapat wujudnya dalam pandangannya tentang kebudayaan. Perhatian tentang kebudayaan tampak ketika berada pada masa pengasingan di Negeri Belanda. Formulasi yang lebih tajam,mengarah dan utuh terjadi sejak pidato pengantarnya pada pembukaan dan pendirian sekolah serta perkumpulan Taman Siswa yang dimuat dalam terbitan resminya.

Untuk itu tidaklah mudah untuk menelusuri dan mengungkapkan faktor intelektual dan visioner tersebut, karena

terkait erat dengan struktur pemikiran dan pengamatannya tentang dunia pendidikan, terutama dalam memajukan Taman Siswa. Beberapa pakar Sejarah mencoba menggali dan mengungkapkan perjuangan dan wacana intelektual sosok pendiri Taman Siswa itu, seperti Kenji Tsuchiya (1987), Abdurrachman Surjomihardjo (1986) dan David Radcliffe (1971). Kajian mereka dilandaskan pada suatu perjalanan penelitian yang relatif panjang sehingga berhasil menjelaskan struktur pemikiran dan sudut pandang Suwardi Surjaningrat tentang pendidikan dalam dinamika perkembangan dan perubahan zaman. Penjelasan berikut, walau ringkas, setidaknya telah mencakup garis besar wacana intelektual itu, yakni: "Ki Hadjar Dewantara berharap dapat mewujudkan kemerdekaan berpikir peserta didik melalui pendidikan. Pada saatnya, pendidikan akan membawa peserta didik pada kemerdekaan yang lebih utuh. Maka, pendidikan adalah bagian integral dari proses memerdekakan Indonesia. Dalam pembukaan Perguruan Taman Siswa yang pertama, dengan tegas Ki Hadjar Dewantara mengajak masyarakat untuk membangun kebudayaan dan pandangan hidup sendiri dengan menyemaikan benih benih-benih kemerdekaan di hati rakyat melalui pendidikan yang bersifat nasional dalam segala aspek. Cita-cita pendidikannya adalah untuk kemerdekaan manusia. Kemerdekaan berarti setiap individu bebas untuk menggunakan pikirannya dan bebas dari paksaan pihak lain" (Tri H 2014: 59, 60). Penjelasan yang lebih kritis dan memadai memerlukan pendalaman lebih lanjut, kritis dan menyeluruh.

D. Catatan Akhir

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah militer Jepang ataupun sekedar kesempatan tidak terduga yang terbuka pada saat kekosongan kekuasaan terjadi sebagai akibat dari akhir Perang Pasifik (1941-1945). Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu proses yang memiliki awal mula dan dinamikanya dalam suatu perjuangan yang berliku hingga berhasil diraih. Gerakan awal menuju kemerdekaan bermula dari kelahiran dan pembentukan kesadaran dan emansipasi terhadap keadaan eksploitasi penjajahan. Gerakan itu berlanjut pada penjelajahan dan formulasi rasa persatuan dan kesatuan dalam suatu identitas kebangsaan. Istilah dan konsepsi Indonesia merupakan penemuan orisinal dan kreatif dalam refleksi dan wawasan modern terhadap kemajemukan masyarakat terjajah yang terpilah ke dalam berbagai etnik dan budaya. Selanjutnya, gerakan kebangsaan berlangsung dalam corak perjuangan koperatif dan non koperatif.

Salah seorang sosok perintis gerakan non koperatif yang mengambil sikap dan posisi bertentangan dan melawan kebijakan kolonialisme adalah Suwardi Surjaningrat. Bersama dengan kedua rekan seperjuangan, mendirikan sebuah partai politik, Indische Partij yang memperjuangkan kebebasan dan pembentukan bangsa Hindia, melalui tulisan, pidato, rapat umum dan konfrontasi. Perjuangan yang radikal itu berujung pada kebijakan represif kolonial berupa hukuman pembuangan dengan pilihannya ke Negeri Belanda yang tidak pernah mampu

meredam semangat dan gejolak perjuangan konfrontatif dan agitatifnya. Tekad dan ketegarannya tampak tidak mampu ditundukkan dan ditaklukkan oleh perlakuan tegas dan keras dari penguasa kolonial. Kearifan yang telah menghantarnya untuk beralih gelanggang perjuangan, ke lapangan pendidikan yang dilakoninya tetap dalam garis non koperatif untuk menuju kemerdekaan.

Perjalanan perjuangan Suwardi meninggalkan tidak hanya semangat melainkan juga suri tauladan yang penuh kebijaksanaan, sebagai warisan masa lampau yang tak lekang oleh deru zaman. Pilihan dan visi perjuangannya, pada ranah pendidikan memperlihatkan relevansi dan signifikansi dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, yang sedang bekerja keras untuk melepaskan diri dari ketertinggalan segera menggapai kemajuan di tengah-tengah persaingan internasional yang kian sengit. Pendidikan, yang bertumpu pada kemampuan dan budaya sendiri, menjadi kunci utama dan penting untuk membentuk bangsa yang unggul dan penuh kompetensi agar tidak kalah dalam pertarungan dan persaingan antar bangsa itu. Kiranya harapan dan perjuangan Suwardi Surjaningrat tidaklah menjadi sia-sia, sebagaimana suri tauladan sikap, semangat, tekad, kepekaan, visi dan kearifan yang diperlihatkannya untuk bangsa dan negaranya dalam mencapaidan mengisi cita-cita kemerdekaan.

Daftar Pustaka

Dewantara, B.S. *Nyi Hajar Dewantara*. Jakarta: Gunung Agung, 1984

Elson, R.E. *The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi, 2008

Radcliffe, David."Ki Hadjar Dewantara and the Taman Siswa Schools; Notes on an Extra-Colonial Theory ofEducation."*Comparative Education Review*, Vol. 15, No. 2, Colonialism and Education (June.,1971), pp. 219-226

Soeratman, Darsiti. *Ki Hajar Dewantara.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984

Soewito, Irna H.N. Hadi. *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985

Tri H, Yohanes Suryo Bagus. "Ki Hadjar Dewantara: Mendidik Manusia Merdeka," dalam: Johanes Supriyono (peny.). *Memoria Indonesia Bergerak*. Jakarta: Megawati Institute, 2014, 53--68

Tsuchiya, Kenji . "The Taman Siswa Movement: Its Early Eight Years and Javanese Background." *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 6, No. 2, Essays by Japanese Scholars inthe Center for Southeast Asian Studies at Kyoto University (Sep., 1975), pp. 164-177

-------. *Democracy and Leadership:The Rise of Taman Siswa Movement in Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1987

Mc.Vey, Ruth T.. "Taman Siswa and the Indonesian National Awakening". *Indonesia*, No. 4 (Oct., 1967), pp. 128-149